

BANTEN SME



www.bantenisme.com

JILID 1

Editor:

Anis Fuad,

Kandung S. Nugroho



Penulis :

*Gandung Ismanto & Listyaningsih,
Puspita Asri Praceka & Darwis Sagita,
Yeni Widyastuti dkk, Iman Mukhroman,
Agus Sjafari, Ipah Ema Jumiati, Titi Stiawati,
Hasuri dkk, Neka Fitriyah.*



FISIP Untirta Press

**Anis Fuad &
Kandung S. Nugroho**

Bantenisme

Jilid 1

FISIP Untirta Press

Nopember 2012

BANTENISME

Jilid 1

Editor:

Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho

Desain Sampul:

ridvan@indosain.com

Tata Letak:

AnisFuad

Penerbit:

FISIP Untirta Press

Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan

Serang, Banten, Indonesia 42122

site: <http://www.fisip-untirta.ac.id>

email: ict@fisip-untirta.ac.id

booksite: <http://www.bantenisme.com>

Cetakan I: Nopember 2012

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-97365-6-4 (no.jil lengkap)

ISBN 978-602-97365-7-1 (jil.1)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelesaian buku serial Kebantenan ini yang berjudul Bantenisme. Serial Pertama berjudul Bantenesia yang sudah terbit pada bulan Februari yang lalu menjadi awal dari serial seri Kajian Kebantenan di FISIP Untirta. Kemudian dilanjutkan dengan Buku Bantenisme yang saat ini ada di tangan anda. Buku Bantenisme terdiri dari dua jilid. Buku yang sedang anda baca ini merupakan buku jilid ke-1 (satu) yang berisikan kumpulan tulisan hasil refleksi maupun hasil penelitian beberapa dosen yang ada di FISIP Untirta ini. Buku ini akan dipublikasikan juga dalam versi online yang tersajikan di situs <http://www.bantenisme.com>.

Buku Bantenisme Jilid 1, merupakan sebuah proses evolusi dan refleksi berfikir yang tidak akan berakhir. Buku ini merupakan proses pembelajaran yang membuka ruang diskusi

terbuka bagi seluruh kalangan tentang apa dan bagaimana Banten serta perkembangannya.

Provinsi Banten mempunyai keunikan tersendiri, Banten menyimpan potensi yang luar biasa, potensi ekonomi, potensi budaya. Banten penuh dengan sumberdaya, namun senyatanya Banten dapat dikatakan tertinggal dari daerah lainnya. Nampaknya Banten sedang mendapatkan kutukan Sumber Daya, di satu sisi begitu mudah dan strategisnya Banten dari berbagai aspek namun disisi lain Banten tidak dapat beranjak dari masalah-masalah klasik dari rendahnya SDM, Ketertinggalan dalam tingkat Pendidikan, Kemiskinan dan Minimnya infrastruktur yang dapat membangkitkan ekonomi masyarakatnya. Buku ini terdiri dari banyaknya potongan *puzzle* beberapa masalah yang terdapat di Banten dan menawarkan berbagai solusi untuk memperbaiki beberapa masalah yang ada di Banten. Adapula beberapa kasus yang terjadi di daerah lain dan dapat menjadi refleksi bagi pemecahan permasalahan yang sama di provinsi Banten. Selamat membaca dan semoga bermanfaat, Amin.

Tim Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Analisis Kinerja Capaian Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2007-2012 <i>Oleh: Gandung Ismanto & Listyaningsih</i>	1
Dinamika Kerja Wartawan Perempuan (Studi Deskriptif Mengenai Wartawan Perempuan di Banten dalam Menjalankan Profesinya) <i>Oleh: Puspita Asri Praceka & Darwis Sagita</i>	25
Alternatif Model Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kota Serang: Sinergisitas Pemerintah, Masyarakat dan Akademisi Tahun 2009-2010 <i>Oleh: Yeni W., Agus S., Arenawati & Listyaningsih</i>	47

Perspektif Komunikasi dalam Konflik Agama di Banten (Studi Kasus pada Bentrok Warga dengan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik-Banten) <i>Oleh: Iman Mukhroman</i>	87
Dinamika Kelompok Informal Pemulung (Kasus di TPA Bantar Gebang Kota Bekasi) <i>Oleh: Agus Sjafari</i>	107
Strategi Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Serang Provinsi Banten <i>Oleh: Ipah Ema Jumiati</i>	125
Optimalisasi Potensi Pariwisata di Provinsi Banten <i>Oleh: Titi Stiawati</i>	155
Revitalisasi Peran Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama <i>Oleh : Hasuri, Ayuning Budiati, Titi Stiawati, Ipah Ema Jumiati, & Rahmawati</i>	181
Pemuda Dalam Tiga Persimpangan (Refleksi Dinamika KNPI di Provinsi Banten) <i>Oleh: Neka Fitriyah</i>	203

ANALISIS KINERJA CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNANPROVINSI BANTEN TAHUN 2007-2012

Oleh : Gandung Ismanto & Listyaningsih

Pendahuluan

Banten merupakan provinsi baru yang lahir di era reformasi. Sebagai daerah otonom setingkat Provinsi yang relatif belia, Banten mewarisi permasalahan yang sangat kompleks di hampir seluruh bidang pembangunan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Kompleksitas permasalahan inilah yang memunculkan stigma negatif tentang keterbelakangan dan ketertinggalan masyarakat Banten, khususnya di wilayah Banten bagian Selatan. Dan kondisi ini pulalah yang menjadi salah satu motivasi masyarakat Banten untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, agar dapat mengelola dan mengurus daerah dan masyarakatnya sendiri dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks tersebut.

Sejak berdiri sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Banten telah mencurahkan segenap sumberdaya dan upaya

guna mengentaskan sejumlah permasalahan tersebut. Dimulai dari Rencana Strategis Daerah (Renstrada) tahun 2001-2006 yang secara cukup efektif telah mampu meletakkan fundamen bagi pembangunan pada periode berikutnya. Hasil dari implementasi Renstrada 2001-2006 tersebut mewariskan legasi berupa beberapacapaian, antara lain: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Regional yang bertumbuh dari 4,11 % di akhir tahun 2002 menjadi 6,28% di akhir tahun 2006; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 66,2 pada tahun 2002 menjadi 68 pada akhir tahun 2006. Hasil evaluasi terhadap capaian-capaian ini kemudian diagendakan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2007-2012, yang masih menjadikan sejumlah isu strategis yang sama pada periode pertama sebagai agenda pembangunan dalam RPJMD tersebut, yaitu: agenda bidang pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, perekonomian dan industri, serta pengembangan kawasan dan wilayah.

Dan menjelang akhir periode implementasi RPJMD 2007-2012, evaluasi terhadap capaian indikator makro pembangunan di Provinsi Banten tentu sangat diperlukan guna melihat efektivitas implementasinya dalam menjawab sejumlah permasalahan mendasar tersebut. Dalam konteks siklus kebijakan publik, analisis atas pencapaian makro pembangunan ini pada dasarnya merupakan bagian dari fase evaluasi kebijakan yang bertujuan mengukur sejauhmana masukan yang telah diformulasi sebagai rencana (*policy formulation*), dilaksanakan dengan prosedur legal yang baik dan benar (*policy implementation*), serta mengukur sejauhmana implementasi tersebut menghasilkan luaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), dan manfaat (*benefits*) bagi masyarakat pada umumnya (*policy evaluation*). Dengan demikian, sebagai proses evaluasi maka diperlukan data

beserta metode analisis data yang relevan guna mendapatkan hasil evaluasi yang obyektif dan relevan.

Namun demikian disadari bahwa mengevaluasi capaian sebuah produk kebijakan jangka menengah tentu tidak mudah, karena luasnya ruang lingkup analisis yang sifatnya multidisiplin, di samping kompleksnya variabel-variabel yang mempengaruhinya. Karenanya, disadari pula bahwa sangat tidak mungkin untuk menyajikan hasil analisis yang mampu mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara komprehensif bagi kepentingan perencanaan pembangunan yang multi dimensi sifatnya. Oleh karena itulah indikator-indikator yang rasional, realistis, dan *measurable* dikembangkan guna mengukur sejumlah segi makro pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang kasat mata sifatnya (*tangible*). Dan dalam kerangka itu pulalah, analisis pencapaian makro pembangunan Provinsi Banten tahun 2007-2012 ini dilaksanakan guna melihat capaiannya secara deskriptif serta mengukur efektivitasnya berdasarkan target yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2007-2012 tersebut.

Metode

Sesuai dengan maksud dan tujuannya, analisis pencapaian makro pembangunan Provinsi Banten tahun 2007-2012 pada dasarnya merupakan riset evaluasi, yang paling tidak bertujuan untuk mengetahui pencapaian atau realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi (RPJMD), agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Karena hasil dari evaluasi adalah penilaian terhadap eksisting obyek yang diteliti, maka pengukuran (kuantifikasi) terhadap eksistingnya tersebut diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan (*gap*) antara kinerja aktual (*actual performances*) dengan kinerja yang diharapkan (*expected*

performances). Dengan diketahuinya perbedaan tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan efektivitas dan bahkan efisiensi dapat dirumuskan dan dilakukan. Dengan kata lain, pengukuran akan membantu dalam mengukur perbedaan antara *output-outcome* aktual dengan *output-outcome* ideal sebagaimana direncanakan dalam RPJMD.

Berdasarkan karakteristik dan tujuannya tersebut, maka penelitian ini merupakan bagian dari kelompok riset terapan (*applied research*) yang bertujuan evaluatif (*evaluation research*), dimana hasilnya dapat digunakan sebagai bahan umpan balik (*feedback*) bagi formulasi dan penyempurnaan kebijakan pada tahap selanjutnya.

Dan mengingat bahwa tujuan dari penelitian ini adalah mengukur secara deskriptif capaian-capaian atas indikator makro pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yang didalamnya digunakan statistik deskriptif sebagai teknik analisis guna mengetahui ukuran-ukuran tendensi sentral secara komparatif, serta frekuensi dan dispersi bila diperlukan.

Data dikumpulkan melalui metode *documentary study* yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang dirilis oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merupakan sumber rujukan utama dalam mengkompilasi dan menganalisis data sekunder dimaksud. Di samping itu, sumber-sumber sekunder resmi lain juga digunakan sebagai pelengkap dan/ atau pembanding, seperti laporan-laporan yang dirilis oleh lembaga-lembaga lain, seperti : Bappeda se-Provinsi Banten, Bappenas, Bank Indonesia, termasuk juga adalah dokumen-dokumen laporan resmi dari tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Analisis dan Pembahasan

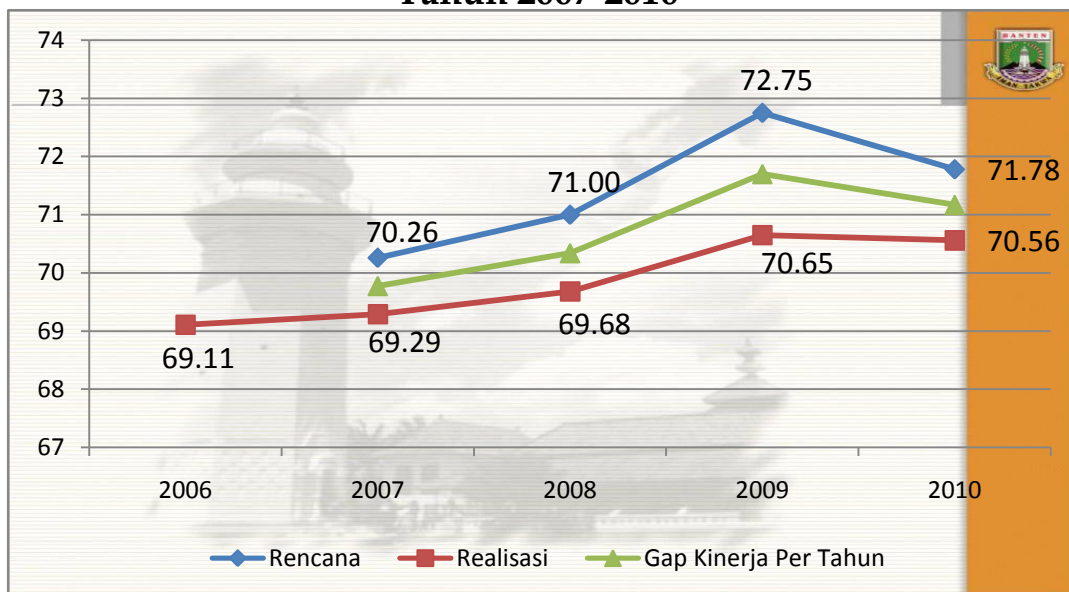
Analisis pencapaian makro pembangunan Provinsi Banten ini difokuskan pada 7 (tujuh) indikator makro sebagaimana tercantum dalam RPJMD hasil revisi terakhir pada tahun 2009 yaitu: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); (3) Indeks Pembangunan Daerah (IPD); (4) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (5) Indeks Keberdayaan Gender (IDG); (6) Jumlah dan Persentase Penduduk dan Rumah Tangga Miskin (RTM); dan (7) Jumlah dan Persentase Pengangguran Terbuka.

IPM pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia yang mencakup aspek jasmani maupun rohani, fisik maupun nonfisik. Karena itu, pengukurannya menggunakan indeks komposit berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu: angka harapan hidup (*life expectancy at age 0*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*).

Terdapat fakta bahwa IPM Provinsi Banten terus meningkat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan kendati peningkatan tersebut sebenarnya kurang terlalu mengembirakan. Hal ini terjadi karena kapasitas capaian kenaikan IPM setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Capaian tahun 2009 misalnya, yang merupakan selisih antara capaian tahun 2009 dan 2008, menunjukkan penurunan kapasitas capaian yang hanya sebesar 0,36 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2008 yang mencapai 0,41 serta capaian tahun 2010 yang mencapai 0,5. Kapasitas capaian terendah terjadi pada periode transisi dari Renstrada 2001-2006 ke RPJMD 2007-2012 yang hanya mencapai 0,18 poin. Sementara capaian tertinggi terjadi pada periode 2004-2005 yang mencapai 0,9 poin.

Berdasarkan data resmi yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Banten sejak tahun 2006 hingga tahun 2010, diperoleh fakta bahwa kinerja capaian pembangunan manusia belum memuaskan. Sebagai contoh, target kinerja yang dipatok pada angka 71,78 (2010) urung tercapai karena realisasi IPM pada tahun tersebut hanya mencapai 70,56. Artinya Kinerja pencapaian IPM pada tahun 2010 turun hingga mencapai negatif 7,96%. Secara umum, gambaran tentang perbandingan antara target kinerja pencapaian indeks pembangunan manusia dengan realisasi capaian kinerja serta gap kinerja sepanjang tahun 2007 hingga 2010 dimaksud, dapat disimpulkan dari grafik berikut ini.

Grafik Perbandingan Kinerja Rencana dan Realisasi Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2007-2010



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Di samping IPM, LPE merupakan indikator makro pembangunan yang menunjukkan perkembangan agregat pendapatan sepanjang satu tahun terhadap tahun sebelumnya. Secara teoritis LPE menggambarkan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya nilai dan

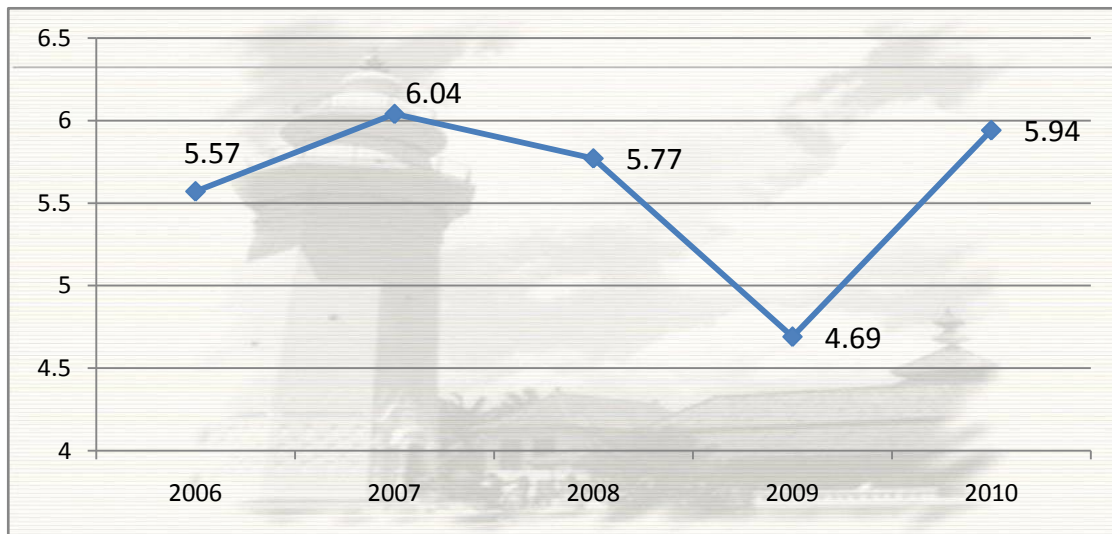
kuantitas barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat di suatu daerah, serta meningkatnya kemakmuran dan/ atau perekonomian masyarakat. Karenanya secara teknis pertumbuhan ekonomi didefinisikan secara sederhana sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) riil per kapita di suatu wilayah, yang dibandingkan dengan kenaikan GDP pada tahun sebelumnya.

Sebagai provinsi yang dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan utama di tingkat nasional, Banten merupakan salah satu daerah yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan tersebut. Sebaran berbagai macam industri skala besar di sepanjang pantai utara Banten, yang tersebar dari wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang hingga Kota Cilegon, merupakan klaster-klaster kawasan industri yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional. Dengan modal tersebut, menjadikan Provinsi Banten sebagai salah satu primadona investasi di Indonesia, khususnya di sektor industri manufaktur.

Sejak implementasi RPJMD tahun 2007-2012, capaian laju pertumbuhan ekonomi memang cukup menjanjikan, kendati relatif tidak cukup memuaskan. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2007 misalnya, berhasil menyentuh angka 6,04%, dan ini merupakan kali pertama laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten mencapai angka di atas 6% sejak berdiri sebagai provinsi pada tahun 2000. Capaian tahun 2007 yang baik ini sayangnya tidak berlanjut karena pada tahun 2008 mengalami penurunan hingga angka 5,77%. Tahun 2009 turun lagi hingga menyentuh angka 4,59%, dan naik kembali pada tahun 2010 hingga nyaris kembali mencapai angka 6%, yaitu sebesar 5,94%.

Gambaran mengenai capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sejak tahun 2007 hingga 2010 dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2007-2010



Sumber: diolah dari berbagai sumber

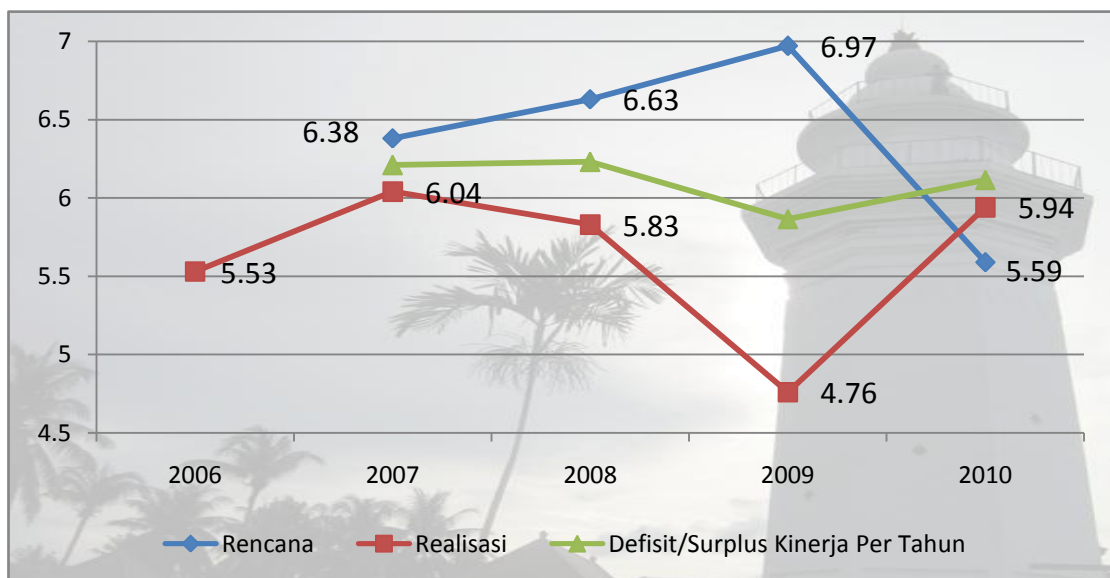
Capaian ini diakui memang bukan merupakan hasil kerja keras pemerintah semata, melainkan kontribusi dari para pelaku usaha di Provinsi Banten serta seluruh pemerintah kabupaten/kota beserta seluruh masyarakat daerah. Capaian di atas memang tampak sangat fluktuatif, hal ini dapat dipahami mengingat bahwa kontribusi PDRB Provinsi Banten disumbang sebagian besar oleh sektor industri pengolahan (*manufacturing industry*) mencapai lebih dari 40%, sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar lebih dari 20%, dan sektor transportasi dan komunikasi yang mencapai hampir 10% (BPS, 2010: 474). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi sangat rentan terpengaruh oleh fluktuasi PDRB yang sebagian besar dikontribusi oleh sektor-sektor yang juga sangat rentan oleh fluktuasi perekonomian nasional dan dunia.

Namun demikian, bila ditelaah secara cermat trend kemajuan LPE yang ada sebenarnya tidak terlalu menggembirakan. Hal ini terjadi karena kapasitas capaian kenaikan LPE setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Capaian tahun 2009 misalnya, yang merupakan selisih antara capaian tahun 2009 dan 2008, menunjukkan penurunan kapasitas

capaian yang hanya sebesar negatif 1,07 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2007 yang naik sebesar 0,51 digit serta capaian tahun 2010 yang naik sebesar 1,18 digit. Kapasitas capaian terendah terjadi pada tahun 2009 yang menyentuh angka negatif 1,07, tahun 2006 negatif 0,35, dan tahun 2008 yang menyentuh negatif 0,21.

Gambaran mengenai fluktuasi serta perbandingan kinerja capaian LPE Provinsi Banten sejak menjadi provinsi hingga tahun 2010 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik Perbandingan Kinerja Rencana dan Realisasi Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2007-2010



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Indeks Pembangunan Daerah (IPD) merupakan salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah secara terarah dan terpadu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, tingkat keberhasilan pembangunan daerah tersebut diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah (IPD) yang merupakan indeks agregat dari 3 (tiga) aspek pembangunan yang ditetapkan secara nasional yang meliputi (1) Keberdayaan

Pemerintah Daerah, (2) Perkembangan Wilayah, dan (3) Keberdayaan Masyarakat.

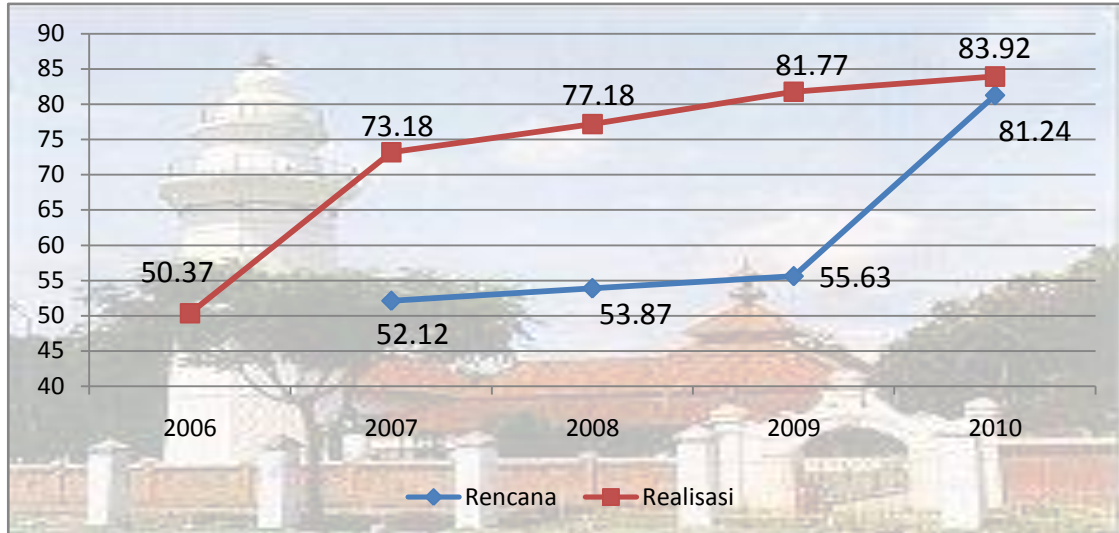
Berbeda dengan indikator makro pembangunan lainnya yang pada umumnya diproduksi oleh Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan daerah merupakan ukuran yang dikembangkan oleh Bappenas untuk digunakan dan diproduksi secara otonom oleh pemerintah daerah, yang merupakan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara terstruktur oleh satuan dan/ atau unit kerja yang berwenang berdasarkan kinerja yang diwujudkan oleh setiap satuan kerja pemerintah daerah.

Dilihat dari aspek indeks pembangunan daerah, Provinsi Banten termasuk dalam kategori sangat memuaskan capaian indeks pembangunan daerahnya, khususnya dalam kurun waktu sejak tahun 2007 hingga 2010. Progresifitas kenaikan indeks pembangunan daerah setiap tahunnya menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi serta prospek yang sangat menjanjikan, dimana realisasi capaiannya selalu melampaui target yang dicanangkan dalam RPJMD.

Indeks pembangunan daerah yang dalam RPJMD hanya dipatok pada angka 52,12; 53,87; 55,63; dan 81,24, realisasinya justru mencapai angka 73,18; 77,18; 81,77; dan 83,92 pada tahun 2007 hingga 2010. Kenaikan tahun 2007 bahkan termasuk cukup fantastis mengingat capaian pada tahun 2006 yang hanya 50,37 dan rata-rata hanya pada angka 50 dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya.

Gambaran tentang perbandingan rencana capaian dan realisasi capaian indeks pembangunan daerah Provinsi Banten sejak tahun 2006-2010 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik Perbandingan Kinerja Rencana Capaian dan Realisasi Capaian Indeks Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2006-2010



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

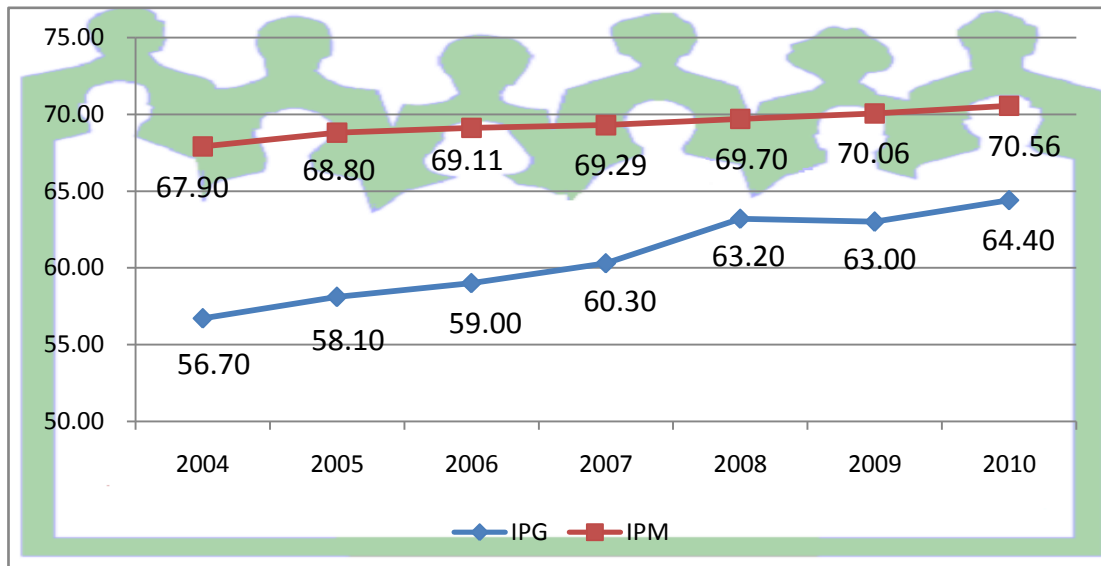
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan indikator komposit yang sama seperti IPM namun dipilah berdasarkan jenis kelamin sehingga dapat menggambarkan ketimpangan gender yang terjadi dalam pembangunan. Dengan demikian, indeks pembangunan gender dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara semakin kecil selisih antara IPG dan IPM menggambarkan semakin kecilnya kesenjangan gender yang terjadi di suatu daerah.

Sebagai daerah otonom yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, Banten mewarisi ketimpangan gender yang cukup besar. Hal ini terjadi di seluruh bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial budaya, politik, termasuk juga ekonomi. Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan perempuan di Banten menjadi faktor penyebab rendahnya derajat kesehatan kaum perempuan, yang secara empiris berkorelasi kuat dengan cukup tingginya angka kematian ibu

melahirkan, angka kematian bayi, serta tingkat kemiskinan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Berdasarkan kenyataan itu, kondisi pembangunan gender di Banten memang belum sebanding dengan provinsi-provinsi lainnya, apalagi provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Namun demikian, sejak berdiri sebagai provinsi pada tahun 2000, pembangunan yang terarah dan terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti. Hasilnya, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten terus meningkat dari tahun ke tahun, kendati belum cukup memuaskan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkannya dengan capaian kemajuan indeks pembangunan manusia, dimana kesenjangan gender terus menerus mengalami penurunan. Penurunan kesenjangan itu tampak dari kenaikan indeks pembangunan gender yang mencapai 7,7% Selama kurun waktu 2004-2010 pada satu sisi, dengan laju kenaikan indeks pembangunan manusia yang hanya mengalami kenaikan 2,66% dalam kurun waktu yang sama. Gambaran mengenai perbandingan capaian indeks pembangunan gender dan indeks pembangunan manusia dimaksud tampak pada grafik berikut ini.

Grafik Capaian Indeks Pembangunan Gender Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2004-2010

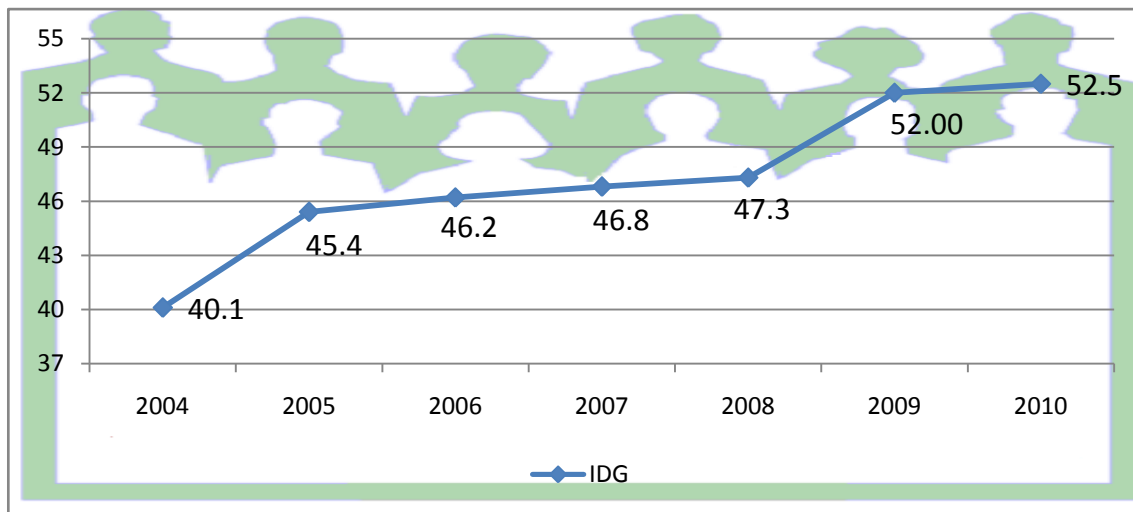


Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang bertujuan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam pembangunan, khususnya dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Seiring dengan kemajuan di bidang pembangunan gender, peningkatan yang cukup memuaskan juga dicapai dalam aspek pemberdayaan gender. Kiprah perempuan kini makin meluas seiring dengan kesempatan yang terbuka lebar di berbagai lini pembangunan. Lebih dari sekedar partisipasi, perempuan juga telah cukup eksis baik dalam lapangan ekonomi maupun politik. Gambaran mengenai kemajuan pemberdayaan gender sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik Capaian kemajuan Pemberdayaan Gender di Provinsi Banten Tahun 2004-2010



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Grafik di atas menggambarkan dengan jelas kemajuan yang optimistik dalam hal pemberdayaan gender. Lebih dari itu, trend positif yang terus meningkat juga menunjukkan korelasi yang kuat dengan kemajuan indeks pembangunan gender, menurunnya ketimpangan gender, serta indeks pembangunan manusia yang juga terus mengalami kemajuan.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, sejumlah upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga kini telah membuahkan sejumlah kemajuan. Jumlah orang miskin terus menurun dari tahun ke tahun, kendati fluktuatif dan pada sisi lain diiringi juga dengan makin meningkatnya problem kemiskinan tersebut. Di samping itu, meningkatnya migrasi dan urbanisasi juga menjadi persoalan tersendiri yang dialami Banten pasca menjadi provinsi, yang turut serta mempengaruhi kenaikan atau penurunan angka kemiskinan di wilayah Provinsi Banten. Gambaran mengenai fluktuasi jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten tergambarkan pada grafik berikut ini.

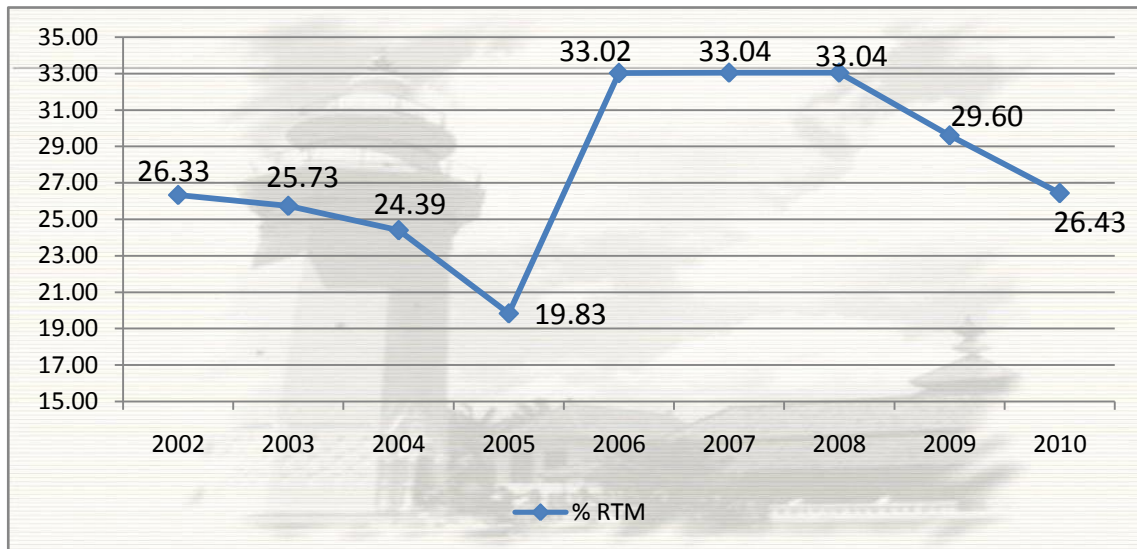
Grafik Fluktuasi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 (dalam Ribu Jiwa)



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Grafik di atas menggambarkan fluktuasi jumlah penduduk miskin yang sangat nyata, dan terjadi karena berbagai variabel yang kompleks. Fluktuasi juga terjadi dalam konteks jumlah rumah tangga miskin di Provinsi Banten. Grafik berikut ini menggambarkan fluktuasi jumlah rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada kurun waktu tahun 2002-2010.

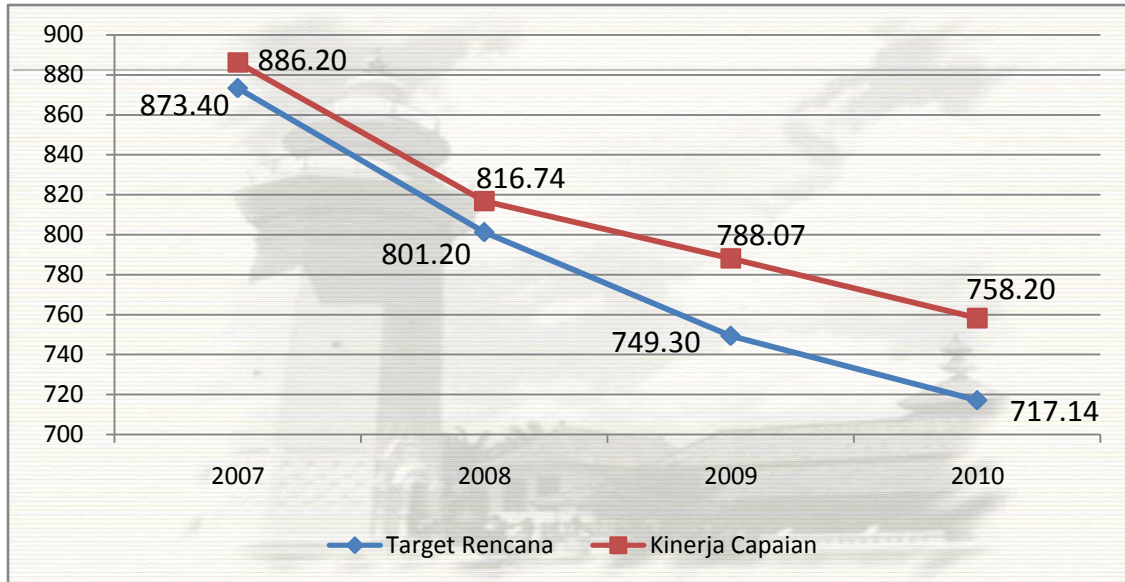
Grafik Fukuasi Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi Banten Tahun 2002-2010 (dalam %)



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Bila ditelaah secara khusus kinerja penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten, terdapat kenyataan kinerja pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dapat dikatakan tidak cukup memuaskan. Paling tidak atas kenyataan bahwa kinerja capaian penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya selalu tidak mencapai target rencana sebagaimana dituangkan dalam RPJMD tahun 2007-2012. Gambaran mengenai perbandingan antara target rencana dan kinerja capaian penurunan jumlah penduduk miskin dimaksud, dijelaskan dalam grafik berikut ini.

**Grafik Perbandingan Kinerja Rencana dan Realisasi Kinerja
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2007-
2010 (dalam Ribu Jiwa)**

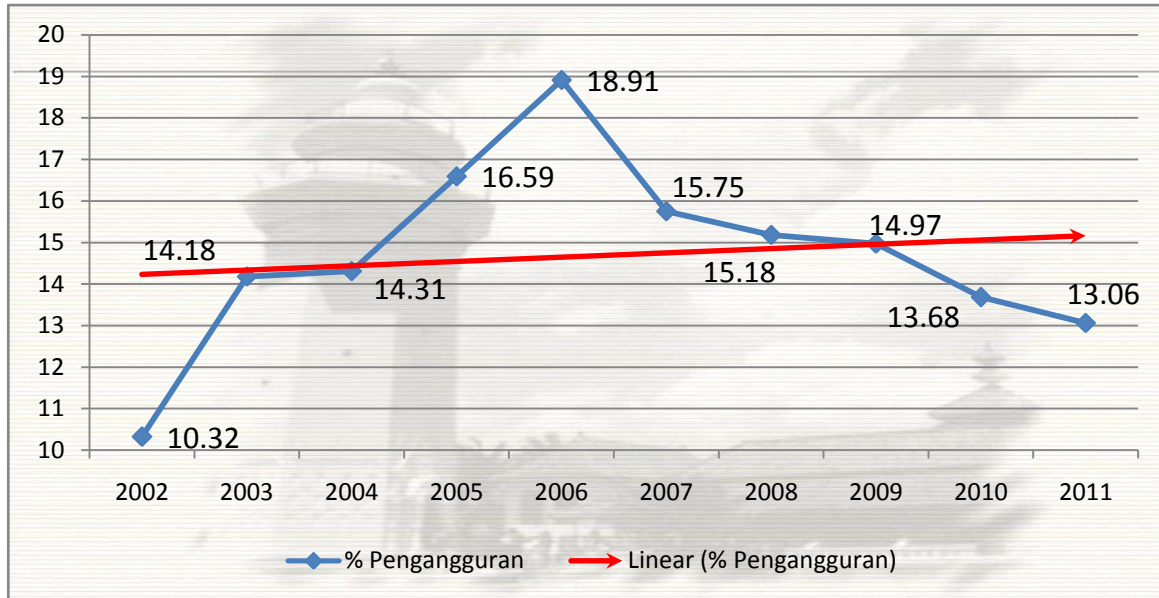


Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Perbandingan target capaian dan kinerja capaian sebagaimana tampak pada grafik di atas bila dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan di atas, maka akan didapat informasi perbedaan kinerja eradikasi kemiskinan setiap tahunnya. Kinerja terbaik tercapai pada tahun 2007 dan 2008, yang berhasil mencapai masing-masing 86,28% dan 81,72% dari rencana yang ditargetkan dalam RPJMD. Sementara kinerja terburuk terjadi pada tahun 2009 dan 2010 dimana kinerja capaiannya hanya mencapai masing-masing 42,52% dan 42,11%.

Senyampang dengan tingkat kemiskinan, angka pengangguran di Banten cenderung tinggi dan fluktuatif sifatnya mengingat tingginya migrasi dan urbanisasi pada satu sisi, serta lemahnya daya saing tenaga kerja lokal guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Gambaran mengenai fluktuasi jumlah pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik Persentase Pengangguran Terbuka Terhadap Total Angkatan Kerja di Provinsi Banten Tahun 2002-2010
(dalam %)



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Penutup

Secara obyektif harus diakui dan diapresiasi bahwa terdapat sejumlah kemajuan yang telah dicapai selama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007-2012. Kemajuan itu tampak dari peningkatan dan/ atau penurunan sejumlah indikator makro dari tahun ke tahun. Kemajuan tersebut merupakan resultante dari seluruh upaya yang telah dikontribusikan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, perorangan maupun kelompok-kelompok masyarakat di Provinsi Banten. Demikian pula pada sisi yang berbeda, sejumlah kelemahan dan kekurangan tentu bukan hanya menjadi domain pemerintah, mengingat bahwa keberhasilan pembangunan tentu tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah beserta segenap sumberdaya yang dimilikinya, namun jauh lebih penting adalah dipengaruhi pula oleh sejauhmana kualitas dan intensitas partisipasi masyarakatnya.

Selanjutnya, berdasarkan deskripsi atas realisasi kinerja indikator pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada bab empat, berikut ini merupakan kesimpulan umum yang dapat dikonstruksi secara deduktif dari data dan penjelasan tersebut, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan data yang ada, Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan yang cukup memuaskan, dari 66,60 pada tahun 2002 menjadi 70,56 pada tahun 2010. Namun demikian, secara umum harus pula diakui adanya fluktuasi dalam hal kapasitas capaian kenaikan IPM setiap tahunnya, serta realisasi capaian yang belum optimal dalam memenuhi target yang dicanangkan setiap tahunnya. Hal ini tentu harus menjadi catatan dan perhatian bagi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Berbeda dengan IPM yang capaiannya terus mengalami peningkatan, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami fluktuasi setiap tahunnya, kendati capaiannya dapat dipertahankan pada angka rata-rata 5,62% sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2010. Hal ini tentu amat dipengaruhi oleh struktur perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor industri manufaktur yang relatif mudah terpengaruh oleh gejolak perekonomian dunia dan nasional.

3. Indeks Pembangunan Daerah (IPD)

Indeks Pembangunan Daerah (IPD) merupakan indikator yang capaiannya sangat memuaskan, dimana kinerja capaiannya selalu melampaui target kinerja yang direncanakan. Indeks pembangunan daerah tercatat meningkat signifikan dari 50,37% pada tahun 2006 menjadi 83,92% pada tahun 2010. Rata-rata kenaikan indeks pembangunan daerah bahkan jauh melampaui targetnya

yang hanya sebesar 60,72% dalam kurun waktu 2007-2010, kini mencapai rata-rata sebesar 79%.

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kemajuan juga dapat disimpulkan dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang terus bergerak naik dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2004 hanya mencapai 56,7% menjadi 64,4% pada tahun 2010 atau naik sebesar 7,70 poin dalam kurun waktu tersebut. Di samping itu terdapat pula trend kenaikan yang linier dari tahun ke tahun yang menggambarkan pula penurunan kesenjangan gender yang optimistik selama kurun waktu 2004-2010 tersebut.

5. Indeks Keberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 40,1% pada tahun 2004 menjadi 57,5% pada tahun 2010. Peningkatan indeks pembangunan dan pemberdayaan gender ini tentu menjadi sinyal positif makin berkurangnya kesenjangan gender dalam pemerintahan dan pembangunan daerah, yang juga menggambarkan makin tingginya tingkat kesetaraan gender di Provinsi Banten.

6. Jumlah dan Persentase Penduduk dan Rumah Tangga Miskin (RTM)

Kendati kemiskinan merupakan masalah kompleks di Banten, namun tidak berarti tidak dapat diatasi. Sejumlah upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga kini telah membuahkan sejumlah kemajuan. Jumlah orang miskin terus menurun dari tahun ke tahun, kendati masih fluktuatif sebagai akibat dari cukup tingginya arus migrasi dan urbanisasi di sejumlah wilayah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, serta karakteristik kemiskinan yang cukup rentan terpapar oleh kondisi perekonomian nasional maupun global. Namun demikian secara umum penurunan persentase penduduk miskin secara cukup signifikan dapat dicapai, dari sebesar

9,22% dari total penduduk pada tahun 2002 tersisa menjadi 7,16% pada tahun 2010.

Berbeda dengan trend penurunan persentase penduduk miskin, jumlah dan persentase rumah tangga miskin di Banten cenderung mengalami kenaikan, dari sebanyak 571.308 keluarga pada tahun 2002 menjadi 629.318 keluarga pada tahun 2009. Demikian pula persentase rumah tangga miskin yang mengalami kenaikan, dari sebesar 26,33% pada tahun 2002 menjadi 26,43% pada tahun 2010.

7. Jumlah dan Persentase Pengangguran Terbuka

Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada indikator jumlah dan persentase pengangguran terbuka, yang hingga kini terus mengalami peningkatan, dari sekitar 358.028 jiwa pada tahun 2002 menjadi 726.377 pada tahun 2010. Demikian pula pada persentase pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja yang juga mengalami kenaikan cukup signifikan, dari sebesar 10,32% pada tahun 2002 menjadi 13,68% pada tahun 2010.

Masih cukup tingginya angka pengangguran terbuka tersebut dapat dipahami mengingat eksistensi provinsi Banten yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang menjadi primadona para pencari kerja dari seluruh pelosok Indonesia. Akibatnya, angka pengangguran di Banten cenderung tinggi dan fluktuatif sifatnya mengingat tingginya migrasi dan urbanisasi pada satu sisi, serta lemahnya daya saing tenaga kerja lokal guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di sektor industri tersebut.

Penelitian ini memang tidak mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya capaian kinerja pembangunan makro sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga rekomendasi yang disajikan tentu tidak mungkin menyentuh pada akar persoalan yang mungkin menjadi sebab dari tinggi rendahnya kinerja tersebut. Namun demikian, apa yang telah digambarkan pada bab sebelumnya serta

kesimpulan di atas, harus diakui adanya permasalahan dalam hal efektivitas capaian indikator-indikator makro pembangunan daerah. Terkait dengan hal ini, sangat tampak nyata dari capaian indeks pembangunan daerah dengan indikator-indikator makro lainnya, dimana di satu sisi indeks pembangunan daerah meningkat signifikan, namun di sisi berbeda indikator makro pembangunan lainnya justru mengalami kinerja yang tidak cukup memuaskan, kendati sebagian mengalami kenaikan. Kemiskinan dan pengangguran bahkan mengalami peningkatan cukup tinggi kendati di sisi yang lain indeks pembangunan daerah meningkat. Kinerja capaian indikator makro yang sebagian besar tidak mencapai target rencana setiap tahunnya juga menggambarkan problem efektivitas tersebut.

Karenanya, guna mengetahui secara presisi faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi efektivitas dan nilai guna dari kinerja capaian pembangunan tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut guna menemukannya. Persoalan Efisiensi juga tampaknya patut diteliti guna membandingkan seberapa besar masukan yang telah digunakan untuk menghasilkan luaran yang secara agregat menjadi komposit dari seluruh indikator makro pembangunan dimaksud. Dengan demikian dapat diketahui tingkat efisiensinya sebagai bagian utuh dari evaluasi terhadap kinerja capaian indikator makro pembangunan daerah dimaksud.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2004. *Banten Dalam Angka*. Serang: BPS Provinsi Banten
- . 2005. *Banten Dalam Angka*. Serang: BPS Provinsi Banten
- . 2006. *Banten Dalam Angka*. Serang: BPS Provinsi Banten
- . 2007. *Banten Dalam Angka*. Serang: BPS Provinsi Banten
- . 2008. *Banten Dalam Angka*. Serang: BPS Provinsi Banten
- . 2009. *Banten Dalam Angka*. Serang: BPS Provinsi Banten
- . 2010. *Banten Dalam Angka*. Serang: BPS Provinsi Banten
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan public*. Bandung : Alfabeta
- Pemerintah Provinsi Banten. 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012*. Serang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan aplikasi ProsesKebijakan Publik*. Malang : Banyumedia.

DINAMIKA KERJA WARTAWAN PEREMPUAN
(Studi Deskriptif mengenai Wartawan Perempuan di
Banten dalam Menjalankan Profesinya)
Oleh : Puspita Asri Praceka & Darwis Sagita

Pendahuluan

Wartawan bertugas untuk mengabarkan sebuah peristiwa atau kejadian untuk disampaikan kepada khalayak melalui media massa. Tugas wartawan tidak mengenal waktu kerja layaknya pekerja di profesi lain, ia harus siap terjun ke lapangan di segala waktu karena terjadinya sebuah peristiwa yang tidak bisa dibatasi waktu. Waktu kerja dan ketahanan fisik dalam peliputan membuat profesi wartawan lebih identik dengan laki-laki daripada perempuan. Perempuan seringkali dianggap dengan *stereotype* lemah, gambaran ini muncul tidak hanya dari masyarakat atau kaum pria, tetapi juga dari para perempuan yang tidak yakin dengan kemampuannya. Wartawan perempuan dianggap kaum dengan mobilitas rendah, tidak tahan terhadap deadline yang tinggi, serta sulitnya meninggalkan rumah terutama jika sudah menikah dan memiliki anak. Kinerja wartawan ini penting dimiliki,

karena wartawan adalah koki dalam perusahaan pers. Ia bertugas mengelola fakta, opini, atau peristiwa yang terjadi agar dapat diketahui dan dinikmati masyarakat luas. Dalam posisinya sebagai penyebar informasi, wartawan harus bertindak profesional karena ia membawa suara masyarakat dan memegang hak masyarakat untuk tahu (*people right to know*).

Sebuah pekerjaan dapat dinyatakan sebagai profesi jika memiliki empat hal, yaitu (1) harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan tersebut; (2) harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu; (3) harus ada keahlian (*expertise*); (4) harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan. (Assegaf, 1987). Kode etik yang kini dipakai oleh wartawan Indonesia adalah KEWI yang disepakati pada tahun 2005.

Tuntutan bekerja secara profesional juga ditekankan kepada wartawan perempuan, namun pada kenyataan di lapangan masih ada perilaku bias gender pada wartawan perempuan. Tahun 2009 AJI melakukan penelitian yang hasilnya beberapa wartawan perempuan kerap mengalami pelecehan seksual dari narasumber, entah itu berupa tindakan meraba atau rayuan, bahkan ada juga yang mendapat ajakan kencan. Penelitian ini juga mengungkap kenyataan bahwa perekrutan terhadap jurnalis perempuan oleh media semata sebagai siasat untuk mendekati narasumber laki-laki. Disamping harus memiliki persyaratan fisik menarik- baik wajah maupun tubuh- sesuai standar industri (terutama di industri televisi) <http://tere616-blissfull.blogspot.com/2010/08/perempuan-oh-nasibmu.html>.

Bias gender juga sering ditemukan pada pemberitaan di media massa tentang perempuan, dimana perempuan hanya dijadikan sebagai objek terutama jika ada berita soal pemerkosaan. Terkait dengan wartawan perempuan, AJI pada 2011 merekomendasikan kepada perusahaan agar memberikan

hak-hak kesehatan reproduksi seperti cuti haid, cuti melahirkan serta menyusui di samping menyediakan ruangan bagi jurnalis yang menyusui. Perempuan yang melakukan peliputan malam hari, diberikan fasilitas antar jemput. AJI menilai hal ini belum diberikan oleh perusahaan, padahal perempuan secara kodrati diberikan anugrah untuk mengandung dan menyusui anak, hal ini tidak bisa digantikan oleh peran laki-laki.

Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melihat bagaimana dinamika kerja wartawan perempuan terkait dengan profesionalisme mereka. Berfikir mengenai dirinya sendiri adalah aktivitas manusia yang tidak terhindarkan. Identitas diri seseorang terdiri dari sekumpulan keyakinan dan sikap terhadap diri yang terorganisasi. Identitas sosial seorang wartawan akan terkait dengan perilaku wartawan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus kepada dinamika kerja wartawan terkait profesionalismenya.

Teori Tindakan Sosial

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif. Dalam paradigma kualitatif teori digunakan sebagai *guidance* atau peta penunjuk arah penelitian. *Guidance* ini akan digunakan pada saat penelitian dan pembahasannya. Adapun teori yang menjadi *guidance* dalam penelitian ini adalah Teori Tindakan Sosial. Dalam Teori Tindakan Sosial ini Weber menyatakan bahwa manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukannya. Hal ini ditujukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau kehendaki. Setelah memilih sasaran, manusia memperhitungkan keadaan lalu memilih tindakan.

Menurut Weber, manusia bisa membandingkan struktur beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan mengapa mereka bertindak, kejadian historis yang mempengaruhi karakter mereka dan memahami tindakan para pelakunya yang hidup di masa kini. Namun hal ini tidak

mungkin mengeneralisasi semua masyarakat atau semua struktur sosial. Weber memusatkan perhatiannya pada tindakan yang jelas-jelas melibatkan campur tangan proses pemikiran (dan tindakan bermakna yang ditimbulkan olehnya) antara terjadinya stimulus (pemacu, penggerak) dengan respon (reaksi). Baginya tugas analisis sosiologi terdiri dari “penafsiran tindakan menurut makna subjektifnya” (Weber, 1968: 8).

Dalam Teori Tindakan Sosial Weber memfokuskan perhatian pada individu, pola dan reuglaritas tindakan, bukan pada kolektivitas. Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan makna *tindakan*, dan mengklasifikasinya menjadi empat tipe tindakan dasar, yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya:

Tipe pertama adalah Tindakan Rasionalitas Sarana-Tujuan yang berorientasi kepada tujuan atau penggunaan. Tindakan “yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain; harapan-harapan ini digunakan sebagai ‘syarat’ atau ‘sarana’ untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional” (Weber, 1921/1968: 24).

Sebagai contoh pemikiran yang menyatakan bahwa tindakan pencarian berita seperti ini paling efisien untuk mencapai tujuan penulisan berita, dan inilah cara yang terbaik untuk mencapainya.

Tipe kedua adalah Tindakan Rasionalitas Nilai. Tindakan ini merupakan tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya” (Weber, 1921/1968;24-25). Contoh perilaku ini adalah pemikiran yang menyatakan bahwa seorang wartawan hanya tahu satu satu cara melakukan pencarian berita.

Tipe ketiga adalah Tindakan Afektif. Tindakan ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor. Misalnya “Apa boleh

buat, maka saya lakukan". Sedangkan tipe keempat adalah Tindakan Tradisional dimana merupakan tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang sudah terbiasa dan lazim dilakukan. Misalnya wartawan melakukan sebuah tindakan karena ia selalu melakukannya.

Tindakan Tradisional biasa kita lihat karena kebiasaan hidup masyarakat, misalnya upacara adat pernikahan, perayaan maulid nabi dan lain-lain yang memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan jika tindakan afektif seolah-olah pelaku terpaksa melakukan sebuah kegiatan. Hal ini akibat tidak adanya pilihan lain yang harus dilakukan atau adanya unsur tekanan dari pihak tertentu sehingga muncul keterpaksaan. Sedangkan tipe rasionalitas nilai dan rasionalitas sarana-tujuan lebih menekankan kepada orientasi yang ada didalam masyarakat, mulai dari nilai hingga tujuan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. <http://filsafat.kompasiana.com/2010/07/19/sedikit-tentang-max-weber/>

Bagi Weber (dalam Mulyana, 2004:61), jelas bahwa tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berpikir, dan kesengajaan. Tindakan sosial baginya adalah tindakan yang disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri, yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya. Bagi Weber, masyarakat adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berpikir dan melakukan tindakan-tindakan sosial yang bermakna.

Wartawan Profesional

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Ia bebas memilih organisasi wartawan bagi dirinya. Bersamaan dengan itu, Wartawan juga bebas memilih untuk tidak menjadi anggota organisasi

wartawan. Untuk menjamin pelaksanaan profesinya sebagai wartawan tetap menjunjung tinggi moral, etika dan hukum. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik, yaitu berupa himpunan etika profesi kewartawanan yang disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Hanya profesi wartawanlah yang kode etiknya secara tegas dimasukkan ke dalam undang-undang (UU Pers). Itu artinya, memahami UU Pers tidak bisa dipisahkan dari kode etik wartawan. Kode etik menjadi satu kesatuan dengan UU Pers. Selain itu, kerja profesi jurnalistik diamanahkan secara tegas oleh UU Pers, dengan sebutan PERS Nasional. Artinya, asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan Pers Nasional yang diperankan oleh wartawan ditegaskan dalam UU Pers.

Konsep Perilaku Wartawan

Bandura (dalam Rahmat, 205:240), kita belajar bukan saja dari pengalaman langsung, tetapi dari peniruan dan peneladanan. Bandura mendefinisikan perilaku sebagai hasil faktor-faktor kognitif dan lingkungan. artinya kita mampu memiliki keterampilan tertentu, jika ada jalinan positif antara stimuli yang kita amati dengan karakteristik diri kita.

Perilaku akan terbentuk jika seseorang mempunyai sikap terhadap objek. Sikap dapat terbentuk karena adanya reaksi akibat perilaku tersebut, juga karena adanya pengetahuan terhadap manfaat objek tersebut. Sumber pengetahuan bermacam-macam, misalnya sekolah, kursus, pelatihan dan lain-lain, yang merupakan hasil interaksi sosial diantara manusia. Sebagaimana diketahui bahwa sikap bukan merupakan hasil keturunan, tetapi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

Perilaku biasanya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan kadang-kadang bersumber kepada sistem budaya yang ada di masyarakat. perilaku seseorang juga ditentukan oleh faktor sosial ekonominya karena apa yang didengar dan

dilakukan seseorang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan orang-orang di lingkungannya. Dengan demikian, faktor sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan seseorang sangat menentukan orang tersebut dalam perilaku.

Perilaku secara sederhana dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan individu. Salah satu yang mendasari suatu perilaku, menurut Newcomb, Turner dan Carter adalah sikap. Sikap-sikap membantu menetapkan tingkah laku dalam situasi. Sikap merupakan keadaan -keadaan yang mengantarai, sedangkan keadaan sendiri ditentukan oleh keseluruhan situasi masa lampau yang pernah dijalani individu (Newcomb, 1985:112). Meskipun sikap sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku individu namun masih ada faktor lain yaitu peran situasi lingkungan.

Komponen perilaku terdiri dari motivasi, cara berfikir dan bertindak serta cara berinteraksi. Teori Motivasi dari Abraham Maslow menunjukkan bahwa kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan dasar telah dipenuhi maka manusia cenderung akan beranjak ke tingkatan kebutuhan di atasnya. Maslow mengemukakan Teori Motivasi "Hirarkhi Kebutuhan"

Bagaimana dinamika wartawan perempuan dalam menjalankan profesinya? Penelitian ini akan membahas dengan melihat motivasi apa yang dimiliki wartawan perempuan dalam menjalankan profesinya, pandangan wartawan perempuan terhadap konsep wartawan profesional dan perilaku wartawan perempuan dalam menjalankan profesinya

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif, Sebuah penelitian memerlukan sebuah metode yang dapat menuntun secara sistematis ke arah penelitian itu sendiri. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan kebenaran atau

kejelasan dari objek yang diteliti. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji sebuah hipotesis maupun teori tertentu, namun merupakan sebuah upaya untuk menampilkan dinamika wartawan perempuan dalam profesinya.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah wartawan perempuan yang bekerja di Provinsi Banten. Wartawan yang dipilih diutamakan lulusan baru atau bahkan belum menyelesaikan studinya agar dapat membandingkan konsep perilaku wartawan profesional di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

Pembahasan

Motivasi Wartawan Perempuan Dalam Menjalankan Profesinya

Motivasi menjadi wartawan dari ketiga informan yang ditemui dalam penelitian ini relatif sama, yaitu mengaplikasikan ilmu yang didapat di kampus. Informan 1 menyatakan bahwa menjadi wartawan adalah idamannya sejak dulu walaupun kini ia masih berstatus mahasiswa di Jurusan Ilmu Komunikasi. Latar belakang sebagai mahasiswa konsentrasi Jurnalistik membuat Informan 1 tidak mengalami kesulitan dalam bekerja. Walaupun penghasilan yang didapat jika dibandingkan dengan pegawai di televisi nasional jauh lebih kecil, namun dengan statusnya sebagai seorang lajang dan dibiayai orang tua sehingga ia merasa tidak memiliki beban dalam bekerja. Selain itu Informan 1 juga memiliki motivasi untuk mengembangkan daerahnya, ia melihat potensi daerah tempat tinggalnya begitu besar namun tidak dapat berkembang. Dengan menjadi jurnalis, Informan 1 berharap dapat memperbaiki hal tersebut.

Informan kedua pun tidak jauh berbeda. Informan 2 menjadi wartawan sejak duduk di bangku semester tiga. Latar belakangnya yang senang menulis cerita fiksi sejak SMA membuat dunia kewartawanan menjadi sesuatu yang

menyenangkan untuknya. Apalagi ia ditempatkan dalam rubrik dengan segmentasi remaja.

Informan ketiga yang ditemui menyatakan bahwa menjadi seorang jurnalis merupakan hal yang sudah ia perkirakan sebelumnya. Informan 3 merupakan mahasiswa konsentrasi jurnalistik, ia menjadi jurnalis di tempat ia melakukan *job training*. Menjadi seorang jurnalis adalah ajang ia mengaplikasikan ilmu yang selama ini ia dapat di bangku kuliah. Informan 3 menganggap gaji yang ia dapat saat ini sangat tidak mencukupi, namun motivasi bekerjanya sangat besar karena ia harus menghidupi seorang anak berumur 2,5 tahun.

Menurut hasil penelitian, motivasi wartawan perempuan dalam menjalankan profesinya antara lain keinginan mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kampus, meneruskan hobi menulis, berkontribusi untuk pembangunan serta ekonomi. Dari semua faktor yang muncul, faktor keinginan mengaplikasikan ilmulah yang dinilai paling berpengaruh.

Bagi mereka sebagai wartawan perempuan terkait motivasi jawaban yang diberikan cenderung bervariasi, namun bukan jawaban khusus terkait diri mereka sebagai wartawan perempuan. Motivasi tersebut adalah keinginan untuk membangun daerah domisilinya, dikarenakan bekerja sebagai wartawan seperti informan 1. Atau didasari hobi untuk menulis, yang dikuatkan dari latar belakang keilmuan yang diperoleh dari perkuliahan. Bagi mereka menjadi wartawan perempuan adalah sebuah pekerjaan yang sangat bernilai. Dimana dalam menjalankannya mereka menghadapi hambatan, gangguan atau bahkan pelecehan.

Hal ini senada dengan Teori Motivasi dari Maslow yang dikemukakan oleh Goble (1987, 77-92), yaitu poin keenam:kebutuhan/hasrat untuk tahu dan memahami; kebutuhan ini ditandai dengan dorongan untuk berburu

pengetahuan walaupun menantang bahaya besar, tertarik pada hal-hal yang penuh rahasia, yang tak kenal, dan tak dapat dijelaskan, menyibukkan diri dalam suatu kegiatan yang mereka anggap bernilai. Ternyata dari belajar dan menemukan sesuatu itu menimbulkan rasa puas dan bahagia.

Sedangkan motivasi ekonomi yang muncul pada satu informan, tidak dianggap dominan karena informan tersebut memiliki latar belakang kehidupan berbeda dengan dua informan lainnya. Pada informan ketiga, kebutuhan fisiologis yaitu untuk membiayai anaknya menjadi dasar utama mengapa ia tetap bertahan menjadi wartawan.

Dalam Teori Tindakan Sosial Weber menyatakan bahwa manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukannya. Menjadi seorang wartawan sudah diputuskan oleh ketiganya. Hal ini ditujukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau kehendaki. Tujuan akan sangat terkait dengan motivasi. Motivasi ketiganya akan mempengaruhi alasan-alasan mengapa mereka bertindak, kejadian historis yang mempengaruhi karakter mereka dan memahami tindakan para pelakunya yang hidup di masa kini

Pandangan Wartawan Perempuan terhadap Konsep Wartawan Profesional

Wartawan profesional adalah wartawan yang mengerjakan pekerjaannya sesuai kode etik yang berlaku. Setidaknya itulah jawaban senada yang didapatkan dari tiga informan yang diwawancarai.

Sebagai wartawan yang bekerja di media lokal yang belum besar, informan pertama menyadari bahwa konsep wartawan profesional sulit dijalankan. Salahsatu pasal dalam kode etik wartawan menyatakan bahwa wartawan dilarang menerima imbalan apapun dari narasumber. Namun dengan gaji yang kecil dan belum membawa mereka pada kesejahteraan maka istilah wartawan amplop masih ditemui.

Bahkan Beberapa wartawan justru berharap untuk mendapatkan peluang mendapatkan amplop tersebut.

Wartawan perempuan menurut Informan 1 dengan keterbatasannya tetap harus professional. Harus tetap membela kepentingan masyarakat dan sensitive terhadap permasalahan di masyarakat. Walaupun ia mengakui kondisi di lapangan belum seideal yang diharapkan. Informan 1 satu-satunya wartawan perempuan bersama tiga rekan wartawan lainnya yang merupakan laki-laki. Bagi Informan 1 menjadi satu-satunya wartawan perempuan bukanlah suatu hambatan yang berarti. Sebaliknya, dia merasa lebih mudah dalam mendapatkan informasi dari narasumber. Dengan alasan, wartawan perempuan, lebih mudah berinteraksi dengan narasumber dibandingkan wartawan laki-laki. Namun dikarenakan laki-laki lebih punya stamina yang lebih dibandingkan perempuan, maka wartawan laki-laki lebih diandalkan dibandingkan perempuan di tempat dia bekerja.

Wartawan profesional menurut Informan 2 adalah wartawan yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Aturan yang diterapkan mengenai penerimaan amplop sudah cukup ketat. Namun senada dengan Informan 1, kesejahteraan wartawan lokal yang kurang diperhatikan menjadi hal utama terjadinya tindakan pelanggaran. Informan 2 menceritakan bahwa sudah menjadi rahasia umum wartawan daerah belum mendapatkan gaji yang sesuai dengan jerih payahnya. Informan 2 menambahkan, ketika bertemu dengan wartawan dari Jakarta dia sempat mendapat informasi bahwa wartawan dari daerah pada umumnya lebih mudah untuk “kong kalikong” dengan pihak yang punya kepentingan tertentu.

Informan 2 berpendapat menjadi wartawan perempuan memang ada perbedaannya dengan wartawan laki-laki. Wartawan perempuan biasanya akan terbentur dengan kondisi biologis, seperti cuti melahirkan atau kondisi fisik yang tidak sekuat wartawan laki-laki. Namun disisi lain, menjadi

wartawan perempuan juga dirasakan memiliki kelebihan. Kelebihan tersebut dirasakan ketika mencari berita atau ketika mewawancarai narasumber laki-laki. Ketika narasumbernya laki-laki, wartawan perempuan lebih mudah dekat dan diterima.

Informan 3 juga memiliki pandangan serupa dengan dua informan sebelumnya mengenai tugas wartawan. Ia juga mengakui bahwa gaji yang diberikan kantornya bekerja tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu ia memilih mencari tambahan dengan mencari iklan dan menerima honor penulisan (yang ia istilahkan gaji) dari pemerintah Kota Cilegon. Besarnya dana yang ia dapatkan ini, jauh lebih besar dibandingkan gajinya per bulan. Ia menyadari bahwa ini bukan tindakan yang profesional, karena dari ilmu yang selama ini ia dapatkan di kampus wartawan tidak bertugas mencari iklan. Kondisi ini juga membuat dirinya bingung saat menulis berita karena tidak boleh menyinggung klien.

Sebagai seorang perempuan, Informan 3 merasa dirinya memiliki keterbatasan. Oleh karena itu ia meminta keistimewaan dari kantor tempat ia bekerja untuk hanya masuk pada Senin, Rabu dan Jum'at. Sisa hari lainnya ia akan mengirimkan berita melalui *email*. Informan 3 juga mengakui sebagai wartawan perempuan ia lebih mudah mendekati narasumber. Namun tidak jarang juga mendapatkan perlakuan ia ia anggap negatif seperti diajak makan berdua atau dibelikan berbagai macam barang.

Menurut hasil penelitian, pandangan mengenai wartawan profesional dimata wartawan perempuan adalah yang mengerjakan tugasnya dengan baik dan sesuai kode etik. Namun saat berbenturan dengan jenis kelamin mereka sebagai perempuan, ketiga wartawan ini sepakat bahwa sebagai perempuan mereka lebih mudah mendekati narasumber. Namun tidak jarang mereka juga mendapatkan perlakuan negatif. Meskipun harus profesional, ketiganya sepakat bahwa

keterbatasan fisik sebagai perempuan membuat mereka harus diberi keistimewaan, diantaranya pulang lebih awal atau jam kantor yang berbeda.

Sebuah pekerjaan dapat dinyatakan sebagai profesi jika memiliki empat hal, yaitu (1) harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan tersebut; (2) harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu; (3) harus ada keahlian (*expertise*); (4) harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan. (Assegaf,1987). Wartawan adalah sebuah pekerjaan yang menuntut profesionalisme yang tinggi terkait kemudahannya dalam mempengaruhi orang banyak. Ketiga informan sama-sama memiliki panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan sebagai wartawan. Mereka juga memiliki keahlian yang didapat selama bangku kuliah. Hal ini membuat pandangan mereka terhadap konsep wartawan profesional cenderung sama.

Menurut kode etik, UU Pers dan UU Penyiaran, wartawan yang profesional diharapkan independen, memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani. Menyajikan berita yang akurat, menghormati hak narasumber tidak menjiplak, tidak menerima suap, berimbang, tidak membuat berita bohong, tidak menyalahgunakan profesi, memiliki tanggungjawab pada masyarakat serta fokus pada tugasnya yaitu pencarian berita.

Perilaku Wartawan Perempuan Dalam Menjalankan Profesinya

Sebagai seorang wartawan, baik di media elektronik ataupun cetak, memiliki tugas mencari meliput, mengolah dan menyebarkan sebuah pesan kepada masyarakat melalui media massa. Hal ini disadari betul oleh ketiga informan yang ditemui dalam penelitian ini. Informan 3 yang bekerja di Banten Pos (saat laporan ini dibuat, ia sudah memutuskan untuk keluar) harus mencari isu dan kemudian diangkat menjadi berita

dengan daerah liputan Cilegon. Ia yang tinggal di Anyer, harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk meliiput di Cilegon, dan datang ke kantor di Serang. Seringkali Informan 3 harus pulang larut malam terkait dengan pekerjaannya ini. Menyadari kondisinya sebagai perempuan dan ibu satu anak, Informan 3 kemudian meminta keringanan hanya datang ke kantor pada Senin, Rabu dan Jum'at saja.

Kode etik wartawan melarang seorang wartawan menerima imbalan, namun hal ini terpaksa tidak diindahkan Informan 3. Dengan penghasilannya yang kecil, Informan 3 harus mencari tambahan dari berbagai sumber diantaranya iklan dan honor penulisan dari narasumber. Sedangkan Informan 2 saat meliput harus membawa bukti berlangganan dari tempat ia melakukan wawancara. Informan 1 tidak mengalami hal yang serupa karena dirinya lebih banyak berada di dalam studio.

Stereotype perempuan sebagai kaum lemah seringkali datang dari masyarakat, atau kaum pria. Hal ini dialami oleh informan ketiga yang merasa dianggap sebagai wartawan kelas dua dengan pengetahuan dibawah wartawan pria. Namun saat ia melontarkan pernyataan kritis, hal ini dianggap sebagai sebuah hal yang jarang terjadi. Sesuai dengan catatan AJI perbandingan antara wartawan laki-laki dan perempuan berkisar 3:1, hal tersebut dapat tercermin dari tiga narasumber dalam penelitian ini. Informan 1 dan Informan 3 adalah satu-satunya wartawan perempuan yang bekerja di kantor mereka. Sedangkan Informan 2 meskipun bukan satu-satunya wartawan perempuan di Radar Banten namun jumlah wartawan perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Jam kerja yang tidak menentu dan *deadline* yang menuntut wartawan bekerja hingga larut malam juga tidak jarang memberikan pandangan negatif dari masyarakat yang menilai bahwa perempuan yang pulang malam hari bukan perempuan baik-baik.

Bias gender juga terjadi dari narasumber yang memberikan ajakan kencan terlebih dahulu sebelum memberikan informasi. Namun ketiganya setuju bahwa menjadi wartawan perempuan memberikan mereka kemudahan untuk mendekati sumber berita. Bias gender juga bisa datang dari masyarakat yang menilai bahwa perempuan yang pulang malam bukan perempuan baik-baik. Padahal sistem kerja wartawan harian menuntut mereka untuk pulang larut malam. Hal yang sama tidak berlaku untuk wartawan pria, yang meskipun pulang malam tidak menjadi bahan pergunjungan masyarakat.

Wartawan perempuan melihat dirinya seseorang yang berbeda dibandingkan dengan wartawan laki-laki. Oleh karena itu mereka meminta beberapa keistimewaan. Wartawan adalah makhluk sosial, bagian dari masyarakat yang menciptakan sebuah kenyataan atau realitas. Perilaku wartawan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menurut hasil penelitian, perilaku wartawan Radar Banten dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat, bias gender, ekonomi serta tuntutan dari perusahaan pers itu sendiri. Dari semua faktor yang muncul, ekonomilah yang dinilai paling berpengaruh.

Bandura (dalam Rahmat, 205:240) menyatakan bahwa, kita belajar bukan saja dari pengalaman langsung, tetapi dari peniruan dan peneladanan. Bandura mendefinisikan perilaku sebagai hasil faktor-faktor kognitif dan lingkungan. Artinya kita mampu memiliki keterampilan tertentu, jika ada jalinan positif antara stimuli yang kita amati dengan karakteristik diri kita.

Ketiga informan berperilaku sebagai wartawan karena meniru kondisi di sekitarnya. Meskipun mendapatkan pengetahuan tentang wartawan ideal dan profesional dari kampus, namun saat terjun ke dunia kerja banyak wartawan yang melakukan praktek tidak profesional, seperti menerima imbalan, mencari iklan dan lain sebagainya.

Permasalahan di lapangan, bukan menjadi rahasia umum bahwa gaji wartawan daerah masih kecil. Hasil penelitian Wina Armada Sukardi dari Dewan Pers yang dilakukan pada April sampai Oktober 2008 lalu di 21 provinsi dan 21 kota di Indonesia. Hasilnya dari 584 responden yang berpartisipasi, golongan gaji wartawan besar yaitu 39,21% berpenghasilan dibawah 1 juta rupiah per bulan. Sementara itu tidak ada satu pun wartawan yang gaji resminya diatas 5 juta.

Hal ini mendorong perilaku wartawan menjadi permisif terhadap amplop, imbalan atau pencarian iklan. Perilaku wartawan inilah yang kemudian diserap oleh wartawan perempuan muda yang baru saja terjun ke lapangan. Tugas jurnalis di media lokal jauh lebih berat dibanding jurnalis media nasional. Hal ini dikatakan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Ikrar Nusa Bakti. Alasannya, gaji jurnalis media lokal lebih rendah, sedang tantangan dan ancamannya jauh lebih besar dibanding jurnalis media nasional. <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=58002>.

Sebagai perbandingan TransTV memberikan jurnalis muda posisi gaji sekitar Rp 1.500.000. Ini adalah gaji awal seorang karyawan di bidang media. Bila sudah bekerja lebih dari lima tahun kemungkinan skala gajinya bergerak antara Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000. Gaji itu belum tunjangan lainnya apakah kesehatan, pendidikan, transportasi. Sementara itu Gatra memberikan gaji pada wartawannya sebesar Rp.2.100.000 per bulan belum termasuk biaya transport liputan. <http://www.journalist-adventure.com/?p=43&cpage=4#comments>.

Menurut kode etik, UU Pers dan UU Penyiaran, wartawan yang profesional diharapkan independen, memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani. Menyajikan berita yang akurat, menghormati hak narasumber tidak menjiplak, tidak menerima suap, berimbang, tidak

membuat berita bohong, tidak menyalahgunakan profesi, memiliki tanggungjawab pada masyarakat serta fokus pada tugasnya yaitu pencarian berita.

Dalam Teori Tindakan Sosial, Weber menyatakan bahwa manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukannya. Menjadi seorang wartawan sudah diputuskan oleh ketiganya. Hal ini ditujukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau kehendaki. Tujuan akan sangat terkait dengan motivasi. Motivasi ketiganya hampir sama yaitu mengaplikasikan ilmu yang didapat di kampus, mengembangkan kemampuan menulis, serta faktor ekonomi. Alasan-alasan mengapa mereka bertindak, kejadian historis yang mempengaruhi karakter mereka dan memahami tindakan para pelakunya yang hidup di masa kini.

Komponen perilaku terdiri dari motivasi, cara berfikir dan bertindak serta cara berinteraksi. Teori Motivasi dari Abraham Maslow menunjukkan bahwa kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan dasar telah dipenuhi maka manusia cenderung akan beranjak ke tingkatan kebutuhan di atasnya.

Berdasarkan teori Maslow tersebut terdapat implikasi yang dapat diterapkan dalam mengamati perilaku wartawan dalam menjalankan profesinya, antara lain:

- 1) Wartawan merupakan individu yang memiliki berbagai kebutuhan. Tiga informan yang dijadikan bahan penelitian memiliki berbagai kebutuhan, diantaranya kebutuhan ekonomi, kebutuhan eksistensi diri, kebutuhan pengembangan pengetahuan.
- 2) Wartawan akan termotivasi apabila level kebutuhannya belum terpenuhi, sebaliknya apabila level kebutuhannya telah terpenuhi maka level kebutuhan itu tidak akan memotivasi wartawan yang bersangkutan. Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi, sebelum kebutuhan

yang tinggi diaktivasi untuk dimunculkan sebagai suatu perilaku untuk memotivasi.

- 3) Perilaku wartawan dalam menjalankan profesinya akan dipengaruhi oleh motivasi yang ada dalam dirinya. Perilaku individu akan berbeda-beda satu sama lainnya ketika berhadapan dengan objek atau peristiwa tertentu, karena motif penggerak perilaku juga berbeda-beda.

Ada empat tipe tindakan menurut Weber, Tipe pertama adalah Tindakan Rasionalitas Sarana-Tujuan yang berorientasi kepada tujuan atau penggunaan. Tipe kedua adalah Tindakan Rasionalitas Nilai. Tindakan ini merupakan tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya” (Weber, 1921/1968;24-25). Tipe ketiga adalah Tindakan Afektif. Tindakan ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor. Misalnya “Apa boleh buat, maka saya lakukan”. Sedangkan tipe keempat adalah Tindakan Tradisional dimana merupakan tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang sudah terbiasa dan lazim dilakukan.

Tindakan yang dilakukan oleh wartawan perempuan dalam penelitian ini termasuk tindakan afektif, yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor. Mereka mengetahui bahwa perilaku wartawan di lapangan tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku, namun mereka tidak bisa melakukan hal lain yang mereka anggap ideal tersebut.

Ada beberapa temuan dalam penelitian ini. Pertama adalah pekerjaan sebagai wartawan dianggap sebagai ranah laki-laki. Ini terlihat dari jumlah wartawan perempuan di Provinsi Banten jauh lebih sedikit dibanding perempuan. Jam kerja yang tidak menentu dan sampai larut malam membuat munculnya pandangan negatif dari masyarakat, dimana masih ada penilaian bahwa perempuan yang keluar malam bukanlah perempuan baik-baik.

Kesimpulan &Saran

Motivasi wartawan perempuan dalam menjalankan profesinya antara lain keinginan mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kampus, meneruskan hobi menulis, berontribusi untuk pembangunan serta ekonomi. Dari semua faktor yang muncul, faktor keinginan mengaplikasikan ilmulah yang dinilai paling berpengaruh. Dalam Teori Tindakan Sosial Weber menyatakan bahwa manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukannya. Menjadi seorang wartawan sudah diputuskan oleh ketiganya. Hal ini ditujukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau kehendaki. Tujuan akan sangat terkait dengan motivasi. Motivasi ketiganya akan mempengaruhi alasan-alasan mengapa mereka bertindak, kejadian historis yang mempengaruhi karakter mereka dan memahami tindakan para pelakunya yang hidup di masa kini

Pandangan mengenai wartawan profesional dimata wartawan perempuan adalah yang mengerjakan tugasnya dengan baik dan sesuai kode etik. Namun saat berbenturan dengan jenis kelamin mereka sebagai perempuan, ketiga wartawan ini sepakat bahwa sebagai perempuan mereka lebih mudah mendekati narasumber. Namun tidak jarang mereka juga mendapatkan perlakuan negatif. Meskipun harus profesional, ketiganya sepakat bahwa keterbatasan fisik sebagai perempuan membuat mereka harus diberi keistimewaan, diantaranya pulang lebih awal atau jam kantor yang berbeda.

Perilaku wartawan perempuan cenderung sama dengan wartawan laki-laki, namun mereka meraskaan beberapa kelebihan diantaranya mudah mendekati narasumber. Tidak jarang wartawan perempuan dipandang sebelah mata dan diperlakukan negatif oleh narasumber. Wartawan adalah makhluk sosial, bagian dari masyarakat yang menciptakan sebuah kenyataan atau realitas Perilaku wartawan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menurut hasil

penelitian, perilaku wartawan Radar Banten dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat, bias gender, ekonomi serta tuntutan dari perusahaan pers itu sendiri. Dari semua faktor yang muncul, ekonomilah yang dinilai paling berpengaruh. Tindakan yang dilakukan oleh wartawan perempuan dalam penelitian ini termasuk tindakan afektif, yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor.

Ada beberapa temuan dalam penelitian ini. Pertama adalah pekerjaan sebagai wartawan dianggap sebagai ranah laki-laki. Ini terlihat dari jumlah wartawan perempuan di Provinsi Banten jauh lebih sedikit dibanding perempuan. Jam kerja yang tidak menentu dan sampai larut malam membuat munculnya pandangan negatif dari masyarakat, dimana masih ada penilaian bahwa perempuan yang keluar malam bukanlah perempuan baik-baik.

Beberapa saran yang diberikan antara lain, perlunya diberikan pembekalan kode etik dan pola kerja wartawan yang baik kepada wartawan-wartawan di Provinsi Banten. Perlunya diberikan pemahaman kepada wartawan perempuan tentang hak dan kewajiban kerja mereka terkait bias gender di masyarakat. Penelitian ini hanya dilakukan sebatas pada wartawan perempuan yang baru saja lulus kuliah, sehingga belum bisa mencerminkan seluruh populasi wartawan perempuan di Provinsi Banten. Sebaiknya dilakukan penelitian dengan skala yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Cresswell, W, John. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*, California: Sage Publications, Inc.

Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2003. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Pantau

Kreitner, Robert & Angelo Kinicki, 2003. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat

Masduki, 2004. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2005. *Nuansa-Nuansa Komunikasi* Bandung: Rosda.

Pers, Dewan. 2009. *Etika, Berita Dewan Pers No.76 Edisi Agustus 2009*, Jakarta: Dewan Pers

Sumber lainnya

<http://media.kompasiana.com/mainstreammedia/2012/02/05/jumlah-jurnalis-perempuan-masih-minim/> diakses pada 11 Maret 2012 pukul 15.52

http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=17&submit.y=24&submit=next&qual=high&submitval=next&fname=%2Fjiunkpe%2Fs1%2Feman%2F2008%2Fjiunkpens-s1-2008-31404230-11736-jawa_pos-chapter1.pdf diakses pada 11 Maret 2012 pukul 16.23

<http://tere616-blissfull.blogspot.com/2010/08/perempuan-oh-nasibmu.html> diakses pada 12 Maret 2012 pukul 10.52

<http://filsafat.kompasiana.com/2010/07/19/sedikit-tentang-max-weber/> akses pada 10 Januari 2012

<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=58002>
> [10/04/11]

[http://www.journalist-adventure.com/?p=43&cpage=4#](http://www.journalist-adventure.com/?p=43&cpage=4#comments)
comments akses pada 10 *Oktober* 2010



ALTERNATIF MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN DI KOTA SERANG: SINERGISITAS PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN AKADEMISI TAHUN 2009-2010

Oleh : Yeni Widyastuti, Agus Sjafari, Arenawati & Listyaningsih

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini masih menjadi perhatian bangsa Indonesia. Karena berbagai program pembangunan dijalankan sedemikian rupa namun tetap saja wajah kemiskinan menghiasi setiap sudut kota, apalagi di daerah pedalaman. Sehingga seolah-olah kemiskinan menjadi masalah yang sedemikian rumit dan kompleks. Ragam ketidakberdayaan masyarakat yang mencerminkan terjadinya kondisi kemiskinan ini antara warga lain tampak dalam ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketiadaan kesempatan berusaha, keterbatasan dalam hal lingkungan geografis, terlahir dalam kondisi keluarga yang miskin dan sebagainya.

Kemiskinan telah banyak ditelaah oleh para ilmuwan dalam berbagai aspek dan menggunakan beragam ukuran. Banyak konsep yang berkaitan dengan kemiskinan misalnya dalam konteks ekonomi terdapat istilah standar hidup, pendapatan, distribusi pendapatan, dan sebagainya. Dalam konteks sosiologis terdapat istilah marginalisasi, kelas, stratifikasi dan sebagainya. Dalam konteks kebijakan kita sering menemukan istilah standar atau tingkat hidup yang tidak hanya menekankan pada tingkat pendapatan tetapi juga pemenuhan dalam kebutuhan akan pendidikan, perumahan, kesehatan dan kondisi-kondisi sosial lainnya dalam masyarakat. Ragam pendapat ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan memang sangatlah kompleks dan oleh karenanya pemecahannya pun memerlukan kajian holistik dengan seganap sudut pandang dan strategi.

Kemiskinan adalah kondisi yang pada dasarnya tidak diinginkan oleh setiap orang, namun kenyataannya hal ini sulit untuk dihindarkan. *Asian Development Bank* (Sulistiyani, 2004: 3) menyatakan bahwa 900 juta penduduk dunia adalah miskin, mereka menggantungkan hidup dengan kurang dari 1 US\$ setiap hari, mereka tinggal di Asia dan Afrika. Satu dari tiga orang di Asia adalah miskin. Untuk kasus di Indonesia, problem kemiskinan penduduk menunjukkan tidak kurang dari 17,75 % atau 39,05 juta penduduk miskin dengan income per-kepita Rp.131.256/bulan (Pedesaan) dan Rp.175.324/bulan (Perkotaan) atau menurut Bank Dunia (tahun 2007) dengan rata-rata pendapatan kurang dari 2 US\$/hari (Rp.19.000/hari). Kenyataan semakin tingginya angka kemiskinan, membuat semakin jauhnya tercapai salah satu cita-cita dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Terjadinya krisis global saat ini juga memperparah kondisi kemiskinan yang merambah banyak sektor di Indonesia. Dalam penanggulangan dampak krisis ekonomi

pemerintah menawarkan beberapa strategi penanggulangan kemiskinan yang memiliki prioritas sebagai berikut (Sulistiyani, 2004:15):

- a. Peningkatan ketahanan pangan (*food security*)
- b. Penciptaan lapangan kerja (*employment creation*)
- c. Pengembangan usaha kecil dan menengah (*small and medium enterprises*)
- d. Perlindungan masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan (*social protection*)

Dipilihnya Kota Serang sebagai obyek dalam penelitian ini, tidak terlepas kondisi kemiskinan masyarakat yang masih sangat tinggi. Menurut data BPS tercatat hingga tahun 2010 bahwa kemiskinan di Kota Serang mencapai 6,2% atau 33.480 orang terhadap jumlah penduduk yang berkisar 540 ribu; sementara menurut BKKBN mencapai 24,39% dari jumlah KK (yang bila dikonversi dengan asumsi jumlah rata-rata anggota keluarga tidak berubah (3,93), maka berarti jumlah penduduk miskin akan mencapai 1.892.836 jiwa (20,84%), bukan 779.200 jiwa (8,58%). Sedangkan Karakteristik kemiskinan terdistribusi dalam 35,92% di wilayah perkotaan dan 64,08% di wilayah perdesaan, dengan sebaran secara berurutan: Lebak 42,95%, Pandeglang 39,77%, Serang 25,69%, Cilegon 9,37%, Tangerang 13,79%, dan Kota Tangerang 5,1% (Smeru, 2004). Angka Daya Beli Masyarakat baru mencapai Rp. 618.000 atau 84,00% dari Rp. 732.720 (Standar Minimal UNDP). Tingkat hunian perumahan baru terlayani 52,05%, 47,95% belum terpenuhi; 230.457 atau 20% keluarga menempati tempat tinggal yang tidak layak huni; serta terbatasnya cakupan pelayanan sanitasi dasar yang baru mencapai 53,64%.

Berdasarkan data di atas menunjukkan perlunya program pemberdayaan yang memberi tekanan lebih besar kepada pembangunan keluarga. Dengan demikian, implementasi Model Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial

diharapkan akan mengangkat derajat keluarga agar keluar dari kemiskinan, khususnya di Kota Serang Propinsi Banten. Pola kehidupan masyarakat miskin kota di Propinsi Banten ternyata sangat kompleks, dihadapkan kepada tekanan hidup yang sangat keras dan khas. Dikatakan sangat keras dikarenakan sebagian masyarakat tersebut dihimpit oleh kebutuhan hidup dengan tingkat pendapatan yang sangat rendah dan tidak memadai. Tingkat penghasilan yang mereka dapatkan sangat jauh untuk dapat memenuhi beban hidup tinggal di kota. Sedangkan sangat khas, dikarenakan kualitas hidup masyarakat miskin kota terbelit oleh persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan kesulitan mengakses berbagai layanan publik. Dengan demikian kualitas hidup sebagian masyarakat tersebut sangatlah memprihatinkan. Dengan lingkungan keluarga dan lingkungan di sekitar keluarga yang sangat kumuh sangatlah tidak menjamin adanya kesehatan serta keterpenuhan hidup yang layak bagi masyarakat tersebut.

Penelitian ini mempunyai tujuan utama untuk mengetahui bagaimana model pemberdayaan terhadap keluarga miskin yang paling tepat dengan sebelumnya melakukan pemetaan *needassesment* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya akan diterapkan model pemberdayaan keluarga miskin melalui Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial di lokasi penelitian yaitu Desa Banten dan Kelurahan Sukawana Kota Serang. Program bimbingan usaha kesejahteraan sosial pada dasarnya berkaitan dengan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan ekonomi. Namun ternyata hasil penelitian tahun pertama di lapangan menunjukkan bahwa kesejahteraan di bidang kesehatan, perumahan dan pendidikan semua bermuara pada bidang ekonomi. Sehingga pada penelitian tahun kedua saat ini difokuskan pada kesejahteraan bidang ekonomi.

Kegiatan penelitian yang telah dilakukan di tahun pertama adalah memfokuskan pada penelusuran *need assessment* guna memetakan jenis usaha yang potensial bisa berkembang di kedua wilayah tersebut. Di tahun pertama diperoleh kesimpulan bahwa usaha yang bisa dikembangkan di kedua wilayah penelitian masing-masing berbeda. Di Desa Banten, secara geografis terletak di pesisir pantai utara Jawa. Namun keberadaan mata pencaharian penduduknya sangat heterogen diantaranya nelayan, pedagang, pembantu rumah tangga, petani dan sebagainya dengan prosentase yang hampir berimbang. Sementara di Kelurahan Sukawana didominasi oleh usaha konveksi, buruh dan petani, namun sebagian besar penduduknya hanya sebagai buruh konveksi. Sehingga mereka merasa kesulitan mengembangkan usaha untuk mandiri, karena terbentur oleh beberapa hal, diantaranya adalah modal, keahlian dan kesempatan berusaha. Oleh karena itu penelitian selanjutnya akan dilakukan analisa dalam rangka pemecahan masalah yang telah ditemukan pada penelitian tahun pertama.

Kegiatan penelitian tahun kedua akan memfokuskan pada proses perancangan pemberdayaan keluarga miskin melalui bimbingan usaha kesejahteraan sosial dengan melibatkan stakeholders. Rancangan untuk mendesain model pemberdayaan ini mengedepankan proses *bottom-up*, artinya keterlibatan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan yaitu keluarga miskin. Selain itu selama penelitian berjalan, penguatan terhadap penyelenggara pemberdayaan serta model yang akan diterapkan, adalah bagian penting dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan.

Pada tahun pertama, penelitian yang dilakukan telah mencapai target yaitu pemetaan *need assessment* keluarga miskin. Berikut ini kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan tahun pertama:

a. Pemetaan *Need Assesment* keluarga miskin

Untuk **Desa Banten** yang tinggal di *wilayah pesisir*, maka harapan masyarakat adalah adanya bantuan modal usaha yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan. Bantuan modal usaha yang diharapkan antara lain adalah:

- 1) Bantuan modal untuk membeli perahu dan perlengkapannya sebagai alat pencari nafkah utama bagi nelayan
- 2) Bantuan modal untuk membangun rumah tinggal yang lebih layak, karena sebagian besar warga masyarakat masih mendiami lahan *squatter* yang sewaktu-waktu bisa dipindahkan
- 3) Bantuan modal untuk melakukan usaha terutama bagi kelompok perempuan, misalnya usaha-usaha rumah tangga misalnya membuka warung makan, pengolahan hasil laut, usaha kerajinan produktif dan sebagainya
- 4) Bantuan modal untuk diversifikasi usaha misalnya usaha salon, *counter handphone*, menjahit, warung sembako dan sebagainya.

b. Untuk **Desa Sukawana** yang tinggal di wilayah perkotaan, maka harapan masyarakat adalah adanya bantuan modal usaha yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan buruh bantuan yang diharapkan antara lain adalah:

- 1) Bantuan biaya pendidikan , karena kebanyakan warga masyarakat tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Dana BOS dirasakan belum mencukupi karena untuk biaya seragam, buku dan alat tulis serta perlengkapan sekolah lainnya masih dibutuhkan banyak biaya
- 2) Biaya kesehatan gratis, karena program jaminan kesehatan masyarakat dari pemerintah belum

merata, proses mendapatkan bantuan tersebut juga kurang bisa dipahami masyarakat, serta fasilitas kesehatan yang masih minim

- 3) Bantuan sarana sanitasi dasar terutama sarana MCK karena selama ini masih banyak warga masyarakat yang membuang hajat tidak pada tempatnya dan dapat mengganggu kesehatan lingkungan. Selama ini sudah ada pemberian bantuan selama ini hanya berupa material dasar misalnya semen saja untuk pengerasan jalan tapi untuk penyelesaian tidak diberikan.

Usaha Yang Diinginkan Untuk Mencukupi Kebutuhan Rumah Tangga

- a. **Desa Banten** jenis usaha yang diinginkan adalah nelayan karena memang kondisi geografisnya di pesisir. Selama ini warga miskin sangat menginginkan adanya bantuan peralatan melaut seperti kapal motor, jaring dan sebagainya. Untuk usaha lainnya kepeminatan usaha misalnya di bidang perdagangan seperti sembako, *counter handphone*, warung makanan, dan sebagainya juga dibutuhkan. Untuk kerajinan rumah tangga kurang diminati. Sedangkan alternatif usaha lainnya yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan juga dibutuhkan.
- b. **Desa Sukawana** sebagian besar warga masyarakat bekerja di bidang pertanian dan sebagian lagi usaha menjahit (konveksi). Warga menginginkan berusaha di bidang perdagangan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan. Usaha perdagangan yang diminati antara lain adalah membuka warung sembako, warung makanan dan sebagainya.

Efektivitas Pemberdayaan Miskin Dari Perspektif Target

- a. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggap kurang mencukupi, karena jumlah dana yang diterima sangat kecil yaitu Rp.300 ribu/3 bulan yang kebanyakan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan makan, daripada dimanfaatkan untuk modal usaha
- b. Program Beras Miskin (Raskin) dianggap kurang mencukupi, karena jumlah yang minim (dijatah 10 kg/KK), mutu dan kualitas beras yang rendah serta ketidakpastian adanya jatah Raskin secara berkelanjutan. Keluhan lainnya adalah masalah pendataan keluarga miskin penerima bantuan program yang tidak transparan oleh RT/RW setempat
- c. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sangat kurang, karena informasi dan pendataan penerima bantuan tidak merata serta lokasi Puskesmas rujukan yang sangat jauh dari tempat tinggal masyarakat sehingga jarang dimanfaatkan
- d. P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) merupakan program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat di perkotaan. Di kelurahan ini, program tersebut juga pernah dilaksanakan. Namun dampaknya belum terlihat, artinya kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan ini belum meningkat. Modal yang dipinjamkan kepada keluarga miskin sebesar Rp 350.000,- ternyata belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan pengembalian dana yang macet dari peminjam, disebabkan karena usaha yang macet pula.

Model Alternatif Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial

Secara umum model pemberdayaan ini berbentuk pemberian bantuan modal usaha sesuai dengan jenis usaha

yang diinginkan keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karenanya perlu dilakukan identifikasi kelompok usaha yang potensial untuk dikembangkan. Penerapan model ini disertai dengan Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Kemudian untuk tahun kedua maka penelitian ini mempunyai tujuan lanjutan antara lain:

1. Menerapkan model pemberdayaan keluarga miskin melalui bimbingan usaha kesejahteraan sosial.
2. Melakukan observasi dan analisis terhadap penerapan model pemberdayaan
3. Mencari solusi atas kelemahan model yang diterapkan

Dalam rangka mencapai tujuan pada penelitian tahun kedua ini, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain:

1. Melakukan observasi kelompok usaha yang potensial untuk mendapatkan bimbingan usaha kesejahteraan sosial.
2. Melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan masyarakat untuk mengetahui kelompok usaha yang potensial untuk dikembangkan.
3. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) I dengan kelompok usaha yang potensial tersebut bersama-sama dengan perangkat desa/kelurahan setempat, yaitu di Kelurahan Sukawana yang mewakili kemiskinan di wilayah perkotaan dan Desa Banten yang mewakili kemiskinan di wilayah pesisir
4. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) II dengan pihak terkait dalam hal ini Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) di Kota Serang untuk melakukan sosialisasi program pelatihan yang sesuai dengan jenis usaha kelompok yang potensial untuk dikembangkan baik di Kelurahan Sukawana maupun di Desa Banten.
5. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) III dengan Dinas Kependudukan, Sosial, Tenaga Kerja dan Catatan

Sipil (Disduksosnakercapil) Kota Serang untuk bekerjasama melakukan pendampingan usaha

Dengan model tersebut maka ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan yaitu:

1. Pelatihan Ketrampilan Usaha dengan Melibatkan Tenaga Ahli

Sebagian besar keluarga miskin memiliki latar belakang pendidikan formal yang terbatas. Keterbatasan ini menyebabkan rendahnya kualitas produk usaha yang dihasilkan dan ketidakmampuan untuk menembus jangkauan pasar yang lebih luas. Untuk itu maka diperlukan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan usaha dengan melibatkan para ahli di bidang masing-masing. Misalnya dengan melibatkan pihak Balai Besar Latihan Tenaga Kerja Industri (BBLKI), pemerintah daerah dan akademisi. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan kelompok usaha yang potensial sehingga pada akhirnya juga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas.

2. Pendampingan Pemanfaatan Modal

Hasil penelitian terhadap keluarga miskin penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah seringkali menggunakan bantuan yang mereka dapatkan tidak digunakan untuk kepentingan usaha melainkan untuk kepentingan konsumtif, termasuk pembelian kebutuhan sehari-hari dan biaya-biaya sosial lainnya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan berupa dana (uang) sebagai kebutuhan permodalan pemanfaatannya tidak dilakukan secara maksimal. Oleh karenanya perlu dilakukan identifikasi kelompok usaha yang perlu mendapatkan pelatihan sekaligus pendampingan mengenai cara pemanfaatan modal secara efisien. Dengan demikian, pemanfaatan dana

secara maksimal tersebut akan mampu memperlancar kegiatan usaha mereka

3. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi sangat diperlukan agar dua aktivitas sebelumnya yaitu pelatihan ketrampilan dan pendampingan dapat berjalan dengan maksimal. Kelompok usaha yang mendapatkan pelatihan mampu mengaplikasikan ketrampilan dari hasil pelatihan tersebut. Setiap individu mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda-beda dalam menyerap materi pelatihan karena terkait dengan pengetahuan kognitif individu yang berbeda-beda pula. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka perlu dilakukan monitoring terhadap kegiatan usaha pasca pelatihan. Kegiatan monitoring ini juga dapat dimanfaatkan ketika para penerima bantuan modal usaha menghadapi kendala dalam kegiatan usaha mereka. Kemudian dengan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan baik oleh penerima bantuan modal usaha maupun pemberi bantuan usaha.

Tinjauan Pustaka

Model Pemberdayaan untuk Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Jim Ife (1995) dalam membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepas-pisahkan dengan dua konsep sentral, yaitu konsep daya (*power*) dan konsep ketimpangan (*disadvantage*). Pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep daya dapat ditelusuri dari beberapa perspektif, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan post-strukturalis.

1. *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis*, adalah suatu proses untuk mendorong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong

mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, dan memahami bagaimana bekerjanya system.

2. *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis* adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tak berdaya adanya *power* dan control yang besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya.
3. *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis* adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat, seperti masalah kelas, gender, ras atau etnik.
4. *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis* adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan dari pada suatu usaha aksi.

Model-Model Pemberdayaan Masyarakat

Model kemitraan dalam konteks pemberdayaan masyarakat antara lain dikembangkan berdasarkan asas kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan (Sulistiyani, 2004: 131-132):

- a. *Subordinate Union of Partnership*
- b. *Linear Union of Partnership*

c. Linear Collaborative of Partnership

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut *Subordinate Union of Partnership* terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta adalah tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus (*linear union of partnership*) adalah bergabungnya pihak-pihak yang setara untuk melakukan kerjasama. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas. Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear atau *linear collaborative of partnership*, tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali informasi melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan yaitu keluarga miskin. Langkah awal dimulai dari pencarian data statistik mengenai jumlah keluarga miskin beserta indikatornya di instansi yang berkaitan yaitu Bapedda Kota Serang, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan BPS Kota Serang. Dari data yang didapat

kemudian dianalisis untuk menentukan obyek penelitian sebagai lokus penelitian.

Hasil akhir penelitian ini diharapkan akan tercipta model pemberdayaan yang terbaik bagi kegiatan usaha keluarga miskin. Selain itu juga dilakukan observasi lapangan dan studi dokumentasi untuk melengkapi data yang diperlukan untuk keperluan analisis data. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif kultural dan struktural. Dimana aspek kultural dan struktural ternyata lebih mendominasi pola pemberdayaan masyarakat di wilayah Banten.

Pembahasan

Dalam penelitian tahap I telah dilakukan identifikasi *need assesment*, sesuai dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang pertama yaitu strategi tradisional. Indikator yang ingin dicapai adalah pertama, keluarga miskin dapat mengenali permasalahan yang dihadapi dan kedua, keluarga miskin dapat menentukan jenis usaha yang diinginkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Tabel Jenis Usaha yang Diinginkan Keluarga Miskin

Wilayah Penelitian	Nelayan	Pedagang	Jasa	Kerajinan Rumah Tangga	Lainnya
Desa Banten	√	√	√	-	√
Kel. Sukawana	-	√	√	-	√

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa di Desa Banten jenis usaha yang diinginkan adalah nelayan karena memang kondisi geografisnya di pesisir. Selama ini warga miskin

sangat menginginkan adanya bantuan peralatan melaut seperti kapal motor, jaring dan sebagainya. Untuk usaha lainnya kepeminatan usaha misalnya di bidang perdagangan seperti sembako, *counter handphone*, warung makanan, dan sebagainya juga dibutuhkan. Untuk kerajinan rumah tangga kurang diminati. Sedangkan alternatif usaha lainnya yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan juga dibutuhkan.

Di Kelurahan Sukawana sebagian warga masyarakat bekerja di bidang pertanian dan sebagian lagi usaha menjahit (konveksi). Warga menginginkan berusaha di bidang perdagangan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan. Usaha perdagangan yang diminati antara lain adalah membuka warung sembako, warung makanan dan sebagainya.

Tabel Jenis Bantuan yang Diinginkan Keluarga Miskin

Wilayah Penelitian	Permodalan (Bantuan Usaha)	Peralatan	Pelatihan Ketrampilan Usaha	Pendampingan Usaha	Lainnya
Desa Banten	√	√	√	√	√
Kel. Sukawana	√	√	√	√	√

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2009

Untuk jenis bantuan yang diinginkan sesuai dengan tabel diatas untuk Desa Banten maupun Kel. Sukawana yaitu permodalan (bantuan usaha) karena selama ini dana bantuan dirasakan jumlahnya sedikit sehingga belum dapat membantu usaha yang dijalankan. Selain itu sebagian bantuan dimanfaatkan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup

sehari-hari. Bantuan peralatan juga sangat dibutuhkan. Misalnya di Desa Banten warga sangat membutuhkan perahu untuk melaut, karena itu merupakan sarana utama untuk mencukupi nafkah keluarga. Bentuk bantuan yang lain seperti pelatihan ketrampilan usaha, pendampingan usaha dan lainnya.

Perancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Melalui Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti mengutip pendapat Pang S. Asngari (2007) bahwa program pemberdayaan merupakan pernyataan tertulis mengenai keadaan/situasi, masalah, tujuan dan cara pelaksanaannya. Dalam membahas tentang program pemberdayaan keluarga miskin melalui penerapan konsep pembangunan masyarakat di Kota Serang lebih lanjut akan menggunakan pendekatan sesuai dengan konsep program pemberdayaan yang dikemukakan oleh Pang S. Asngari.

Pemilihan lokasi penelitian sesuai dengan karakteristik lokasi penelitian yaitu wilayah yang memiliki karakteristik di perkotaan dan wilayah yang memiliki karakteristik pesisir. Ditentukannya kedua wilayah tersebut berdasarkan kepada argumentasi bahwa sebagian besar wilayah di Kota Serang terdiri dari dua karakteristik perkotaan dan karakteristik pesisir. Dengan demikian dua wilayah yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Sukawana yang mewakili wilayah kemiskinan dilihat dari karakteristik wilayah perkotaan.
- 2) Desa Banten yang mewakili wilayah kemiskinan dilihat dari karakteristik wilayah pesisir.

Perancangan model pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui program bimbingan usaha kesejahteraan sosial dilakukan melalui beberapa tahapan

antara lain: tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi.

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan ini merupakan suatu kegiatan awal dalam program bimbingan usaha kesejahteraan sosial dengan melakukan persiapan-persiapan secara sistematis terkait dengan usaha-usaha bersama yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten dengan pihak pendamping serta pihak-pihak terkait lainnya. Persiapan-persiapan secara sistematis tersebut antara lain menyangkut beberapa kegiatan antara lain: analisis situasi, analisis masalah, analisis tujuan program, serta analisis cara melaksanakan program.

Analisis Situasi

Keluarga miskin pada dasarnya terdiri dari keluarga yang tingkat pendapatan dan penghasilan ekonominya relatif rendah. Berdasarkan indikator yang digunakan oleh BPS (2006), rendahnya tingkat penghasilan dan pendapatan ekonomi keluarga atau yang disebut dengan keluarga miskin tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: 1) Rumah yang tidak permanen; 2) Luas tanah yang ditempati; 3) kualitas kesehatan yang sangat buruk; 4) lingkungan keluarga yang tidak sehat; 5) kualitas makanan/kalori yang dikonsumsi tidak memadai dari sisi kesehatan; 6) Fasilitas air minum; 7) Fasilitas jamban/WC; 8) Aset keluarga; 9) Status tanah tempat tinggal dan sebagainya.

Khusus terkait dengan rendahnya pendapatan dan penghasilan ekonomi keluarga di Kota Serang tersebut dikarenakan oleh masih rendahnya atau belum berkembangnya pola perilaku mencari nafkah kepala keluarga miskin tersebut. Rendahnya atau belum berkembangnya pola perilaku mencari nafkah kepala keluarga tersebut ditandai

oleh: 1) tingkat pengetahuan yang rendah dikarenakan tingkat pendidikannya yang rendah; 2) Sikap mental masyarakatnya yang masih tradisional tanpa disertai oleh keinginan untuk maju dan berkembang; serta 3) Keterampilan yang tidak memadai untuk dapat bersaing hidup di kota Serang.

Analisis situasi masalah dalam penelitian dilakukan pemetaan (*Need Assessment*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pelaksanaan FGD dengan keluarga miskin penerima bantuan kesejahteraan social dihadiri oleh 20 orang warga yang mewakili masing-masing RT. Kesimpulan dari FGD pada hari ini adalah sebagai berikut :

- a. Jenis usaha yang ada di Kelurahan Sukawana pada umumnya adalah usaha konveksi jahit menjahit, namun terdapat juga jenis usaha yang lain, yaitu : pedagang kecil warung sembako, counter Handphone, juga terdapat usaha korsel keliling, bengkel ban dan buruh bangunan.
- b. Permodalan usaha didapat dari individu untuk usaha konveksi. Sedang permodalan yang diberikan pemerintah melalui PNPM hanya cukup untuk membuat warung kecil-kecilan.
- c. Warga kelurahan Sukawana sudah pernah mendapatkan pelatihan keterampilan menjahit, namun pelatihan tidak efektif karena keterbatasan alat dan bahan seperti mesin jahit. Pelatihan keterampilan ini pun tidak bersertifikat, sehingga dengan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan tersebut mereka tidak dapat bekerja di pabrik garmen.

Dari hasil FGD diperoleh kesimpulan, bahwa permasalahan yang ada dalam usaha mereka yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial mereka antara lain:

- a. Warga kelurahan Sukawana yang bekerja di bidang konveksi sebagian besar adalah memproduksi pakaian seragam sekolah. Mereka menyampaikan bahwa

permintaan seragam sekolah hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu, seperti pada bulan Juni dan Juli, pada saat tahun ajaran baru. Sedangkan pada bulan-bulan lain permintaan akan seragam cenderung sepi. Oleh karena itu mereka memiliki kesulitan dalam pengembalian modal usaha yang harus dicicil setiap bulan, karena pendapatan mereka menurun pada bulan-bulan yang sepi order.

- b. Usaha konveksi dimiliki oleh pemodal besar atau juragan, sedangkan warga di kelurahan Sukawana hanya bekerja sebagai buruh pada Juragan pemilik konveksi. Upah mereka diperoleh dari tiap potong pakaian yang mereka hasilkan, jadi pada saat permintaan besar pendapatan mereka besar sedang pada saat permintaan sepi pendapatan mereka pun kecil, bahkan bila pemilik konveksi tidak memproduksi karena tidak ada pesanan, mereka menganggur tanpa penghasilan.
- c. Pelatihan yang telah dilakukan tidak tuntas dan tidak berjalan maksimal, karena hanya pengetahuan dasar saja yang diberikan sedangkan untuk praktik kurang karena mesin jahit hanya satu, sehingga mereka harus bergantian. Bagi peserta pelatihan menjahit yang telah selesai mengikuti pelatihan tidak diberikan sertifikat. Sehingga setelah selesai pelatihan mereka tidak dapat melamar pekerjaan di pabrik-pabrik yang membutuhkan bukti dari keterampilan menjahit yang dia miliki.

Pelaksanaan FGD di Desa Banten dihadiri oleh 16 orang perwakilan dari masing-masing RT. Kesimpulan dari FGD ini adalah :

- a. Jenis usaha masyarakat di desa Banten cukup beragam, seperti pedagang, buruh, bangunan, tukang ojek dan lain-lain. Namun pada umumnya masyarakat Banten yang berada di pesisir pantai adalah menjadi nelayan. Nelayan sendiri terdiri dari nelayan yang melaut mencari ikan dan

dan nelayan rajungan, yang menggunakan bubuh sebagai alat tangkap rajungan. Permasalahannya alat tangkap rajungan atau bubuh ini harus dibeli dari Cirebon. Sementara kebutuhan bubuh cukup besar satu orang membutuhkan kurang lebih 200 buah bubuh untuk menangkap rajungan dan masa guna bubuh kurang lebih tiga bulan. Di desa Banten ada seorang pengrajin bubuh, tetapi produksinya hanya sedikit karena keterbatasan modal.

- b. Terdapat bantuan modal dari pemerintah namun tidak merata. Bantuan berupa kapal motor motor telah diberikan pemerintah sebanyak 2 buah, namun karena tidak ada kesepakatan siapa yang akan menerima bantuan tersebut, maka kapal motor tersebut dijual kemudian hasil penjualan dibagi-bagikan secara merata kepada masyarakat.
- c. Selain bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan terkait dengan usaha nelayan. Masyarakat yang berada di pesisir pantai meminta bantuan untuk pembibitan pohon bakau. Dengan pembibitan yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok masyarakat yang ada disana, maka permasalahan abrasi yang terjadi ketika laut pasang bisa diantisipasi.

Dalam sebuah wawancara dengan salah satu peserta FGD di Desa Sukawana menjelaskan bahwa :

“Sebagian besar keluarga miskin yang ada di Desa Sukawana memiliki usaha konveksi kecil-kecilan bahkan bisa disebut dengan usaha yang sifatnya musiman. Hasil jahitannya dalam bentuk seragam sekolah. Saya sendiri sudah sepuluh tahun menjalankan usaha tersebut, namun perkembangannya begitu-begitu aja..persoalan yang kami ahadapi adalah lemahnya pemasaran dan modal usaha yang pas-pasan, biasanya ramennya hanya pada bulan juli agustus..setelah itu sepi..sehingga dalam setiap tahunnya hanya dua bulan

tersebut yang ramai, sedangkan sepuluh bulan selanjutnya sepi orderan”.

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Desa Banten. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu warga di Desa Sukawana menjelaskan bahwa :

“Di Desa Banten sebenarnya memiliki banyak jenis usaha yang bisa dikembangkan antara lain: pengembangan alat tangkap rajungan (bubuh), pengembangan hasil keterampilan anyaman dari enceng gondok, dan makan yang terbuat dari bahan ikan. Problem yang kami hadapi adalah cara pembuatan dan pengelolaan yang masih terbatas serta modal yang sangat terbatas.”

Kemudian salah seorang peserta lain menjelaskan:

“ Bubuh merupakan salah satu usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan di Desa Banten. Selama ini para nelayan kepiting mendatangkan alat tangkap kepiting tersebut dari Cirebon dengan harga satuannya Rp. 13.000.. Dalam prakteknya setiap nelayan bisa menggunakan 200 sampai dengan 300 bubuh..Bayangkan kalo kita bisa membuat sendiri, pasti akan sangat menguntungkan dan memudahkan nelayan untuk menangkap kepiting lebih banyak. Karena keterbatasan modal, sampai saat ini belum ada yang mengembangkannya.”

Dari hasil FGD tersebut dapat kami simpulkan terkait dengan pola perilaku mencari nafkah di kedua desa tersebut antara lain:

- 1) Pola pengembangan keterampilan yang masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan hanya berkisar kepada satu jenis usaha yang diketahui oleh keluarga miskin tersebut. Mereka tidak berusaha untuk mengembangkan produk usaha yang memiliki daya jual yang lebih tinggi. Seperti halnya di Desa Sukawana yang memiliki keterampilan menjahit yang produknya hanya baju seragam. Tentunya produk hasil jahitannya tersebut hanya bersifat musiman yang jatuh pada bulan Juli dan Agustus. Sebagai solusi

alternatifnya adalah mengembangkan diversifikasi produk yang tidak hanya kepada jenis seragam sekolah saja melainkan perlu mencoba untuk menghasilkan produk jahitan pada jenis baju lainnya. Artinya perlu ada pengembangan keterampilan menjahit untuk menghasilkan produk jahitan yang lebih variatif.

- 2) Adanya keterbatasan modal. Bagi keluarga miskin yang ada di dua desa tersebut, modal menjadi kendala yang sangat serius untuk menunjang usaha keluarga. Meskipun mereka sebenarnya memiliki keterampilan pada jenis usahanya masing-masing, akan tetapi masih terkendala oleh modal yang sangat terbatas. Sampai saat ini belum ada yang memiliki keberanian untuk berinvestasi untuk lebih meningkatkan usaha masyarakat yang ada di kedua desa tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Desa Banten, khususnya jenis usaha penangkapan kepiting dengan alat tangkapnya yang diberi nama bubuh. Keberadaan alat tangkap bubuh merupakan sesuatu yang potensial untuk dikembangkan, karena sebagian besar nelayan membutuhkan jumlah yang sangat banyak untuk menangkap kepiting, sedangkan ketersediaan alat tangkapnya masih sangat terbatas. Dengan demikian sangat diperlukan adanya pelatihan pembuatan alat tangkap bubuh serta adanya penyertaan modal, baik dari pihak masyarakat di Desa Banten ataupun pihak-pihak swasta atau pemerintah.
- 3) Adanya keterbatasan pemasaran produk usaha. Bagi keluarga miskin yang ada di dua desa tersebut, manajemen pemasaran yang mereka miliki masih sangat terbatas dikarenakan mereka tidak memiliki akses informasi yang memadai untuk memasarkan produk usahanya tersebut. Adanya keterbatasan pemasaran tersebut mengakibatkan mereka belum mampu meningkatkan asset usaha yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan merekapun masih

sangat terbatas. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan mengenai manajemen pemasaran yang modern yang diharapkan mampu membuka akses bagi pengenalan hasil produk usaha bagi kalangan di luar masyarakat di dua desa tersebut.

Kehidupan keluarga miskin di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten Kota Serang di atas mengakibatkan kehidupannya yang terbelakang baik secara sosial, ekonomi maupun politik; secara sosial mereka tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki modal sosial yang memadai untuk dapat bersaing dengan masyarakat lainnya yang memiliki modal sosial dan modal ekonomi yang besar di kota Serang.

Rendahnya tingkat pendapatan keluarga miskin tersebut, kemudian berdampak terhadap rendahnya kesejahteraan mereka dan menempatkan mereka sebagai masyarakat yang tingkat kemandiriannya tergolong rendah. Artinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebenarnya mereka masih sangat membutuhkan uluran tangan serta bantuan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan ekonomi yang lebih, misalnya saja orang kaya, pihak pemerintah, pihak swasta dan lain sebagainya. Tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut, menjadikan mereka semakin tidak berdaya dan dalam kondisi yang sangat kekurangan. Dengan demikian guna membangun kemandirian keluarga miskin kota tersebut, sangatlah perlu ditunjang oleh proses pemberdayaan yang intensif bagi anggota keluarga miskin tersebut.

Secara teoritis proses pemberdayaan bagi keluarga miskin secara umum sangat bergantung pada dua hal yaitu 1) kekuatan yang ada pada internal (anggota keluarga itu sendiri); 2) perlunya intervensi dari kekuatan eksternal yaitu kekuatan yang ada di luar dari dirinya tersebut. Kekuatan yang ada pada dirinya menyangkut segala potensi yang

dimiliki oleh anggota keluarga tersebut misalnya tingkat motivasi, keterampilan, kebutuhan, pengetahuan, sikap mental, dan sebagainya. Sedangkan kekuatan yang berasal dari luar dirinya terkait dengan adanya bantuan atau stimulus yang mendorong mereka untuk lebih berdaya antara lain bantuan uang, bantuan alat dan sarana prasarana, kemampuan beradaptasi, kemampuan organisasi dan sebagainya.

Pola pemberdayaan yang selama ini dilakukan, baik oleh pihak pemerintah, pihak swasta ataupun oleh pihak-pihak lainnya lebih menekankan dan menitikberatkan kepada program *charity* (sumbangan, bantuan dan amal) atau lebih kepada program *how to give something* seperti halnya Program Bantuan langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah, bantuan sarana prasarana, bantuan lahan dan perumahan dan sebagainya. Di sisi lain lain maasih jarang sekali program pemberdayaan keluarga miskin tersebut yang berwujud *How to empowering* keluarga miskin tersebut agar terbebas dari ketidakberdayaannya tersebut.

Pola-pola pemberdayaan dalam bentuk *charity* tersebut sangatlah memungkinkan untuk menuai kegagalan. Dalam prakteknya pola tersebut hanya akan membantu keluarga miskin tersebut dalam jangka waktu pendek. Setelah bantuan tersebut habis maka mereka (keluarga miskin) akan kembali menjadi miskin dan tidak berdaya.

Salah satu pola pemberdayaan keluarga miskin yang dinilai mampu memberikan kontribusi dalam jangka panjang adalah melalui Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial sesuai dengan konsep pembangunan masyarakat. Strategi pemberdayaan melalui Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten selama ini jarang disentuh. Padahal kita tahu bahwa melalui Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Keurahan

Sukawana dan Desa Banten tersebut, akan memiliki potensi untuk mamampukan mereka di dalam memecahkan problematika hidup yang selama ini mereka hadapi, khususnya dalam merubah pola mencari nafkah agar menjadi lebih professional dengan menggunakan tehnologi yang lebih modern.

Asumsi yang dibangun adalah melalui Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten akan lebih menciptakan kemandirian bagi keluarga miskin, khususnya keluarga miskin yang ada di Kota Serang. Melalui Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Desa Sukawana dan Desa Banten, program-program pemberdayaan bagi masyarakat miskin tersebut akan lebih terencana, terprogram dan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Hal yang terpenting dalam pendekatan Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten tersebut bahwa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberdayaan tersebut dilakukan secara mandiri oleh kelompok-kelompok dari anggota keluarga miskin tersebut. Pihak-pihak lainnya hanya bersifat sebagai fasilitator dan mediator semata.

Dalam Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten, sangatlah ditentukan oleh adanya ketahanan kelompok tersebut. Oleh karena itu kelompok-kelompok usaha menjadi prioritas di dalam menjalan program tersebut. Artinya implementasi Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten dimulai dengan adanya pembentukan kelompok percontohan yang mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak terkait sampai dengan mereka berhasil secara mandiri untuk menghasilkan produk

usaha andalan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka masing-masing. Di dalam menciptakan ketahanan kelompok tersebut, sangatlah ditentukan oleh aspek-aspek internal kelompok dan organisasional antara lain: adanya kepemimpinan yang kuat, motivasi anggota yang tinggi, dinamika kelompok yang tinggi, komunikasi antar kelompok yang intensif serta masih banyak lagi faktor lainnya yang menentukan ketahanan kelompok tersebut. Oleh karena itu proses pelatihan dan pendampingan terhadap keberadaan kelompok-kelompok usaha tersebut dilakukan secara terus menerus.

Apabila semua aspek yang berkaitan dengan implemementasi Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Desa Sukawana dan Desa Banten tersebut mulai dari faktor eksternal, faktor internal serta aspek organisasional di atas berjalan secara kondusif maka akan menjamin adanya keberhasilan usaha keluarga yang tinggi. Melalui keberhasilan usaha keluarga yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi terhadap tingkat kesejahteraan keluarga miskin yang ada di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten.

Analisis Masalah

Berdasarkan analisis situasi di atas terdapat beberapa permasalahan pokok yang perlu dipecahkan melalui Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten antara lain:

1. Terbatasnya akses terhadap modal yang terbatas, baik dari pemerintah maupun dari sumber lain dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan.
2. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin dalam mengidentifikasi, mengolah dan memanfaatkan sumber dan potensi yang ada baik fisik maupun non fisik (peluang).

3. Terbatasnya kemampuan para keluarga miskin di dalam membangun jaringan kerja (*net working*) kelompok baik diantara keluarga miskin sendiri atau program kemitraan dengan pihak pemerintah ataupun dengan pihak swasta.
4. Terbatasnya kemampuan dalam membangun kemitraan usaha baik dalam rangka pengembangan modal maupun dalam rangka pemahaman usaha.
5. Terbatasnya akses terhadap informasi dan transformasi, sehingga mampu mendapatkan jenis pekerjaan yang lebih layak.

Analisis Tujuan

Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan di atas, terdapat beberapa tujuan dari Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten antara lain:

1. Akses terhadap modal dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas keluarga miskin sebagai anggota kelompok serta mendapatkan jenis pekerjaan yang layak guna meningkatkan pendapatan yang lebih baik.
2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga miskin dalam mengidentifikasi, mengolah dan memanfaatkan sumber dan potensi yang ada baik fisik maupun non fisik (peluang) bertujuan agar keluarga miskin sebagai anggota kelompok mampu merubah etos kerja (perilaku) bekerja yang lebih baik.
3. Peningkatan kemampuan para keluarga miskin di dalam membangun jaringan kerja (*net working*) kelompok baik diantara keluarga miskin sendiri atau program kemitraan dengan pihak pemerintah ataupun dengan pihak swasta bertujuan untuk membangun soliditas kelompok dalam menetapkan jenis pekerjaan dan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok dan keluarganya masing – masing.

4. Peningkatan kemampuan dalam membangun kemitraan usaha baik dalam rangka pengembangan modal maupun dalam rangka pemahaman usaha bertujuan untuk mengembangkan jenis usaha bersama kelompok, memudahkan di dalam mencari peluang usaha serta mendistribusikan hasil dari usaha kelompok tersebut.
5. Peningkatan akses terhadap informasi dan transformasi, sehingga mampu menentukan beberapa alternatif usaha; mampu mengambil keputusan terbaik dari beberapa alternatif tersebut; serta mampu menjalankan jenis usaha secara baik dan benar.

Analisis Cara Pelaksanaan Program

Dalam analisis pelaksanaan Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten lebih menekankan kepada bagaimana persiapan yang harus dilaksanakan sehingga Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam persiapan program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan teknis antara lain: orientasi dan observasi, kegiatan FGD (*focus group discussion*), penyuluhan sosial, identifikasi dan seleksi, dan bimbingan sosial. Selanjutnya tiap-tiap kegiatan teknis tersebut akan dijelaskan masing - masing.

Tahap Persiapan

Di dalam tahap persiapan terdapat beberapa kegiatan antara lain:

1. Orientasi dan observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui kunjungan lapangan dengan melihat secara langsung kehidupan dan lingkungan keluarga miskin yang ada di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten, seperti: kehidupan budaya, adaptasi kebiasaan, potensi dan sumber daya yang dimiliki, akses ekonomi, sarana prasarana dan sebagainya.

2. Kegiatan Focus Group Discussion (curah pendapat) yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan kelompok-kelompok yang terdiri dari keluarga miskin yang ada di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten dengan maksud untuk mengidentifikasi kebutuhan (*needs assessment*) serta potensi yang ada pada masing-masing desa tersebut
3. Penyuluhan sosial adalah suatu kegiatan awal yang ditujukan kepada keluarga miskin dalam rangka memberikan pengertian, meningkatkan kesadaran, motivasi dan kemauan para keluarga miskin untuk terlibat secara sungguh-sungguh dalam program pemberdayaan yang akan dilakukan serta dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Secara teknis kegiatan ini dilakukan oleh instansi terkait dengan Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial, dalam hal ini dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Serang serta Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Catatan Sipil (Disduknapercapil) Kota Serang.
4. Identifikasi dan seleksi, adalah kegiatan awal untuk mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota kelompok usaha dengan menggunakan instrument yang sudah ada. Kegiatan ini dilakukan oleh pendamping untuk diusulkan dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Serang. Materi pelatihan yang akan dilaksanakan berbeda antara Kelurahan Sukawana dan Desa Banten. Khusus di Kelurahan Sukawana, materi pelatihan yang dipilih adalah materi menjahit, sedangkan untuk Desa Banten materi yang dipilih adalah keterampilan mengelas dengan maksud untuk membuat bubuh (alat tangkap kepiting). Waktu

yang dihabiskan dalam kegiatan pelatihan keterampilan tersebut selama satu bulan.

5. Bimbingan sosial dasar adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para keluarga miskin terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial para keluarga miskin dalam kaitannya dengan program pemberdayaan fakir miskin yang ditawarkan. Kegiatan pembimbingan ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendamping dengan maksud untuk melakukan supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap praktek kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok usaha. Kegiatan supervisi tersebut terkait dengan keterampilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, manajemen kelompok dan manajemen pemasaran terhadap kelompok-kelompok usaha.

Tahap Implementasi Kegiatan

Tahap implementasi kegiatan merupakan tahap lanjutan dari kegiatan tahap perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini lebih banyak menekankan kepada penguatan kelompok-kelompok usaha yang ada di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten. Kegiatan Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada akhirnya menekankan kepada penguatan kelompok. Karena kelompok-kelompok usaha inilah yang akan menjalankan segala program yang sudah ditentukan pada tahapan perencanaan di atas. Dengan demikian beberapa kegiatan teknis pada tahap implementasi kegiatan ini antara lain: pembentukan kelompok, pengorganisasian, pendampingan, dan pengembangan kelompok.

Pembentukan Kelompok

Pembentukan kelompok merupakan suatu kegiatan bergabungnya beberapa orang dari keluarga miskin dalam satu kelompok dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kelompok mulai dari merencanakan kegiatan usaha, melaksanakan kegiatan usaha, sampai dengan mengevaluasi kegiatan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga masing-masing. Keberadaan kelompok usaha ini merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam pembentukan kelompok usaha di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten antara lain:

- (1) Penyusunan instrumen seleksi dan identifikasi sebagai alat atau instrumen pendataan dan seleksi awal anggota kelompok bersama yang dilakukan oleh penyuluh atau pendamping.
- (2) Seleksi dan identifikasi calon anggota kelompok untuk mendapatkan data sasaran yang menjadi sasaran program ini yang dilaksanakan oleh penyuluh atau tim pengembang.
- (3) Analisis hasil identifikasi dan seleksi untuk mendapatkan sasaran yang akan menjadi anggota kelompok dan data yang akurat yang berkaitan dengan kelompok sasaran dilaksanakan oleh penyuluh atau tim pengembang.
- (4) Pertemuan sosialisasi program pemberdayaan keluarga miskin yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh penyuluh atau tim pengembang dengan menghadirkan semua anggota kelompok yang telah diseleksi. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan program yang ditawarkan sekaligus untuk meminta keterlibatan anggota kelompok secara penuh dalam pelaksanaan program tersebut.
- (5) Pelatihan bagi calon anggota kelompok dalam rangka meningkatkan keterampilan – keterampilan teknis yang

terkait dengan keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan kelompok .

Dalam pembentukan kelompok usaha tersebut diperlukan adanya suatu komitmen dan motivasi yang kuat dari masing-masing anggotanya. Hal ini sangat penting, karena berjalannya usaha kelompok tersebut sangat ditentukan oleh sejauhmana kerjasama anggota kelompok tersebut dalam menjalankan rencana kegiatan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota kelompoknya tersebut.

Dalam perancangan Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten dibentuk kelompok usaha yang terdiri dari 2 (dua) kelompok, antara lain:

- (1) Untuk Kelurahan Sukawana dibentuk 1 kelompok yang bergerak di bidang penjahitan pakaian dengan anggota sebanyak tiga orang.
- (2) Untuk Desa Banten juga dibentuk dua kelompok yang bergerak di bidang pembuatan alat tangkap kepiting 1 kelompok dengan anggota sebanyak 3 orang.

Dari kelompok yang telah dibentuk tersebut diarahkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Serang dan setelah melakukan pelatihan, kelompok tersebut mencoba membuka usaha bersama sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok yang ada di Kelurahan Sukawana menjalankan usaha kelompok jahit, sedangkan kelompok yang ada di Desa Banten menjalankan usaha pembuatan alat tangkap kepiting (bubuh).

Agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar, maka sangat diperlukan penyertaan modal serta dibutuhkan sarana-prasarana yang dapat menunjang keberhasilan program tersebut. Penyertaan modal usaha dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga

Kerja Kota Serang melalui program Kube (Kelompok Usaha Bersama).

Salah satu hasil wawancara dengan Bapak Reza dari Disdukcapilnaker terungkap bahwa:

“Program Kube merupakan program bantuan dana bagi usaha kelompok yang sifatnya bergulir. Penyertaan modal usaha ini diberikan kepada kelompok usaha masyarakat miskin yang memiliki potensi dan prospek yang sangat menjanjikan. Keberadaan program ini akan selalu dievaluasi oleh Disdukcapil bekerja sama dengan pendamping guna menilai progress report dari masing-masing kelompok tersebut.”

Selanjutnya Bapak Reza mengungkapkan bahwa:

“Keberhasilan kelompok yang mendapatkan bantuan Program Kube ini akan menjadi percontohan bagi terbentuknya kelompok lain yang sejenis. Untuk tahun ini dan tahun 2011, Desa Banten mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan bantuan melalui Program Kube tersebut.”

Khusus Kelurahan Sukawana, sebagai bentuk stimulus dari penyelenggaraan Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin adalah memberikan bantuan mesin jahit berikut perlengkapannya. Dengan adanya bantuan mesin jahit, diharapkan tiap-tiap kelompok mampu merealisasikan hasil pelatihan yang sudah diberikan oleh BLK Kota Serang. Harapannya tidak adalah adanya pengembangan jenis produk usaha yaitu hasil jahitan yang lebih bervariasi. Maksudnya adalah produk hasil jahitannya tidak saja dalam bentuk seragam sekolah saja, melainkan jenis pakaian lainnya dengan pola dan model yang mengikuti perkembangan mode. Hal tersebut bertujuan agar menjadi daya tarik masyarakat, tidak saja masyarakat di Desa Sukawana melainkan masyarakat di luar Kelurahan Sukawana, bahkan pemilik modal yang mampu menampung dan memasarkan produk hasil jahitannya tersebut.

Pendampingan Kelompok

Kegiatan pendampingan yang selama ini berjalan di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten belum berjalan secara efektif. Beberapa hal yang menyebabkan belum efektifnya kegiatan pendampingan terhadap kelompok usaha yang ada di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten adalah sebagai berikut:

- (1) Adanya keterbatasan waktu dalam kegiatan pendampingan. Waktu pendampingan terhadap kelompok usaha di kedua desa tersebut baru berjalan sekitar satu bulan. Dengan demikian diperlukan waktu yang longgar dalam kegiatan pendampingan, sehingga kegiatan usaha kelompok dapat berjalan secara efektif.
- (2) Materi pendampingan masih berkisar pada hal-hal yang sifatnya umum dan belum menyangkut hal-hal yang sifatnya spesifik. Idealnya kegiatan pendampingan kelompok sudah menyangkut kegiatan teknis usahanya. Dengan demikian diperlukan keahlian khusus bagi tenaga pendamping untuk memberikan materi pendampingan yang lebih bersifat teknis. Misalnya saja kegiatan pendampingan yang khusus terkait dengan kegiatan menjahit di Kelurahan Sukawana, atau pendampingan yang terkait dengan pembuatan alat tangkap kepiting (bubuh) di Desa Banten.

Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan menilai hasil dari implementasi Monitoring dan Evaluasi Program Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial pada keluarga miskin di Desa Sukawana dan Desa Banten.

Monitoring

Monitoring (pemantauan) adalah kegiatan penelusuran terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin melalui pemberdayaan kelompok secara untuk

mengetahui secara dini apabila ada permasalahan, yang hasilnya dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan kelompok agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal dan mencapai hasil sesuai rencana.

Kegiatan Pemantauan yang dilakukan terhadap kelompok usaha yang ada di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten antara lain:

- a. Menilai kondisi dan situasi saat itu tentang tahapan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin melalui proses pemberdayaan kelompok, mulai dari rencana kegiatan sampai dengan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Memperkirakan akibat yang akan terjadi dengan adanya kegiatan penanganan keluarga miskin melalui pola pemberdayaan kelompok.
- c. Mencari dan mengupayakan cara untuk perbaikan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin melalui pola kelompok yang dianggap tidak tepat.

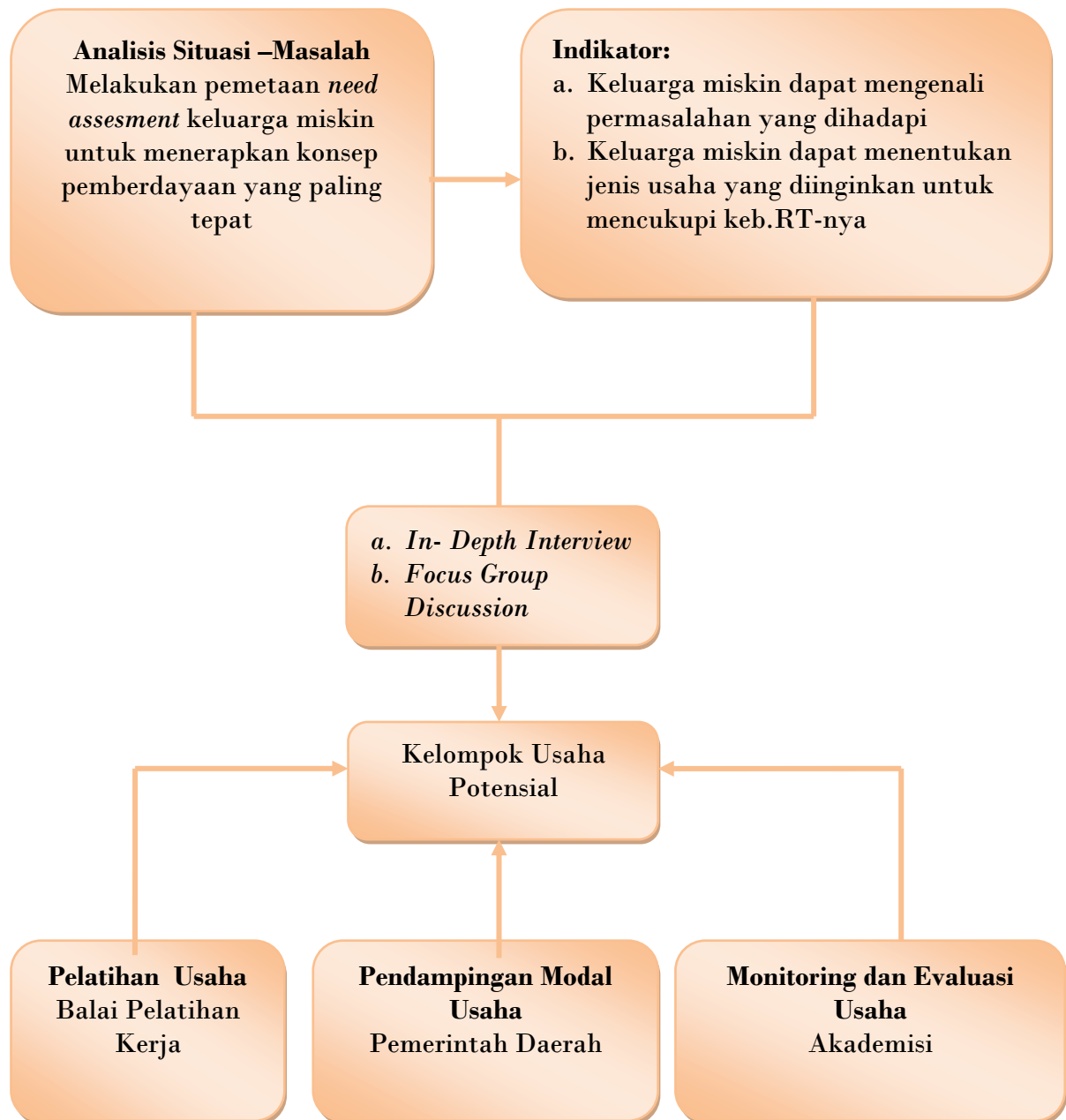
Evaluasi

Kegiatan evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin melalui pola pendekatan kelompok mengenai keberhasilan kemitraan dan kendala atau hambatan - hambatan yang terjadi pada tahap - tahap pelaksanaan sampai dengan perluasan jaringan kemitraan usaha.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan terhadap kelompok yang ada di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten antara lain:

- a. Penyiapan instrument evaluasi, tabulasi dan laporan evaluasi
- b. Penentuan petugas evaluasi
- c. Pelaksanaan evaluasi dengan wawancara, pengisian instrument dan diskusi
- d. Laporan evaluasi menggunakan instrument laporan.

Keberhasilan program pemberdayaan keluarga miskin melalui program pendampingan usaha kesejahteraan sosial di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten Kota Serang sangat ditentukan oleh banyak pihak yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap program ini. Oleh karena itu dukungan dan partisipasi berbagai pihak merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan dari program pemberdayaan keluarga miskin melalui penerapan konsep pembangunan masyarakat. Pemberdayaan keluarga miskin di Kelurahan Sukawana dan Desa Banten Kota Serang merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang bernuansa kerakyatan untuk mengangkat harkat dan martabat kalangan keluarga miskin agar kesejahteraannya meningkat. Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta kalangan LSM. Tanggung jawab bersama ini harus diwujudkan dalam bentuk yang mencerminkan kerja sama yang setara (kemitraan) yang sinergis antara berbagai komponen terkait sehingga dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin khususnya di Kota Serang.



Kesimpulan

1. Model Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial merupakan model pemberdayaan keluarga miskin yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan bersifat adaptif yang berbeda dengan model-model yang selama ini diterapkan oleh pihak pemerintah. Model

Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial bersifat “*bottom up*” yang dimulai dari beberapa kegiatan antara lain: tahap perencanaan program, tahap implementasi program dan tahap evaluasi program.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Model Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial antara lain: (a) Waktu perancangan Model Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial masih terlalu sempit; (b) Keterlibatan dari pihak-pihak eksternal seperti pihak pemerintah dan swasta masih sangat kurang ; (c) Rendahnya penyertaan modal dari pihak-pihak eksternal terhadap kelompok-kelompok usaha percontohan, baik yang ada di Desa Sukawana maupun Desa Banten; dan (d) Bagi kelompok-kelompok usaha belum memiliki kepercayaan yang tinggi, serta kemampuan pemasaran terhadap produk-produk usaha masih sangat terbatas.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang disampaikan di atas, beberapa saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Penerapan Model Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial memerlukan waktu yang cukup mulai dari tahap perencanaan program sampai dengan evaluasi program. Waktu yang dibutuhkan dalam penerapan Model Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial adalah tiga tahun.
2. Diperlukan keterlibatan aktif dari pihak-pihak eksternal dalam menunjang implementasi Model Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bimbingan

Usaha Kesejahteraan Sosial khususnya dari pihak-pihak pemerintah dan swasta.

3. Diperlukan adanya penyertaan modal yang sifatnya produktif untuk menunjang usaha dari masing-masing kelompok, baik di Desa Sukawana dan Desa Banten. Penyertaan modal yang sifatnya produktif maksudnya bersifat bergulir dan dapat diikuti kelompok-kelompok usaha lainnya.
4. Bagi kelompok-kelompok usaha yang ada di Desa Sukawana dan Desa Banten diperlukan adanya manajemen kelompok yang modern, mulai dari pengembangan manajemen kelompok serta mengembangkan manajemen pemasaran yang lebih professional.

Rekomendasi

Mempelajari hasil penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan ada penelitian lanjutan yang akan menyelesaikan beberapa kendala dalam pelaksanaan model ini. Penelitian lanjutan yang dilakukan bertujuan khusus yaitu menerapkan model pemberdayaan yang telah dirancang secara nyata dan berkelanjutan, dengan melibatkan *stakeholder* di wilayah Kota Serang.

Daftar Pustaka

- Ardle, Marc.1989. *Human Behavior, Communities, Organizations & Groups in Macro Social Environment. An Empowerment Approach*. Wadworth: Cale Book.
- Chamber, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.

- Dharmawan, A. Hadi, 2002. *Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan*, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Ilmu Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Heru Nugroho, 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan. Dalam Kemiskinan dan Kesejangan di Indonesia*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Hikmat Gunawan. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Paul, Hawkins. 1987. *Agricultural Extension*. New York: John Willey & Son, Inc.
- Payne, Robert. 1997. *Sociology*. New York: Alfred A. Knopf
- Rappaport, Frederick. 1987. *Business and Society Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. New York: McGraw-Hill Publishing Company
- Robinson, Brent D. 1994. *Community Development Strategics*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS
- Suharto, Edi dkk., (2004), *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKSPress
- Sulistiyani, Ambar T. 2004. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta Penerbit: Ghava Media

**PERSPEKTIF KOMUNIKASI DALAM KONFLIK
AGAMA DI BANTEN**
(Studi Kasus Pada Bentrok Warga dengan Jamaah
Ahmadiyah di Cikeusik-Banten)

Oleh : Iman Mukhroman

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk komunikasi (*homo communicare*), kita sebagai manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Pada setiap langkah kehidupan manusia, harus selalu melakukan komunikasi. Manusia melakukan komunikasi mulai dari ketika ia dilahirkan hingga akhir hidupnya. Dalam melakukan suatu proses komunikasi, pesan (*message*) menjadi suatu hal yang penting bagi keefektifan komunikasi di antara komunikator dengan komunikan.

Terjadinya bentrok warga dengan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang-*Provinsi Banten* pada tanggal 06 Februari 2011 yang lalu, menjadi *headline news* di hampir seluruh surat kabar nasional dan menjadi liputan utama berbagai stasiun

televisi. Hampir seluruh media memberitakan bahwa Ahmadiyah diserang ataupun diserbu oleh ratusan warga. Kejadian ini bahkan melahirkan elemen rakyat saling caci maki dan saling menyalahkan. Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengakui adanya penggerak dalam kasus penyerangan. Namun ia enggan menyebutkan identitasnya. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Nasional juga mengatakan, temuan awal mengandung “rekayasa”.

Terkait dengan berita tersebut di atas, media memainkan peran dan mengkonstruksi berita ini, dan menambah frekuensi pemberitaan di hampir semua media elektronik dan cetak. Dan melebih-lebihkan pemberitaan untuk mengambil kesan “dramatis” dan bertujuan mengkonstruksi suatu realitas sosial melalui pemberitaannya, yang mana akhirnya berkembang menjadi opini publik. Dalam hal ini, sesungguhnya dibalik realitas yang terjadi, terdapat kalangan dominant di balik media tersebut (kaum elit) yang memiliki kepentingan atas pemberitaan dari media yang mereka miliki. Selain media yang memainkan peran mengkonstruksi realitas, juga bagaimana warga dan jamaah Ahmadiyah mengorganisasikan pikirannya dalam memproduksi pesan sehingga muncul bentrokan tersebut. Inilah yang akan ditelaah lebih dalam meski dalam situasi yang serba terbatas. Dalam hal ini yang jadi concern dalam tulisan singkat ini adalah bagaimana perspektif komunikasi khususnya teori produksi pesan (*Theories of Message Production*) dalam Konflik Agama di Banten pada kasus bentrok warga dengan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang, Banten.

Perspektif Komunikasi

Dalam Miller (2005:105-118) dinyatakan bahwa yang termasuk lingkup *Theories of Message Production* adalah *Constructivist Theory*; *Action Assembly Theory*; dan *Planning and Goals*. Sementara dalam Littlejohn (2008) tidak secara tegas

dijelaskan mengenai *Theories of Message Production*, yang mana pada chapter 5 mengenai The Message dalam Tradisi Sosiopsikologi (Littlejohn & Foss, 2008:119-123), ditemukan yang kiranya relevan dengan yang dikatakan oleh Miller adalah *Action Assembly Theory* dan *Constructivism Theory*.

Teori *konstruktivis* berkaitan dengan proses kognitif seseorang yang melakukan pada situasi tertentu. Kemampuan orang dalam menyusun atau meringkaskan pesan-pesan untuk situasi dan kondisi tertentu relatif akan lebih berhasil dibandingkan dengan mereka yang melakukannya tanpa persiapan. Dalam hal ini, tentunya orang yang berbekal pengalaman kognitif yang kompleks akan lebih berhasil dalam berkomunikasi dibandingkan dengan yang melakukannya secara apa adanya. Sementara teori *action assembly* atau disebut juga teori kumpulan tindakan/penyusunan tindakan, menekankan bahwa setiap orang dalam menyampaikan suatu pesan harus bisa mengorganisasikan pengetahuannya serta memproses dengan pikiran dan menggunakannya untuk membentuk suatu pesan yang akan disampaikan.

Penggunaan kedua teori tersebut, kiranya relevan dengan kasus aktual yang akan dijadikan contoh kasus dalam paper tugas ini. Hal ini mengingatkan inti dari Teori Teori konstruktivis (*Constructivist Theory*) dan Teori Penyusunan Tindakan atau Kumpulan Tindakan (*Action Assembly Theory*) berorientasi pada suatu pertanggungjawaban teoritis baik secara lisan maupun tertulis dengan penetapan struktur teori dan proses yang mendasari semua produksi pesan dari seseorang komunikator dengan komunikan. Contoh kasus yang diambil terkait dengan kegagasan seseorang ataupun sekelompok orang dalam memproduksi pesan, sehingga menimbulkan masalah yang destruktif.

Teori Konstruktivis (Constructivist Theory)

Dalam Miller (2005:105) dinyatakan "*Constructivist theory, or constructivism, is a theoretical approach to communication developed in the 1970s by Jesse Delia and his colleagues*", yang artinya bahwa teori konstruktivis atau konstruktivisme adalah pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan tahun 1970-an oleh Jesse Delia dan rekan-rekan sejawatnya. Lebih lanjut Miller menyatakan "*Constructivisme has represented perhaps the most coherent research program in interpersonal communication since the 1970 as scholars have systematically mapped out theoretical terms and relationships, elaborated on underlying assumptions, and tested predictions of the theory in a wide range of message production situations*", yang artinya bahwa teori ini telah direpresentasikan dalam program penelitian yang paling banyak kaitannya dengan komunikasi antarpribadi sejak tahun 1970-an dan telah memetakan secara sistematis, perjanjian-perjanjian teoritis, dan hubungan antar relasi digabungkan dengan bermacam asumsi dan prediksi yang telah teruji dalam konteks yang luas dalam situasi produksi pesan.

Menurut Littlejohn (2008: 123) "*The theory says that individuals interpret and act according to conceptual categories in the mind. Reality does not present itself in raw form but must be filtered through a person's own way of seeing things*", yang artinya bahwa teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan bertindak menurut kategori konseptual yang ada dalam pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Lebih lanjut Littlejohn menyatakan "*constructivism is based partially on George Kelly's theory of personal constructs, which proposes that persons understand experience by grouping and distinguishing events according to similarities and difference*", yang artinya bahwa teori ini dibangun berdasarkan

teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly, yang menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya. Dalam hal ini Perbedaan yang terlihat tidak bersifat natural, tetapi perbedaan itu ditentukan oleh berbagai perangkat yang saling bertentangan (*sets of opposite*) yang ada dalam sistem kognitif seseorang.

Perangkat yang saling bertentangan seperti tinggi-pendek, panas-dingin, hitam-putih dan seterusnya yang digunakan untuk memahami peristiwa dan benda ini dinamakan *konstruksi personal*. Menurut teori konstruktivis, konstruksi personal diatur dan diorganisasikan ke dalam skema interpretatif yang akan mengidentifikasi suatu obyek dan menempatkan obyek itu ke dalam suatu kategori. Dengan skema interpretatif ini, kita juga dapat merasakan suatu peristiwa dengan menempatkannya ke dalam kategori yang lebih besar. Skema interpretatif ini berkembang seiring dengan tingkat kedewasaan seseorang, berpindah dari sifat awalnya yang sederhana dan umum menjadi bersifat lebih kompleks dan spesifik. Anak kecil memiliki sistem konstruksi pribadi yang sederhana, namun orang dewasa memiliki sistem konstruksi yang lebih rumit (Morrisan dan Wardhany, 2009:107).

Pada dasarnya konstruktivis mengakui bahwa konstruksi personal memiliki latar belakang sosial. Karenanya, konstruksi personal dapat dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Untuk itu, kebudayaan memiliki peran yang penting dalam menentukan makna suatu peristiwa. Dalam hal ini, budaya dapat memengaruhi bagaimana tujuan komunikasi ditentukan, bagaimana tujuan harus dicapai, sekaligus tipe konstruksi yang digunakan dalam skema kognitif. Meskipun teori ini mengakui efek interaksi sosial dan budaya dalam sistem kognitif, namun

teori ini lebih memusatkan pengamatannya pada berbagai perbedaan individu melalui kompleksitas konstruksi personalnya dan juga strategi yang digunakan dalam berkomunikasi.

Miller (2005:106) menyatakan *The constructivists approach to understanding message production begins with cognitive systems of individuals*, yang berarti konstruktivist melakukan pendekatan pemahaman produksi pesan dimulai dari sistem kognitif individu. Dalam hal ini, pendekatan pemahaman produksi pesan seseorang dilakukan dengan pengelompokan peristiwa menurut persamaan dan perbedaannya. Perbedaan ini menjadi dasar penilaian ihwal sistem kognitif individual yang bersifat pribadi dan karenanya berbeda dengan konstruksi sosial.

Terkait dengan hal di atas, konstruktivis meyakini bahwa sistem kognitif individu berkembang kompleks. Individu yang cerdas secara kognitif dapat membuat banyak perbedaan dalam satu situasi dibanding orang yang secara kognitif lemah. Inilah yang disebut *differensiasi kognitif*. Differensiasi ini mempengaruhi bagaimana pesan menjadi kompleks. Dalam Miller (2005) dan Littlejohn (2008), diceritakan bahwa *Jesse Delia* dan koleganya menyatakan hubungan antara kompleksitas kognitif dengan tujuan dari pesan. Pesan sederhana hanya memiliki satu tujuan sementara pesan kompleks memiliki banyak tujuan. Dalam komunikasi antarpersona pesan-pesan sederhana berupaya mencapai keinginan satu pihak saja tanpa mempertimbangkan keinginan orang lain. Sementara pesan kompleks dirancang memenuhi kebutuhan orang lain. Pada pesan kompleks inilah komunikasi antarpersona dapat tercipta.

Dalam Miller (2005:107) secara garis besar bisa dikatakan bahwa selain kompleksitas kognitif, komponen utama yang lain dari teori constructivist melibatkan pesan yang dihasilkan. Sekali lagi, beberapa teori dasar *constructivis propositions* menginformasikan tentang fitur komunikasi. Teori Bernstein

(1975) menyatakan bahwa individu dalam melakukan sesuatu dikonstruksi oleh orientasi kehidupannya sendiri dan oleh orientasi posisi subjek itu dalam hidupnya. Individu yang berbasis subjek akan menggunakan elaborasi kode yang menghargai kecenderungan, perasaan, dari sudut pandang orang lain. Sebaliknya, individu berbasis posisi akan menggunakan kode-kode terbatas yang mengikuti aturan dan norma-norma situasi kultural tertentu.

Morrison dan Wardhany (2009:109) menekankan bahwa konstruksi pribadi antara individu (*intepersonal construct*) menjadi lebih penting karena dapat memandu bagaimana kita memahami orang lain. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal tingkat kompleksitas yang akan digunakannya dalam memandang orang lain. Jika anda termasuk orang yang sederhana secara kognitif, maka anda akan cenderung untuk juga menyederhanakan setiap hal, anda akan cenderung untuk menilai secara pihak, misalnya, bahwa orang tertentu memiliki sifat tertentu karena mereka berasal dari suku, jenis kelamin atau kelas sosial tertentu (membuat stereotype). Sebaliknya, jika anda memiliki sistem kognitif yang lebih kompleks, maka anda cenderung untuk memiliki pengertian yang lebih besar terhadap perspektif orang lain dan memiliki kemampuan lebih baik untuk meringkaskan pesan sehingga lebih mudah dipahami orang lain. Kemampuan yang disebut dengan *perspectif taking* ini akan mengarahkan seseorang untuk memiliki argumen yang lebih canggih dan menimbulkan daya tarik pada dirinya. Dengan kata lain, sebagian orang tertentu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan tingkat komunikasinya terhadap tingkat komunikasi lawan bicaranya (*adjusting one's communication to others*). Orang yang memiliki kemampuan menyesuaikan tingkat komunikasinya dengan tingkat komunikasi lawan bicaranya ini disebut dengan istilah *person-centered communication* atau komunikasi terpusat pada orang.

Teori Penyusunan Tindakan (Action Assembly Theory)

Dalam Miller (2005:111) dinyatakan “*Action assembly theory was developed by John Greene (1984) and has been elaborated and tested since then by Greene and his colleagues. Proponents of action assembly theory have a goal very similar to that of constructivists “to provide a theoretical account of verbal and non verbal by specifying the cognitive structures and processes that underlie the production of those behaviors”*”, yang intinya bahwa teori ini dikembangkan oleh John Greene (1984) dan telah dijabarkan dan diuji oleh Greene dan rekan sejawatnya. Teori ini memiliki tujuan yang hampir sama dengan konstruktivis, utamanya yang berkenaan dengan pesan-pesan verbal dan nonverbal dalam menetapkan struktur kognitif dan proses yang mendasari bagaimana perilaku individu dalam memproduksi suatu pesan.

Merujuk pada Littlejohn (2008:119) teori ini berada dalam kelompok atau tradisi sosiopsikologi. Menurut *action assembly* memberikan perhatiannya pada bagaimana komunikator individu mengelola pesan. Berbagai riset dan teori yang berada dalam tradisi ini cenderung berorientasi kognitif yang menjelaskan bagaimana manusia mengintegrasikan informasi dan merencanakan pesan. Tradisi pemikiran yang bersumber pada psikologi sosial ini berupaya mengamati pada berbagai pilihan dan strategi individu untuk mencapai berbagai tujuan pesan yang tertanam secara internal di dalam individu. Beberapa teori dalam tradisi ini melihat berbagai perbedaan individu dalam hal bagaimana kecenderungan atau orientasi individu dalam merencanakan dan mendesain pesan mereka.

Sebuah pesan tidak lahir begitu saja, tapi melewati suatu proses tertentu yang, sadar atau tidak akan turut berpengaruh pada orang yang membuat pesan, sehingga pesan dapat beragam pada setiap individu. *Action Assembly Theory* menjelaskan tentang cara seseorang mengorganisasikan

pengetahuan dengan pikiran dan menggunakannya untuk membentuk pesan. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan mengenai apa yang sesungguhnya dialami manusia untuk menghasilkan tindakan komunikasi.

Dalam teori ini, Greene berpendapat bahwa manusia membentuk pesannya dengan menggunakan apa yang disebut dengan pengetahuan isi (*content knowledge*); dan pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*). Orang mengetahui mengenai sesuatu yang merupakan pengetahuan isi, dan orang mengetahui bagaimana melakukan sesuatu yang merupakan pengetahuan prosedural. Dalam teori ini, pengetahuan prosedural berada ditengah-tengah atau di pusat (Morrisan dan Wardhany, 2009:102).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Morrisan dan Wardhany (2009:102-103) bahwa untuk mendapatkan gambaran seperti apakah bentuk pengetahuan prosedural ini, kita dapat membayangkan ingatan anda dipenuhi dengan elemen ingatan yang saling berhubungan. Setiap elemen ingatan disebut dengan node atau simpul yang terhubung satu sama lainnya, mirip seperti suatu situs web (*website*) yang terhubung dengan jaringan internet. Pengetahuan prosedural terdiri atas elemen ingatan yang berhubungan dengan perilaku, konsekuensi, dan situasi. Misalnya, seseorang mungkin akan tersenyum ketika orang itu menyapa seorang rekan dan mengatakan, "Hallo, apa kabar ? Kemudian, orang lain itu menyapa balik dan mengatakan , "Baik, apa kabar ?". Dalam hal ini, kita menyimpan peristiwa dalam ingatan sebagai seperangkat elemen ingatan yang saling berhubungan dimana terdapat hubungan antara situasi menyapa, senyuman, penggunaan kata-kata, dan penerimaan sapaan balasan. Walaupun contoh yang digunakan sangat sederhana, namun jaringan elemen ingatan anda selalu berubah dalam suatu sistem yang kompleks, namun bukan berarti tidak terorganisasi.

Pada kasus yang lebih kompleks, hal-hal yang saling berkaitan semacam itu, di mana pada prosedur tertentu terdapat hubungan yang paling sering digunakan atau yang terakhir digunakan - sehingga menjadi semakin kuat, maka *node* pengetahuan itu akan membentuk modul-modul atau pola. Greene menyebut modul-modul tersebut sebagai *procedural record*, yaitu sekumpulan hubungan yang terbentuk oleh *node* dalam kegiatan jaringan yang cenderung menguat. Greene juga menjelaskan bahwa jika hubungan pengetahuan tersebut menjelma menjadi beberapa himpunan kegiatan dalam urutan tindakan tertentu yang secara kuat saling berkelompok dan sering digunakan, maka akan menjadi tindakan yang terprogram. Greene mengistilahkan tindakan terprogram ini sebagai "*unitilized assemblies*". Ritual memberikan salam seperti yang dipaparkan di atas merupakan contoh yang bagus mengenai "*unitilized assemblies*" (Littlejohn dan Foos, 2009:1975).

Merujuk pada Miller (2005:111-113) juga Littlejohn dan Foss (2009:174-175) bahwa inti dari teori ini adalah tidak ada tindakan tunggal yang dapat berdiri sendiri. Setiap tindakan mempengaruhi tindakan yang lain dengan suatu cara tertentu. Untuk memperkenalkan diri misalnya, kita harus menggunakan berbagai tindakan mulai dari tekanan suara dengan kata-kata dan gerakan. Untuk menuliskan paragraf, kita harus menggabungkan berbagai aksi dari pengetahuan yang terkoordinasi dalam bahasa untuk menulis atau mengetik. Tindakan tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam jaringan pengetahuan. Setiap bagian pengetahuan merepresentasikan sesuatu untuk melakukannya. Tujuan yang lebih tinggi (seperti melakukan perkenalan) dan yang lebih rendah (seperti tersenyum) digabungkan dalam sebuah hasil representasi yang mengantarkan kita ke suatu tindakan komunikasi.

Menurut Morris dan Wardhany, (2009:103) bahwa suatu proses kumpulan tindakan tidak hanya membutuhkan

pengetahuan dan motivasi, tetapi juga kemampuan untuk menemukan dan mengatur tindakan yang diperlukan secara cepat dan efisien. Jika anda melakukan kesalahan atau mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu, walaupun anda telah memiliki pengetahuan dan motivasi yang benar, berarti anda tidak mampu menyatukan berbagai pengalaman atau tindakan terbaik yang pernah anda lakukan. Misalnya, anda tidak cukup berlatih sebelumnya sehingga anda gagal dalam melakukan pekerjaan atau anda tidak mampu memberikan perhatian terhadap berbagai aspek penting dari suatu situasi, atau anda mengalami pengalaman lain dalam proses kumpulan tindakan.

Pada prinsipnya kumpulan tindakan membutuhkan waktu dan upaya untuk melaksanakannya. Berpikir adalah kerja. Semakin kompleks tugas kumpulan tindakan, semakin banyak waktu dan tenaga yang diperlukan. Tindakan memperkenalkan diri biasanya tidaklah sesulit mengungkapkan simpati terlebih pada situasi tak terduga. Walaupun komunikator tampaknya memberikan tanggapan secara cepat terhadap situasi yang dihadapinya tanpa menunjukkan upaya, namun penelitian menunjukkan bahwa setiap tanggapan membutuhkan waktu, walaupun hanya sepersekian detik. Tugas yang kompleks membutuhkan lebih banyak waktu daripada tugas sederhana. Bila orang membutuhkan waktu lama untuk mengatakan sesuatu, sering berhenti atau gagap, atau tampaknya bingung ketika berbicara, maka orang itu akan kemungkinan mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan pengetahuan secara prosedural dan merumuskan tindakan. Namun, ketika orang memberikan tanggapan dengan cepat dan lancar, maka ia menunjukkan bahwa tugas kumpulan tindakan itu relatif mudah dilaksanakan pada situasi tersebut.

Analisis Kasus berdasarkan Teori Konstruktivis (Constructivist Theory)

Hampir seluruh media memberitakan bahwa Ahmadiyah diserang ataupun diserbu oleh ratusan warga. Penonjolan berita diserang atau diserbu seolah-olah menempatkan Ahmadiyah pada posisi benar dan terzolimi.

Mencermati beberapa berita di media massa juga internet, terdapat beberapa headline media misalnya :

- *Massa Beringas Menyerang Ahmadiyah*
- *Kekerasan Menimpa Jamaah Ahmadiyah*
- *Seribu Warga Cikeusik, Pandeglang Serang Jamaah Ahmadiyah*

Berita pun berlanjut dengan pernyataan-pernyataan kecaman serta kutukan oleh banyak tokoh-tokoh yang -konon katanya- merupakan tokoh agama, tokoh lintas agama, tokoh pembela HAM, tokoh nasional, tokoh pecinta damai, dan aneka tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa, suara paling nyaring jika terjadi peristiwa-peristiwa 'kekerasan' seperti 'itu', banyak tokoh tiba-tiba lantang berbicara dan berkoar-koar. Anehnya, para tokoh-tokoh itu berbicara tanpa tahu atau mungkin pura-pura tidak tahu akan akar persoalan maupun kronologis kejadiannya.

Kebanyakan mayoritas 'opini' pemberitaan nasional pun serentak dan seragam memojokkan warga serta sepakat menempatkan posisi Ahmadiyah dalam posisi terzolimi. Apakah benar dalam peristiwa bentrok tersebut warga Ahmadiyah diserang. Ternyata berita-berita yang dikabarkan oleh media-media nasional tak sepenuhnya benar, juga bisa tak sepenuhnya salah. Media cenderung menutupi kronologis kejadian sebenarnya dan tak melihat akar persoalannya.

Selain itu, terdapat beberapa temuan yang bisa disimak dan diangkat media untuk menjadi realitas publik, diantaranya gambar-gambar video yang muncul di *Youtube*, tampak jelas bahwa pada awalnya massa tampak digerakkan oleh

belasan orang berjaket hitam, sebagian berkaos t-shirt dan kemeja dan bersenjata golok. Yang menarik, mereka ini membawa tanda pengenal berupa pita biru di kerah, atau di dada atau di lengan atas. Tidak seperti massa cair yang cenderung bergerak setelah berkumpul banyak orang, belasan orang ini berjalan dengan langkah pasti, dengan jarak sekitar beberapa ratus meter, menuju rumah warga Ahmadiyah itu (rumah Suparman). Begitu sampai di depan pekarangan rumah Suparman mereka langsung menghajar warga Ahmadiyah yang berjaga di pekarangan dengan serangan memakai golok, bambu, batu dan lain-lain. Dari gerakan-geriknya, mereka tampak sudah sangat terlatih memainkan golok, mampu berkelit dengan tangkas dan berkelahi. Anehnya, ketika massa mulai “berpartisipasi”, pentolan-pentolan penggerak massa ini sudah tidak tampak lagi.

Hanitzsch (2001:219) menyatakan bahwa konstruktivis sangat meragukan kemampuan jurnalis untuk “mencerminkan” realitas murni di lapangan seperti apa adanya. Dalam hal ini pemberitaan wartawan hanyalah merupakan salah satu versi dari realitas di lapangan. Format media, dalam memberitakan realitas, terkait dengan upaya konstruksi sosial pelaku media terhadap pendapat umum (public opinion) atau budaya (culture). Perilaku komunikasi masyarakat ikut berperan disana.

Salah satu ciri dari konstruktivis adalah kompleksitas kognitif (Morrisan dan Wardhany,2009:107); (Miller,2005:107) serta (Littlejohn dan Foss,2009:180). Kompleksitas kognitif ini memiliki peran penting dalam komunikasi, maka konsep ini menjadi bagian penting dalam teori konstruktivisme. Kompleksitas dari suatu sistem atau kesederhanaan sistem merupakan fungsi dari jumlah relatif konstruksi personal dan derajat perbedaan yang ada.

Kasus bentrok warga dengan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik adalah salah satu contoh bagaimana orang tidak

memiliki suatu tingkat kompleksitas kognitif yang konsisten atau sama pada setiap topik atau bidang kehidupan. Terdapat perbedaan kognitif antara warga cikeusik dan sekitarnya dengan jamaah Ahmadiyah, begitupun dengan aparat dan pers di lapangan, karena konstruksi setiap personal tentulah berbeda, begitupun dengan pemberitaan media tentang kasus tersebut. Mereka yang memiliki kerumitan kognitif dapat melihat lebih banyak perbedaan daripada mereka yang memiliki sistem kognitif sederhana.

Hingga kini kasus bentrok warga dengan jamaah Ahmadiyah sudah memakan korban 3 (tiga) nyawa dan menonaktifkan Kapolres Pandeglang dan Kapolda Banten, masih meninggalkan tanda tanya besar siapa dalang kasus tersebut secara pasti. *Wa'allahu alam bi showab.*

Analisis Kasus berdasarkan Teori Penyusunan Tindakan (*Action Assembly Theory*)

Bentrok warga dengan jamaah Ahmadiyah tanggal 06 Februari 2011 yang lalu merupakan akumulasi dari kekesalan sebagian pihak atas sepak terjang Ahmadiyah selama ini. Ahmadiyah adalah sebuah aliran yang sudah dinyatakan sesat baik oleh MUI, Ulama Dunia, bahkan di Pakistan (tempat lahir Ahmadiyah) dan di Inggris (Markas Ahmadiyah), Ahmadiyah dinyatakan bukan bagian dari Islam. Tetapi mereka masih saja membandel seolah menantang keputusan-keputusan pemerintah itu.

Dalam Morrisan dan Wardhany (2009:102); Miller (2005:114) serta Littlejohn dan Foss (2009:174), dinyatakan Greene menekankan bahwa inti dari *action assembly theory* adalah manusia membentuk pesannya dengan menggunakan apa yang disebut dengan pengetahuan isi (*content knowledge*); dan pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*).

Dalam konteks kasus bentrok warga dengan jamaah Ahmadiyah Cikeusik, yang menjadi pengetahuan isi (*content*

knowledge) adalah sesuatu yang hal yang diketahui oleh warga Cikeusik tentang aktifitas Ahmadiyah di daerah tersebut dan juga bagaimana pimpinan dan jamaah Ahmadiyah mengetahui respon warga yang keberatan dengan aktifitas Ahmadiyah di Cikeusik. Kemudian yang menjadi pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*) adalah elemen ingatan yang berhubungan dengan perilaku, konsekuensi, dan situasi yang terjadi sebelum bentrok warga dengan jamaah ahmadiyah terjadi. Semisal, seorang warga Cikeusik yang hendak shalat Jum'at mungkin akan kaget tidak habis pikir, ketika bertemu dan menyapa seorang jamaah Ahmadiyah dan mengatakan, "Assalamu'alaikum, yuk kita barengan shalat Jum'at di Mesjid? Kemudian, orang jamaah Ahmadiyah tersebut menyapa balik dan mengatakan, "Ya, duluan saja, saya cukup Shalat Jum'at di rumah saja?", warga Cikeusik tersebut tentu mungkin akan menyimpan peristiwa dalam ingatannya, yang akan semakin meneguhkan ingatannya manakala dia juga akan ketemu orang yang kebetulan mengalami hal yang sama, sehingga pada akhirnya, sebagian warga Cikeusik kemudian membenarkan bahwa aliran Ahmadiyah memang nyeleneh dan menyesatkan.

Hal tersebut di atas, setidaknya bisa menjadi salah satu hal yang memicu bentrok warga dengan jamaah Ahmadiyah. Yang mana seluruh tindakan yang selama ini berkembang di antara warga dengan jamaah Ahmadiyah menjadi bagian dari catatan prosedural yang kurang relevan dengan situasi tersebut akan menyusut dalam suatu proses yang disebut dengan pembusukan (*decay*), yang kemudian berakhir dengan konflik bentrokan tersebut.

Dalam pandangan *action assembly theory*, tidak ada satu tindakan yang dapat berdiri sendiri. Setiap tindakan akan melibatkan tindakan lainnya dan sebaliknya. Karenanya komunikasi menjadi penting dalam penyelesaian masalah tersebut. Santoso S. Hamidjoyo dalam Jurnal Mediator Unisba (2001:28) menyatakan bahwa komunikasi untuk mengantisipasi

dan meredam konflik adalah komunikasi yang mengedepankan keadilan, kejujuran, demokrasi dan peradaban. Semua modalitas boleh kita pakai mulai dari komunikasi massa jarak jauh (*distant communication*) sampai tatap muka (*face-to-face*). Tetapi, yang penting tercapailah inti komunikasi, yaitu *sambung makna*. Komunikasi tatap muka belum tentu menyentuh hubungan personal interaktif. Komunikasi massa jarak jauh, selalu bisa berfungsi bagaikan *pedang bermata dua*. Bisa positif, bisa negative. Misalnya dengan merekayasa sensitivitas dan selektivitas pengetahuan dan persepsi khalayak digiring ke arah yang diinginkan sumber, yang belum memiliki kejujuran intelektual atau moral (*intellectual or moral honesty*).

Karenanya, untuk menyelesaikan masalah kasus bentrok warga dengan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik tidak terulang kembali di daerah lain, pemerintah daerah pusat, daerah dan pihak terkait harus bisa merujuk pada *action assembly theory* ini untuk senantiasa mengelola pesan dengan cara yang baik dan benar. Pemerintah harus tegas tentang SKB 3 (tiga) Menteri perihal Ahmadiyah dan kita sebagai umat Islam dalam melakukan komunikasi dengan orang lain haruslah berorientasi pada penyampaian pesan dengan tutur kata yang baik, arif dan bijaksana untuk membantu tercapainya keefektifan komunikasi. Di dalam Al-Qur'an, diungkapkan aneka ragam etika bahasa komunikasi yang dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Yahya (2004:307) menyatakan ragam etika bahasa komunikasi, yakni :

- *Qaulan Ma'rufa*, tutur kata yang baik sesuai dengan adat atau tradisi yang berlaku (QS. An-Nisa ayat 5);
- *Qaulan Sadida*, perkataan yang benar dan tepat (QS. An-Nisa ayat 9);
- *Qaulan Baligha*, susunan bahasa yang efektif dan membekas (QS. Al-Isra ayat 23);

- *Qaulan Karima*, ungkapan kata yang santun dan mulia (QS. Al-Isra ayat 23);
- *Qaulan Layyina*, tutur bahasa yang halus dan lemah lembut (QS. Thaha ayat 44);
- *Qaulan Maisura*, percakapan yang mudah dan sederhana (QS. Al-Isra ayat 280)
- *Qaulan Tsaqila*, perkataan yang menggetarkan dan berbobot (QS. Al-Muzzamil ayat 5)

Secara internal, umat Islam perlu lebih bersinergi untuk menangkis berbagai stigma miring yang terjadi. Evaluasi dan instropeksi diperlukan agar tidak menjadi peluang terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap Islam menggunakan kesempatan untuk memojokkan kaum muslimin.

Kesimpulan

Komunikasi dalam perspektif *Theories of Message Production* adalah proses yang berpusat pada pesan dan bersandarkan pada informasi yang berupaya melihat produksi dan penerimaan pesan sebagai masalah psikologis pada proses produksi dan penerimaan pesan oleh individu.

Pada kasus bentrok warga dengan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, dalam pandangan teori konstruktivis terlihat bahwa media massa dan sebagian elit lokal, elit nasional dan pemerintah memiliki kontruksi personal yang secara kognisi satu sama lainnya berbeda. Utamanya media massa, masih saja menggunakan konstruksi berita berdasarkan kepentingan sosial-ekonominya, begitupun pihak yang bentrok kognisi individunya berbeda pemahamannya terhadap suatu realitas.

Sementara dalam pandangan teori kumpulan tindakan atau penyusunan tindakan, bentrok warga terjadi karena sesuatu hal pesan yang sudah terorganisir dalam ingatan setiap individu, yang mana tidak ada satu tindakan yang dapat berdiri sendiri, tetapi berdasarkan pada proses pesan verbal dan non verbal yang selama ini terjadi di antara warga dengan

jamaah Ahmadiyah, yang kemudian menimbulkan pembusukan (*decay*), yang berakhir pada bentrokan tersebut.

Bentrokan warga dengan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik seharusnya tidak terjadi kalau pimpinan dan tokoh masyarakat disana bisa mengembangkan budaya komunikasi dialogis dengan mereka yang jauh-jauh hari berpotensi konflik. Menjadi suatu keharusan semua elemen di negeri ini untuk senantiasa menjaga keberagaman dalam kehidupan beragama.

Daftar Pustaka

Hamijoyo,S.Santoso. 2001. *Konflik Sosial dengan Tindak Kekerasan dan Peranan Komunikasi*. Bandung : Jurnal Mediator Fikom UNISBA Volume 1-Nomor: 2 - 2001

Hanitzsch, Thomas. 2001. *Teori Sistem Sosial dan Paradigma Konstruktivisme*. Bandung : Jurnal Mediator Fikom UNISBA Volume 2-Nomor: 2 - 2001

Littlejohn, Stephen W. and Foss, Karen. 2008, *Theories of Human Communication*, Ninth edition, Thomson Learning Inc., Wadsworth, Belmont, USA.

Littlejohn, Stephen W. and Foss, Karen. 2009, *Teori Komunikasi : Theories of Human Communication*, Edisi 9, Terjemahan. M. Yusuf Hamdan. Jakartal : Salemba Humanika.

Littlejohn., Stephen W. 1996, *Theories of Human Communication*, Ohio: Charles E. Merrill Company

Miller, Katherine. 2005. *Communication Theories: Perspective, Process, and Context*. Boston: McGraw Hill

Morrisan dan Wardhany, Andy Cory. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Vardiansyah, Dani. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yahya, M. Wildan. 2004. Ragam Etika Bahasa Komunikasi : Perspektif Qur'ani. Bandung : Jurnal Mediator Fikom UNISBA Volume 6 - Nomor: 2 - 2004



DINAMIKA KELOMPOK INFORMAL PEMULUNG

(Kasus di TPA Bantar Gebang Kota Bekasi)

Oleh : Agus Sjafari

Pendahuluan

Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial ternyata memiliki unsur-unsur yang berbeda jenis, berbeda fungsi, berbeda peran dan banyak lagi perbedaan lainnya. Sebagai sebuah sistem, perbedaan diantara unsur-unsur tersebut memiliki keterkaitan, memiliki hubungan, yang akhirnya menciptakan sebuah satu kesatuan yang terintegrasi. Secara lebih spesifik bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai jenis fungsi dan peran yang dimainkan dan dimiliki oleh anggota masyarakat, antara lain : peran sebagai dosen, pegawai negeri sipil, pengusaha, pengamen, pekerja sek komersial sampai dengan pekerja sebagai pemulung sampah.

Jenis pekerjaan yang terakhir di atas oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pekerjaan yang menjijikkan dan kotor. Hal tersebut dikarenakan mulai dari performance dan

lingkungan kerjanya di tempat yang sangat kotor. Bayangkan saja bahwa lingkungan tempat kerja para pemulung adalah lingkungan yang sarat dengan barang bekas seperti halnya botol-botol bekas, mainan bekas, plastik bekas, kayu bekas, kerta serta apa saja yang identik dengan kategori “bekas”.

Salah satu yang sangat menarik dari peran pemulung tersebut adalah bahwa pemulung pada dasarnya merupakan sebuah kelompok informal yang didalamnya para anggotanya terdiri dari para pemulung tersebut. Adanya keterkaitan senasib dan sepenanggungan sebagai pekerja dalam bidang yang sama, kemudian diantara mereka membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Di sisi lain yang mendukung terciptanya kelompok-kelompok pemulung tersebut, dikarenakan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial.

Sebagai kelompok informal, tentunya di dalamnya juga berlangsung adanya dinamika kelompok. Artinya bahwa dalam kelompok tersebut berlaku beberapa ciri atau karakteristik dari dinamika kelompok. Meskipun beberapa karakteristik tersebut tidak seketat yang terjadi pada organisasi semi formal atau organisasi formal pada umumnya. Oleh karena itu sangatlah menarik untuk mengkaji kelompok informal pemulung tersebut dalam perspektif dinamika kelompok, guna engetahui lebih jauh tentang kelompok pemulung tersebut.

TPA Bantar Gebang Bekasi merupakan salah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah terbesar untuk wilayah DKI Jakarta dan Bekasi. Karena merupakan TPA terbesar itulah, kemudian menjadi daya tarik bagi para pemulung untuk mengais mata pencahariannya melalui sampah tersebut. TPA tersebut merupakan sumber penghidupan bagi para pemulung untuk menafkahi keluarganya. Sebagian besar dari mereka dengan dengan rela untuk meninggalkan isteri dan anaknya di kampung halamannya, sedangkan mereka sendiri

berjuang untuk dapat mendapatkan hasil pencariannya untuk dapat “dijual” kepada bosnya masing-masing.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis, sekitar 10.000-an pemulung yang menggantungkan hidupnya dengan tumpukan sampah tersebut. Artinya bahwa tumpukan sampah yang menggunung tersebut telah memberikan manfaat secara ekonomis kepada mereka. Hal yang sangat menarik untuk dianalisis adalah bahwa sebagian besar dari mereka tetap hidup secara berkelompok, baik ketika mereka melakukan aktivitas kerjanya maupun di tempat tinggalnya, yang sebagian besar berstatus kontrakan.

Melihat kehidupan mereka yang begitu unik tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji kehidupan kelompok informal para pemulung tersebut dari perspektif dinamika kelompoknya. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam tulisan ini adalah : Bagaimanakah dinamika kelompok informal pemulung TPA Bantar Gebang Kota Bekasi?

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif dengan membandingkan teori-teori dan konsep-konsep dinamika kelompok dengan praktek yang berlaku bagi kelompok pemulung pada TPA Bantar Gebang Bekasi. Konsep dinamika kelompok yang digunakan dalam menganalisis dalam penelitian ini adalah konsep tentang unsur - unsur yang ada dalam kelompok informal. Slamet (2006) menyatakan bahwa dalam psikologi sosial ada disebutkan kelompok mempunyai perilaku, demikian juga anggotanya yang dipengaruhi oleh sembilan faktor/unsur. Faktor ini berfungsi sebagai sumber energi bagi kelompok yang bersangkutan. Adanya keyakinan yang sama akan menghasilkan kelompok yang dinamis. Unsur-unsur tersebut antara lain: 1) Tujuan Kelompok; 2) Struktur Kelompok; 3) Fungsi Tugas; 4) Pembinaan dan Pengembangan

Kelompok; 5) Kekompakan Kelompok; 6) Suasana Kelompok; 7) Ketegangan Kelompok; 8) Kefektifan Kelompok; dan 9) Maksud Tersembunyi.

Dinamika Kelompok Pemulung

Di dalam menjelaskan dinamika kelompok pemulung dapat dijelaskan sesuai dengan unsur - unsur yang ada dalam konsep dinamika kelompok seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Tujuan Kelompok

Tujuan Kelompok dari Kelompok Pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, pada dasarnya *ada* yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya melalui pendapat yang sebanyak - banyaknya dari barang hasil pulungannya tersebut. Tujuan kelompok tersebut *sangat jelas* dan *diketahui* oleh semua anggota kelompok tersebut. Oleh karena itu semua anggota kelompok tersebut sangat termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut sebaik-sebaiknya. Lebih lanjut bahwa tujuan kelompok tersebut sangatlah *identik* dengan tujuan individu masing-masing anggota kelompoknya. Keidentikan tujuan kelompok dengan tujuan individu tersebut, diawali dengan adanya kebutuhan dari para anggota pemulung itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan adanya kebutuhan dari pemimpin atau bos dari kelompok itu sendiri untuk menyalurkan dan menjual dari hasil barang bekas tersebut.

Hasil dari penjualan barang-barang bekas tersebut pada dasarnya untuk kepentingan masing-masing anggota kelompok yang diapresiasi dengan kegiatan bersama kelompok. Demikian, sangatlah jelas bahwa terdapat keterkaitan antara tujuan kelompok dengan tujuan individu masing-masing pemulung. Tujuan dari kelompok tersebut *tidak bersifat formal*, artinya bahwa tujuan kelompok tersebut tidak dikemukakan secara tertulis melainkan tujuan tersebut tersirat pada masing-

masing anggota kelompok (informal). Meskipun tujuannya bersifat informal, tiap-tiap anggota tetap komit untuk mencapai tujuan tersebut, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Tujuan kelompok tersebut sangatlah *simple*, artinya bahwa tujuan tersebut *sangatlah dekat dilihat dari waktu dan persepsi* tiap-tiap anggota. Mereka sama sekali tidak mengembangkan tujuan jangka panjang. Tujuan yang mereka pikirkan setiap hari adalah bagaimana mendapatkan barang bekas berkualitas yang sebanyak-banyaknya yang dapat menghasilkan uang yang banyak setiap harinya.

Struktur Kelompok

Dalam struktur kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi *tidak memiliki struktur kekuasaan yang jelas*. Dalam konteks pengambilan keputusan dalam kelompok langsung terkait dengan pengambilan dari bos dengan tiap-tiap individu pemulung masing-masing. Misalnya saja dalam menentukan jumlah timbangan barang bekas yang didapatkan oleh tiap-tiap pemulung beserta sejumlah "uang makan harian" (harga) yang akan didapatkan oleh tiap-tiap pemulung. Keputusan itu diambil berdasarkan "negosiasi" dan kesepakatan antara bos dengan tiap-tiap anggota pemulung tersebut.

Dalam struktur kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi *tidak memiliki struktur tugas yang jelas*, artinya bahwa dari tiap-tiap anggota kelompok pemulung tersebut tidak memiliki pembagian tugas yang jelas dalam mengumpulkan jenis barang bekas yang akan dikumpulkan. Setiap orang-diberikan kebebasan untuk mengumpulkan semua jenis barang bekas yang dianggapnya menguntungkan. Menurut mereka adanya pembagian tugas, justru akan merugikan mereka, khususnya bagi mereka yang kebagian mengumpulkan jenis barang yang nilai jualnya rendah seperti plastik bekas dan kayu bekas. Oleh karena itu mereka sepakat untuk tidak melakukan pembagian tugas atau pekerjaan.

Dikarenakan tidak adanya struktur kekuasaan dan struktur pembagian tugas diantara pemulung pada kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, maka pada kelompok ini juga tidak memiliki struktur komunikasi yang jelas layaknya organisasi formal. Aliran komunikasi yang dikembangkan oleh mereka dilakukan secara informal, tanpa adanya tingkatan, stratifikasi dan sekat-sekat yang melekat pada dirinya. Tingkatan komunikasi yang ada hanyalah antara bos mereka dengan anggota pemulung itu sendiri.

Fungsi Tugas Kelompok

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi dilakukan secara *informal*. Pengambilan keputusan secara informal ini dilakukan secara personal, tetapi tidak dilakukan secara kolektif dan terkoordinir. Kelompok ini memang tidak membutuhkan adanya pengambilan keputusan secara formal dan kolektif, dikarenakan tidak menguntungkan secara ekonomi bagi mereka.

Khusus terkait dengan aliran informasi yang terjadi pada kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, bahwa dalam kelompok tersebut tidak mengembangkan proses aliran komunikasi yang baik khususnya aliran komunikasi yang baru. Alasan mereka adalah bahwa dalam kelompok mereka tidak memiliki sarana yang memadai untuk mengembangkan aliran informasi baru, mereka sendiri tidak memiliki media yang memadai untuk mengembangkan aliran komunikasi yang baru tersebut.

Koordinasi yang dilakukan dalam kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi hanya bersifat koordinasi informal dan tidak mengikat. Koordinasi tersebut hanya dilakukan antara bos dengan pemulung ketika sore hari disaat para pemulung menyeter dan melakukan perhitungan jumlah

barang yang masuk dengan uang makan yang mereka terima. Tidak mengikatnya dalam koordinasi ini, dikarenakan tidak adanya sanksi yang diterapkan kepada anggota kelompok apabila tidak mencapai target. Sebagai konsekuensinya mereka (pemulung) hanya mendapatkan uang makan yang sedikit sesuai dengan jumlah barang yang disetornya tersebut.

Bos-bos yang bertindak sebagai penampung barang-barang bekas pemulung pada kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, tidak selalu menggunakan “transaksi jual beli” dengan para pemulung binaannya tersebut, melainkan di beberapa kesempatan juga memberikan “*motivasi*” kepada para anggota pemulung berupa THR di setiap akhir tahun. Pemberian motivasi model tersebut, juga memotivasi para pemulung untuk dapat berkerja dengan baik.

Komunikasi yang dikembangkan oleh anggota kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, selama ini terlihat *sangat lancar*. Kelancaran komunikasi tersebut dilakukan secara lisan diantara para anggota. Biasanya komunikasi ini dilakukan sebelum mereka pergi ke “tempat kerjanya” (tumpukan sampah) dan setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya ketika proses perhitungan dengan bosnya. Sedangkan ketika mereka berada di lokasi sampah, mereka hanya melakukan komunikasi secara terbatas dalam kelompok-kelompok kecil saja.

Dalam mengembangkan fungsi tugas pada kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, kadang-kadang bos dari anggota kelompok tersebut *memberikan penjelasan* kepada anggota kelompok. Misalnya saja mengenai jenis barang bekas yang lagi “naik daun” dalam pasaran atau mengenai harga pasar terhadap barang bekas tersebut.

Pembinaan dan Pengembangan Kelompok

Partisipasi yang dikembangkan dalam kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi selama ini berkaitan dengan

“partisipasi yang bernilai ekonomis”. Partisipasi ini berkaitan dengan bagaimana setiap anggota kelompok berlomba-lomba untuk dapat mendapatkan barang bekas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Meskipun hasil penjualan tersebut tidak langsung bermanfaat bagi kelompoknya, minimal sangat bermanfaat bagi bosnya dan diri para pemulung itu sendiri.

Dalam melaksanakan kegiatan dari kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi sangatlah diperlukan adanya alat tangkapnya sebagai input antara lain gerobak dan besi kaitnya. Sebagian besar dari tiap-tiap anggota kelompok diberikan fasilitas berupa gerobak oleh bosnya masing-masing dengan maksud untuk mempercepat dan memperbanyak angkutan hasilnya. Sedangkan untuk besi kaitnya serta pakaiannya, mereka harus menyediakan sendiri. Melalui gerobak yang memadai tersebut, mereka menjadi lebih kompetitif dengan kelompok lainnya.

Aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi sangat jelas berupa kegiatan pencarian barang bekas di tempat-tempat timbunan sampah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pensortiran sesuai dengan jenis barang masing masing, dan dilanjutkan dengan kegiatan pengepakan barang-barang tersebut. Kegiatan terakhir adalah transaksi dengan bos masing-masing untuk mendapatkan jatah uang makan hariannya sesuai dengan barang yang disetorkan tersebut. Kegiatan itulah yang dilakukan setiap hari oleh setiap pemulung.

Koordinasi yang dilakukan dalam kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi hanya bersifat koordinasi informal dan tidak mengikat. Koordinasi tersebut paling hanya dilakukan antara bos dengan pemulung ketika sore hari disaat para pemulung menyetor dan melakukan perhitungan jumlah barang yang masuk dengan uang makan yang mereka terima. Tidak mengikatnya dalam koordinasi ini, dikarenakan tidak adanya sanksi yang diterapkan kepada anggota kelompok

apabila tidak mencapai target. Sebagai konsekuensinya mereka (pemulung) hanya mendapatkan uang makan yang sedikit sesuai dengan jumlah barang yang disetornya tersebut.

Komunikasi yang dikembangkan oleh kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi selama ini baik komunikasi vertikal maupun komunikasi horisontal dilakukan secara informal dan lisan. Komunikasi ini tidak dilakukan secara kaku, melainkan dilakukan secara santai dan personal. Pola komunikasi ini seperti ini dinilai sangat cocok dengan kondisi dan situasi kelompok pemulung tersebut. Dalam kegiatan kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, juga *memberlakukan adanya standar* yaitu 1) standar jumlah dan 2) standar upah/uang makan. Standar jumlah yang digunakan biasanya dalam hitungan kwintal, yaitu tiap-tiap orang dalam setiap hari diharapkan dapat mengumpulkan antara 8 - 10 kwintal. Sedangkan standar uang makan yang akan mereka terima antara berkisar Rp 25 ribu sampai dengan Rp. 50 ribu setiap harinya.

Tidak seperti organisasi formal pada umumnya, kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi *tidak terlalu memberlakukan sosialisasi* diantara anggota kelompok. Tiap-tiap anggota kelompok dengan melalui proses pertemanan akan dapat mengetahui sistem dan pola kerja dalam profesi pemulung tersebut. Menurut mereka, profesi pemulung bukanlah profesi yang sulit melainkan berhubungan dengan adanya kemauan dan kerja keras. Oleh karena itu proses sosialisasi tidak terlalu dibutuhkan dalam anggota tersebut.

Seperti halnya kelompok dan organisasi pada umumnya, kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi juga *membuka terhadap bergabungnya anggota baru*. Pola rekrutmen anggota baru tersebut melalui proses koneksi dan kesukuan, misalnya saja kelompok orang Indramayu, orang Pekalongan dan Semarang, orang Madura dan sebagainya. Meskipun demikian unsur nepotisme tersebut saat ini sudah mulai

berkurang, artinya saat ini kelompok pemulung sudah mengalami pembauran dari berbagai daerah asal pemulung tersebut.

Kekompakan Kelompok

Dalam kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi tersebut, pada dasarnya juga memiliki kepemimpinan dalam kelompok. Kepemimpinan tersebut tidak langsung berada dalam kelompok tersebut, melainkan ditentukan oleh pihak lain yaitu yang disebut dengan "bos". Bos itulah yang selama ini dianggap sebagai pemimpin dari mereka. Dari mereka sendiri tidak menentukan pemimpin, karena dianggap tidak efektif dan hanya akan menimbulkan kecemburuan. Yang mereka patuhi hanyalah pengaruh dari bos itu saja, selain itu hanya merupakan pertimbangan saja.

Diantara para anggota dalam kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, pada dasarnya kurang memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*) yang kental diantara mereka. Kelompok bagi mereka hanyalah bersifat sekunder dalam mendukung keberhasilan mereka, sedangkan yang paling primer adalah kesungguhan dan kerja keras mereka masing-masing. Selanjutnya, *Nilai dan tujuan kelompok* yang ada dalam kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi adalah lebih menekankan kepada nilai ekonomis, yaitu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Sedangkan untuk pengembangan nilai-nilai lainnya seperti nilai sosial budaya dan spiritual sama sekali tidak disentuh oleh kelompok tersebut. Keterkaitan diantara anggota kelompok dikarenakan adanya keterkaitan ekonomi dan kesukuan saja.

Anggota yang ada dalam kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi terlihat sangat *heterogen* yaitu berasal dari berbagai daerah antara lain: orang dari Indramayu, Semarang, Pekalongan, Madura. Dulu adanya keragaman anggota

tersebut sangat potensial terjadinya konflik, namun saat ini mereka lebih menekankan kepada kesadaran bersama sesama pemulung yang sama-sama mencari makan dan mata pencaharian bersama. Sebagai konsekuensi dengan adanya heterogenitas anggota kelompok, maka dalam kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi *kurang mengembangkan integrasi*. Kesadaran akan integrasi tidak begitu dikembangkan dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi diantara mereka. Integrasi yang ada selama ini, dalam kendali bos masing-masing.

Kerja sama yang dibangun dalam kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi sebatas kerjasama untuk lebih meningkatkan pendapatan mereka. Mereka kadang-kadang bertukar pikiran mengenai cara-cara mendapatkan barang buruan yang baik dan berkualitas. Meskipun demikian, ketika di lapangan mereka melakukan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. *Besarnya kelompok* dari tiap-tiap kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi adalah berkisar antara 50 sampai dengan 100 orang pemulung. Diatas itu akan sangat mentulitkan bagi penampung untuk mengkoordinir, baik dari segi tempat maupun keinginan dari tiap-tiap pemulung sendiri.

Suasana Kelompok

Kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi dalam melakukan kegiatan dengan menggunakan prinsip solidaritas yang tinggi, artinya *ketegangan (tension)* yang ada di dalamnya tergolong rendah. Menurut mereka, diantara anggota kelompok tersebut tidak terlalu *ngoyo* di dalam mengerjakan tugasnya. Masing aangota memegang prinsip, bahwa tiap-tiap individu sudah memiliki rejeki masing-masing dalam setiap harinya. Oleh karena itu mereka tidak perlu melaukukan persaingan yang tinggi diantara mereka.

Diantara anggota kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, didalam menjalankan tugasnyaterlihat sangat *ramah dan penuh persahabatan (friendly)*. Hal yang menunjang kerahan dan persahabatan diantara mereka adalah bahwa diantara mereka sudah terdapat hubungan pertemanan yang berdasarkan kedaerahan. Suasana kelompok yang dikembangkan dalam kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi terlihat sangat *permissif dan bebas*. Kebebasan tersebut dialndasi oleh adanya orientasi penekanan kepada kepentingan individu. Kelompok bagi mereka diibaratkan hanya menjadi fasilitas yang sifatnya sekunder di dalam memenuhi keinginan individu. Artinya bahwa kegiatan yang mereka lakukan tidak dikendalikan oleh norma kelompok melainkan dikendalikan oleh kesadaran individu untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Target yang mereka capai bukanlah merupakan terget kelompok, melainkan hanyalah terget individu masing-masing.

Lingkungan fisik tempat bekerja pada kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi sesuai dengan target yang mereka ingin dapatkan yaitu pada timbunan sampah yang menggunung. Meskipun lingkungan kerjanya yang sangat kotor dan berbau tersebut, mereka tetap menunjukkan perasaan *enjoy* dalam melaksanakan tugasnya. Untuk sarana-sarana fisik lainnya dalam kategori kelompok atau organisasi pada umumnya, mereka tidak memiliki sarana prasarana yang memadai seperti tempat pertemuan, sarana komunikasi dan sebagainya. Suasana kelompok yang dikembangkan dalam kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, khususnya dalam pengambilan keputusan kelompok lebih mengarah kepada kondisi yang sangat bebasa (*laizez faire*). Menurut mereka pengambilan keputusan kelompok lebih berasaskan kekeluargaan dibandingkan dengan azas demokratis dan otokratis. Yang penting bagi mereka adalah keputusan yang

diambil dalam kelompok tidak merugikan anggota kelompok lainnya.

Ketegangan Kelompok

Kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi dalam melakukan kegiatan dengan menggunakan prinsip solidaritas yang tinggi, artinya *ketegangan (tension)* yang ada di dalamnya tergolong rendah. Menurut mereka, diantara anggota kelompok tersebut tidak terlalu *ngoyo* di dalam mengerjakan tugasnya. Masing aangota memegang prinsip, bahwa tiap-tiap individu sudah memiliki rejeki masing-masing dalam setiap harinya. Oleh karena itu mereka tidak perlu melaukukan persaingan yang tinggi diantara mereka. Kalau ketegangan itu sewaktu-waktu dirasakan oleh anggota Kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi tersebut, lebih banyak disebabkan dari internal kelompok terutama apabila terdapat perbedaan persepsi dengan “bos” (penampung barang bekas) misalnya saja dalam hal pencapaian target pencapaian hasil pemasukan barang atau perbedaan pandangan mengenai harga dalam transaksi “penjualan” barang bekasnya tersebut.

Kefektifan Kelompok

Kefektifan Kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi ditentukan dari sejauhmana tingakt produktivitas anggota kelopak (pemulung) di dalam mendapatkan barang bekasnya. Pengukuran produktivitas kerjanya dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- 1) Dilihat dari hasil rata-rata setiap harinya berkisar antara 8 sampai dengan 10 kwintal.
- 2) Dilihat dari pendapatan (uang makan) yang mereka dapatkan berkisar antara Rp. 25 Ribu sampai dengan Rp. 50 Ribu setiap hari. Dalam hitungan pendapatan bulanan berkisar antara Rp. 1,5 juta sampai dengan Rp. 2 juta).

3) Dilihat dari segi waktu bekerja setiap harinya rata-rata 8-9 jam mulai dari jam 07.00 sampai dengan 17.00

Moral kelompok yang ada dalam Kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, terlihat rendah. Artinya bahwa diantara anggota kelompok tidak memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelompok itu sendiri. Mereka lebih menunjukkan kepedulian kepada dirinya sendiri dan Bos-nya. Meskipun kekuatan kelompok yang ada pada Kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi terlihat rendah, tetapi para anggota kelompok terlihat *puas* dengan pekerjaannya. Faktor yang paling mempengaruhi kepuasan anggota kelompok lebih kepada terpenuhinya kebutuhan ekonomi berupa tingkat pendapatannya yang sesuai standart. Keberadaan kelompok dalam hal ini bukan merupakan kebutuhan utama bagi anggota kelompok itu sendiri, melainkan hanya bersifat penunjang.

Maksud Terselubung

Terkait dengan program, tugas dan tujuan yang ada dalam Kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, ternyata tidak diketahui secara jelas oleh anggota kelompok. Anggota kelompok hanya mengetahui bagaimana ia mampu mengumpulkan barang bekas sebanyak-banyaknya. Pada sisi lain terkadang terdapat motif ekonomi yang berlebihan dari para bosnya yang merupakan maksud terselubung. Misalnya saja terdapat kesalahan perhitungan dalam penimbangan, tetapi tetap dibenarkan oleh bos. Dalam hal ini bisa saja bosnya melakukan kecurangan, meskipun frekuensinya sangat jarang.

Diantara kelompok yang ada pada Kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi penerapan pengaruh diantara anggota terlihat rendah meskipun ada. Pengaruh yang paling besar berasal dari bosnya. Diantara anggota lebih mengedepankan kepentingan individu masing-masing. Ketika diantara anggota Kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi terdapat kecurigaan dan kejanggalan terhadap setiap

maksud terselubung baik yang berasal dari bosnya, maupun yang berasal dari anggota kelompok, mereka kadang-kadang mendiskusikan masalah tersebut. Frekuensi kegiatan diskusi yang dilakukan diantara mereka dilakukan secara eiformal dan seadanya dan tidak rutin.

Anggota Kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi, pada dasarnya lebih menyukai bekerja untuk maksud-maksud yang terbuka dibandingkan dengan maksus-maksud yang terselubung. Hal ini dikarenakan ketika maksud terselubung tersebut diketahui mengakibatkan terjadinya konflik fisik yang sangat mengerikan seperti adanya pengusiran bahkan mengarah kepada pembunuhan.

Sebagian besar sumber terhadap maksud terselubung dalam Kelompok pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi lebih banyak berasal dari bosnya dibandingkan dengan anggota kelompok tersebut. Dalam hal ini para anggota kelompok selalu menjadi posisi yang dirugikan dbandingkan dengan bosnya, namun mereka tetap bekerja dalam kondisi tersebut. Karena maksus terselubung dalam bentuk kecurangan tersebut jarang sekali terjadi.

Interpretasi

Mengapa pendekatan kelompok dipandang sebagai cara yang efektif dalam berbagai upaya pemberdayaan?

Setiap kelompok, baik yang sengaja dibentuk maupun yang terjadi secara spontan memiliki dinamika tertentu. Dinamika kelompok menggambarkan kekuatan-kekuatan dalam situasi kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan anggota-anggotanya (Jenkins, 1961). Kekuatan-kekuatan tersebut berasal dari: adanya interaksi antara anggota kelompok, hubungan interpersonal, struktur kelompok dan komunikasi, yang terjadi karena terdapat tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Khusus terkait dengan kelompok informal pemulung di TPA Bantar Gebang Kota Bekasi menunjukkan bahwa mereka tetap membutuhkan kelompok dengan tujuan agar kerja mereka masing - masing lebih terkontrol. Hubungan diantara mereka tidak bersifat formal dan sangat cair. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa keberadaan kelompok dapat menunjang tujuan masing - masing individu pemulung.

Suatu kelompok memiliki dinamika yang tinggi jika kelompok efektif dalam mencapai tujuannya (Etzioni, 1989). Proses yang terjadi dalam kelompok adalah kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan bersama (Sofer,1972).

Menurut Broom dan Selznick (1968), jika kelompok berfungsi dengan baik, maka terdapat beberapa proses yang dapat diamati, yaitu: (1) Interaksi positif antara para anggota dengan pemimpin, (2) Adanya kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, (3) Terdapat pembagian dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, (4) Terdapat fungsi pemeliharaan kepemimpinan dan pendelegasian kegiatan, dan (5) Ada penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

Bagi para pemulung di TPA Bantar Gebang Kota Bekasi, kelompok yang mereka bentuk masing berfungsi positif di dalam menjalankan tugasnya. Namun, karena kelompok tersebut bersifat informal maka pengelolaan kelompok masih bersifat seadanya dan tidak seperti kelompok atau organisasi formal seperti biasanya. Khususnya terkait dengan fungsi kepemimpinan dan penilaian terhadap kegiatan yang mereka lakukan masih dilakukan seadanya. Prinsip saling percaya diantara mereka masih terjaga, meskipun dalam beberapa hal terdapat konflik - konflik kecil diantara mereka.

Tingkat dinamika kelompok dipengaruhi oleh beberapa unsur yang selalu ada dalam sistem sosial lain. Unsur-unsur ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dinamika kelompok

dalam sudut ilmu Sosiologi (Loomis, 1960), yang terdiri dari: tujuan, kepercayaan atau pengetahuan, sentimen, norma, peranan, status, sanksi, kekuasaan, jenjang sosial, fasilitas dan tegangan. Tergantung dari kepekatan dari masing-masing unsur, maka seseorang dapat menilai tingkat dinamika sesuatu kelompok. Pada kelompok informal pemulung di TPA Bantar Gebang, aspek - aspek tersebut tidak berlaku semua. Dengan demikian kondisi kelompok perlu mendapatkan perbaikan adar kelompok tersebut menjadi lebih berdaya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Bahwa tingkat dinamika kelompok yang ada pada Kelompok Pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi *labil* atau *tidak stabil*.
2. Beberapa faktor dominan yang menyebabkan tidak stabilnya dinamika kelompok pada Kelompok Pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi antara lain: struktur kelompok yang sangat rendah, rasa kepemilikan terhadap kelompok yang rendah, fungsi tugas yang tidak jelas serta kekompakan kelompok yang sangat rendah. Kelompok dalam hal ini dirasakan belum memberikan kontribusi yang besar terhadap anggota kelompoknya.

Implikasi

Dari kesimpulan yang didapatkan di atas, terdapat beberapa implikasi yang dapat menyempurnakan terhadap dinamika kelompok pada Kelompok Pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi antara lain:

1. Kelompok Pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi sangat memerlukan pembenahan internal kelompok berupa sosialisasi dan pembelajaran nilai-nilai kelompok dan

- organisasi yang positif kepada anggota kelompok dengan maksud untuk meningkatkan semangat kerja tim dalam kelompok tersebut.
2. Kelompok Pemulung TPA Bantar Gebang Bekasi sangat memerlukan adanya pendampingan dari kekuatan eksternal baik itu dari pemerintah melalui kebijakan atau program pemberdayaan, LSM, Ormas dan perguruan tinggi. Dengan adanya keterlibatan pihak eksternal akan lebih meningkatkan kapasitas kelompok (*group capacity*) agar mereka benar-benar menjadi kelompok yang dinamis (*the group dynamic*).
 3. Hasil analisis dan kajian yang sangat sederhana ini diharapkan dapat memberikan wacana yang positif bagi pihak-pihak yang sempat membaca kajian ini, kritik dan saran sangat kami tunggu.

Daftar Pustaka

- Broom, L. ,dan P. Selznick .1968. *Sociology: A Text with Adapted Readings*. Edisi ke-4. Harper and Row New York.
- Etzioni. 1989. *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Jenkins, D.H, 1961. *What is Group Dynamics: In Group Development Selected Reading Series One National Training Laboratories*. Nat. Educ. Assoc., Washington, D.C.
- Loomis, C.P. 1960. *Social System Essays on Their Persistence and Change*. D. Princeton New Jersey: van Nostrand co. Inc.
- Slamet, Margono. 2006. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Editor: Ida Yustina dan Adjat Sudrajat. Bogor: Penerbit IPB Press
- Sofer, C.,1972. *Organizations in Theory and Practice*. London: Heinemann Educational Book

STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Oleh : Ipah Ema Jumiati

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah kehidupan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan juga merupakan masalah multi dimensi yang penanggulangannya tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi, karena kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan orang miskin mandiri dalam ekonomi, budaya dan politik.

Keterkaitan politik dan administrasi dalam kebijakan publik, berimplikasi pula pada langkah implementasi kebijakan, sebab menurut Adiwisastro (2006), bahwa implementasi kebijakan tidak hanya mencakup operasionalisasi kebijakan publik ke dalam mekanisme birokrasi, tapi juga terkait bagaimana agar kebijakan publik tersebut dapat diterima, dipahami dan didukung oleh kelompok sasaran.

Selanjutnya dikatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan lebih banyak ditentukan melalui proses negosiasi, tawar menawar, atau lobby untuk menghasilkan kompromi. Namun, kapasitas lembaga pelaksana tetap diperlukan untuk mengelola beragam kepentingan.

Berbagai program kemiskinan dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, dan keswadayaan). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Oleh sebab tersebut, Indonesia ikut serta dalam penandatanganan deklarasi Millenium pada September 2003, yang mengadopsi tujuan pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGs*), dan MDGs menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, mulai tahap perencanaan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) hingga tahap pelaksanaannya.

Sebagai realisasi keikutsertaan Indonesia dalam MDGs tersebut salah satunya dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Serang Provinsi Banten melalui strategi implementasi kegiatan yang sudah dirancang oleh pemerintah mulai tahun 2007 dan akan berakhir pada tahun 2015. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat

ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Prinsipnya apapun strategi penanggulangan kemiskinan yang dipilih tidak boleh mematikan mekanisme atau kelembagaan lokal yang sebelumnya beroperasi.

Strategi Implementasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi dalam Kamus Oxford (2007) diartikan sebagai *'plan intended to achieve a particular purpose'*. Wheelen, Hunger (2003) mengartikan strategi sebagai *'forms a comprehensive plan stating how the corporation will achieve its mission and objectives'*. Sedangkan Implementasi strategi adalah *'the process by which management translates strategies and policies into action through the development of programs, budgets, and procedures'* (Wheelen, Hunger, 2003). Selanjutnya Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Sumodiningrat, 1999 : 4).

Pendekatan pemberdayaan yang lebih berpusat kepada manusia memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi dirinya. Penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*), upaya memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan perlindungan (Sumodiningrat, 1999:44). Pandangan demikian didukung dalam pendekatan pengelolaan sumber yang bertumpu pada komunitas (*community based resource managemen*) dari Korten dalam Moeljarto (1995: 26) dengan ciri-ciri pendekatan adalah:

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan di masyarakat sendiri.
2. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber

yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

3. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya amat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
4. Didalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini pada proses *social learning* yang didalamnya terdapat terdapat interaksi kolabotatif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan pada saling belajar.
5. Proses pembentukan jaringan (*networking*) untuk birokrat dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antar struktur vertikal dan horizontal. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan ditingkat lokal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Proses pemberdayaan mempunyai kecenderungan yaitu menekankan pada proses pemberian kekuatan kepada masyarakat lain untuk dapat lebih berdaya. Atau Pemberdayaan adalah suatu cara memberikan kekuatan kepada masyarakat yang *powerless* agar ikut serta dalam proses pembangunan sebagai proses aktualisasi eksistensi (Pranarka dan Moeljarto, 1996:17). Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan pula menurut Suhendra (2006:75) bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Strategi Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Serang

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah mencakup serangkaian kegiatan yang merupakan proses menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dan pelebagaan nilai-nilai universal kemanusiaan (*value based development*), prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (*good governance*), serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Proses pemberdayaan di tingkat masyarakat dimulai dengan: (i) kegiatan sosialisasi awal dan musyawarah masyarakat mengenai program untuk menyamakan, memahami prinsip dan bagaimana program akan dilaksanakan kepada perangkat kelurahan/desa dan kelompok strategis di kelurahan/desa, (ii) Mengenali kemiskinan melalui Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) untuk mengidentifikasi kemiskinan, menyepakati kriteria miskin dan menyatakan kesiapan warga untuk menerima atau menolak melaksanakan PNPM Mandiri, dan Refleksi Kemiskinan (RK) untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab kemiskinan, (iii) Pemetaan Swadaya (PS) untuk pencacahan Kepala Keluarga (KK) miskin, merumuskan kebutuhan, memetakan potensi yang ada untuk memecahkan masalah dan merumuskan visi bersama, (iv) Pengorganisasian masyarakat, yaitu adanya lembaga/kelompok keswadayaan masyarakat melalui pembangunan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan masyarakat) dan pengembangan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dibentuk, diakui, dan dikelola oleh masyarakat secara transparan dan bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan bersama, (v) Penyusunan perencanaan partisipatif menyusun Program Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan

Kemiskinan (Pronangkis), koordinasi rencana PJM Pronangkis dengan rencana Kelurahan/Desa, pengajuan dan administrasi pencairan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), pencairan dana BLM dan pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), (vi) Pelaksanaan kegiatan, dan (vii) Pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan berupa pengelolaan dan pemeliharaan pelayanan dan prasarana yang sudah dibangun/dilaksanakan.

Ketujuh tahapan kegiatan diatas merupakan siklus yang dikembangkan dalam intervensi Program Nasional Masyarakat Mandiri yang merupakan pengejawantahan dari daur program pembangunan partisipatif mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah, masyarakat, fasilitator dan konsultan untuk menunjang keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kota Serang.

Sosialisasi Awal dan Musyawarah Masyarakat

Kegiatan sosialisasi awal dan musyawarah masyarakat dimaksudkan untuk mengenal program untuk menyamakan, memahami prinsip dan mengetahui bagaimana program akan dilaksanakan kepada perangkat kelurahan/desa dan kelompok strategis di kelurahan/desa.

Kegiatan rembuk/musyawarah kesepakatan masyarakat (RKM) ini merupakan serangkaian musyawarah di tingkat kelurahan desa yang diselenggarakan oleh Lurah/Kepala Desa dengan mengundang para ketua RT, ketua RW, warga miskin (Pra KS dan KS1) dan tokoh masyarakat serta kelompok peduli setempat untuk memutuskan apakah berminat mengikuti PNPM Mandiri dengan segala konsekuensinya atau tidak. RKM didahului serangkaian kegiatan silaturahmi sosial dan pemasyarakatan gambaran umum PNPM Mandiri ke berbagai pihak, baik perangkat pemerintah maupun masyarakat, melalui

berbagai media, arisan, pertemuan PKK, pengajian, siskamling, dan sebagainya, yang difasilitasi fasilitator.

Terkait sosialisasi, Koordinator BKM Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang, mengemukakan :

Setiap tahun kalau ada PNPM Mandiri di wilayah Kabupaten maupun Kota itu kan diadakan lokakarya di tingkat kota/kabupaten dalam rangka sosialisasi program. Di dalam sosialisasi program itu disebutkan pagu dana, kemudian dana pendamping yang bisa dikucurkan oleh pemda setempat, kemudian dari APBN-nya berapa, dan sebagainya. Kemudian di lokasi-lokasi wilayah mana yang akan mendapatkan bantuan itu. Setelah itu, persiapan-persiapan pelaksanaan di lapangan nanti.

Senada dengan pernyataan di atas, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BKM Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang mengemukakan :

“Sebelum diadakan review PNPM ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai program. Selain itu ada review program dan pemetaan swadaya yang dilaksanakan setahun sekali”.

Dari informasi yang diperoleh dari 2 (dua) orang informan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi PNPM Mandiri sampai dengan pemetaan swadaya dilaksanakan sekali dalam satu tahun dalam satu siklus kegiatan.

Dengan demikian manfaat yang diterima wakil masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara di atas, baru sebatas pemahaman informasi mengenai PNPM Mandiri secara umum, sedangkan tujuan sosialisasi yang lebih spesifik berupa langkah-langkah PNPM Mandiri sebagai bagian pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan belum tercapai.

Idealnya tujuan dari sosialisasi adalah: (1) untuk meningkatkan kesadaran kritis (*awareness*) pentingnya penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan terorganisasi;

(2) menyebarluaskan informasi mengenai PNPM Mandiri secara umum; (3) menanamkan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat sasaran langsung mengenai PNPM Mandiri dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut; (4) menyebarluaskan langkah-langkah PNPM Mandiri kepada masyarakat sasaran langsung sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; (5) menanamkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai PNPM Mandiri sebagai bagian integral yang harus terus dilestarikan; dan (6) menjaga transparansi dan membangun kontrol sosial yang melekat pada keseluruhan PNPM Mandiri serta program-program lain yang sejenis.

Arti penting sosialisasi dalam program pemberdayaan masyarakat dikemukakan oleh Achmad Gunawan yang mengatakan bahwa program pemberdayaan dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat secara sukarela dan sadar melibatkan diri dalam kegiatan program tersebut. Sayangnya sosialisasi dan desiminasi informasi yang menjadi kunci dalam penyadaran dan ajakan kepada masyarakat untuk terlibat dalam program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada banyak hal yang menyebabkan kegagalan proses pembangunan berbasis pemberdayaan. Salah satu sebab penting yang menjadi sumber kegagalan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah kurang mengakarnya program komunikasi, yang sering disebut sebagai proses sosialisasi atau desiminasi informasi (Achmad Gunawan, 2007 : 1).

Setelah sosialisasi program dilanjutkan dengan rembug/musyawarah kesepakatan masyarakat. Rembug atau musyawarah kesepakatan masyarakat dilanjutkan dengan pendaftaran relawan-relawan yang akan berperan sebagai relawan pembangunan masyarakat setempat. Untuk tahap pertama yang dibutuhkan adalah relawan untuk menyelenggarakan refleksi kemiskinan (RK) yang akan dilakukan di tiap RT/RW, minimum 1 orang per RW. Dalam

tiap tahapan kegiatan, jumlah anggota tim relawan dapat ditambah sesuai kebutuhan maupun terutama sesuai kesediaan partisipasi dan kerelaan warga untuk menjadi relawan-relawan dalam proses penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Relawan-relawan adalah orang-orang yang memiliki niat ikhlas dan peduli untuk membantu masyarakat miskin di wilayahnya. Tidak ada batasan jumlah relawan dalam satu wilayah, karena siapapun yang ikhlas dan peduli dapat terlibat dan memberi kontribusi untuk membantu masyarakat dalam proses pelaksanaan PNPM Mandiri di wilayahnya.

Para relawan-relawan tersebut selanjutnya bersama fasilitator akan mendorong peran aktif masyarakat dalam berbagai proses kegiatan PNPM Mandiri. Dalam realitanya proses sosialisasi PNPM Mandiri di lapangan kurang efektif karena sejak awal inisiatif program tersebut bukan berasal dari masyarakat, tetapi dari pemerintah. Hal itu menyebabkan sejak awal pula masyarakat telah menganggap pelaksanaan program ini masih menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, dan keterlibatan masyarakat hanya sebatas dimobilisasi oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, bukan menunjuk orang-orang yang benar-benar mempunyai kepedulian dan komitmen terhadap masalah kemiskinan di wilayahnya. Akibatnya setelah mereka mendapat sosialisasi, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap sikap mereka.

Mengenali Kemiskinan

Mengenali kemiskinan diawali dengan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) untuk mengidentifikasi kemiskinan, menyepakati kriteria miskin dan menyatakan kesiapan warga untuk menerima atau menolak melaksanakan PNPM Mandiri, dan akan dilanjutkan dengan Refleksi Kemiskinan (RK). RKM merupakan proses awal dari pengejawantahan pembangunan partisipatif, karena masyarakatlah yang berhak untuk menentukan apakah mereka akan melakukan upaya

penanggulangan kemiskinannya sendiri. Apabila masyarakat memutuskan untuk menerima PNPM mandiri, maka secara otomatis masyarakat harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan dengan koridor yang sudah dikembangkan oleh PNPM Mandiri, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dalam daur penanggulangan kemiskinan secara partisipatif yang diejawantahkan dalam tahapan siklus-siklus selanjutnya.

Komitmen yang disepakati oleh masyarakat berimplikasi kepada beberapa konsekuensi yang harus dijalankan oleh mereka seperti: mengikuti pertemuan-pertemuan untuk melaksanakan setiap proses tahapan siklus, adanya motor penggerak yang bekerja dengan sukarela, kesediaan untuk bekerjasama dari berbagai pihak (tokoh, masyarakat miskin, masyarakat non miskin, aparat pemerintah setempat, dan lain-lain), menyediakan dana swadaya untuk berbagai pertemuan dan pelatihan, dan sebagainya.

Dengan mengetahui segala konsekuensi yang harus dihadapi diharapkan masyarakat betul-betul siap untuk menerima intervensi PNPM Mandiri Perkotaan bukan karena 'iming-iming' BLM akan tetapi karena benar-benar mempunyai kehendak untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan bersama-sama. Setelah rebug kesiapan masyarakat, tahapan selanjutnya adalah Refleksi Kemiskinan (RK). RK dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. Kesadaran kritis ini menjadi penting, karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai 'objek' seringkali masyarakat diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah sebenarnya (masalah dirumuskan oleh 'Orang Luar'). Kondisi tersebut menyebabkan dalam pemecahan masalah masyarakat hanya sekedar melaksanakan kehendak 'Orang Luar' atau karena tergiur

dengan 'iming-iming' bantuan uang, bukan melaksanakan kegiatan karena benar-benar menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka.

Terkait Refleksi Kemiskinan, Koordinator BKM Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, mengemukakan :

"Mestinya kalau ada bantuan itu mengurangi angka kemiskinan, tapi angka kemiskinan kalau saya pantau itu tidak berubah. Jika diprosentasekan tidak bisa mengukur, tetapi kalau dilihat dari kemauan orang itu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang miskin itu sekitar 60 %. Contohnya di lingkungan saya, penduduk Serangnya yang menempati rumah-rumah kosong hampir 60 %, misalnya orang-orang dari Sawah Luhur, Terondol hampir rata-rata memang miskin dan memang orang-orang asli yang di kompleks itu memang tidak bekerja. Orang yang mengambil rumah secara resmi itu orang urban. Mereka sebenarnya bisa dapat bantuan, kendalanya orang Serang yang tinggal di kompleks itu cuma numpang, sementara penduduk tidak harus tinggal dimana. Mereka sebagai warga negara Indonesia yang miskin, sementara mereka menyatu di satu tempat. Anak-anaknya rata-rata 3 sampai dengan 4 anak, karena di Serang ada anggapan Keluarga Berencana (KB) itu haram, dan sebagainya, sehingga anak juga mesti tambah banyak. Mereka tidak membatasi angka kelahiran. Makin banyak anak, makin banyak rejeki, prinsip orang-orang seperti itu, rata-rata anaknya lebih dari 2 (dua) "

Berdasarkan wawancara informan, menurut analisa penulis bahwa dalam pelaksanaannya, sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri di Kota Serang ada 2 hal penting yang harus dilakukan dalam Refleksi Kemiskinan, yaitu Olah Rasa dan Olah Pikir, sehingga pendalaman yang dilakukan melibatkan mental, rasa dan karsa.

Refleksi *Olah Pikir*, Proses ini merupakan analisis kritis terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat,

untuk membuka mekanisme-mekanisme yang selama ini sering tidak tergalikan dan tersembunyi di dalamnya. Analisa kritis terhadap permasalahan kemiskinan sering juga disebut sebagai *analisa sosial*, artinya mencari secara kritis hubungan sebab akibat, sampai hal-hal yang paling dalam sehingga dapat ditemukan akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya. Setiap kondisi, baik itu eksternal maupun internal, harus ditelusuri dan kemudian dicari hubungan sebab akibatnya dalam suatu kerangka yang logis. Dalam hal ini setiap orang yang terlibat dalam refleksi belajar untuk berpikir analitis dan logis, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran kritis terhadap berbagai penyebab kemiskinan yang berakar pada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan.

Refleksi *Olah Rasa* adalah upaya untuk merefleksikan ke dalam terutama yang menyangkut sikap dan perilaku mereka terhadap permasalahan kemiskinan. Upaya olah rasa lebih menyentuh 'hati' masing-masing orang yang terlibat dalam proses refleksi untuk merenungkan apa yang telah diperbuat, dilakukan, sumbangan apa yang telah diberikan untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dan bagi kesejahteraan dan perbaikan hidup masyarakat. Artinya dalam olah rasa lebih menitikberatkan kepada sikap dan perilaku yang berhubungan dengan nilai-nilai luhur manusia (memanusiakan manusia). Diharapkan akan tumbuh kesadaran masing-masing bahwa manusia yang dianggap berdaya adalah manusia yang mampu menjalankan fitrahnya sebagai manusia yang berbeda dengan makhluk lain, yaitu manusia yang mampu memberi dan mengabdikan kehidupannya untuk kesejahteraan umat manusia.

Dari refleksi olah pikir dan olah rasa di atas, diharapkan cara pandang masyarakat akan berubah dan berimplikasi pada :

- a. Kesadaran bahwa seharusnya mereka tidak menjadi bagian yang menambah persoalan, tetapi merupakan bagian dari

- pemecahan masalah dengan cara berkehendak untuk memelihara nilai-nilai luhur kemanusiaan.
- b. Tumbuhnya pemahaman bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur, merupakan awal dari tumbuhnya modal sosial, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak luar terhadap masyarakat setempat.
 - c. Tumbuhnya kesadaran untuk melakukan upaya perbaikan, yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga setiap anggota masyarakat seharusnya mampu untuk memberikan sumbangan (baik tenaga, waktu, pikiran, ruang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi, dan sebagainya) untuk bersama-sama menanggulangi masalah kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemetaan Swadaya

Dalam proses identifikasi kebutuhan masyarakat, siklus lanjutan dari Refleksi Kemiskinan adalah Pemetaan Swadaya (PS). Dalam siklus ini masyarakat melakukan proses belajar untuk :

- a. Menggali informasi: bagaimana kondisi nyata dari masalah-masalah yang dikemukakan dan dirumuskan pada saat refleksi kemiskinan (sosial, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, kepemimpinan)? Masalah-masalah tersebut harus didukung oleh data dan fakta, sehingga diperlukan proses penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.
- b. Mengkaji, informasi dan fakta yang sudah didapatkan dianalisa dan dikaji bersama. Proses ini merupakan analisa kritis terhadap berbagai kondisi yang ada berdasarkan informasi dan fakta tadi untuk dicari sebab akibatnya termasuk kelompok-kelompok yang terkena dampak dari masalah yang ada (kelompok sasaran). Setiap informasi yang muncul dianalisa apakah hal tersebut merupakan

masalah yang sebenarnya atau hanya merupakan gejala sosial.

- c. Merumuskan masalah: Pada tahapan ini masalah yang sudah ditemukan dan disepakati bersama dikelompokkan (pengorganisasian masalah), kemudian dianalisa hubungan sebab akibatnya dengan kembali membuat pohon masalah seperti dilakukan dalam refleksi kemiskinan. Dengan demikian dalam melakukan analisa kritis akan terjadi proses refleksi yang berulang-ulang. Artinya refleksi kemiskinan tidak hanya terjadi pada saat siklus yang pertama akan tetapi terus dilakukan dalam siklus Pemetaan Swadaya.

Pada pelaksanaannya proses penggalian informasi, analisa masalah, dan perumusan masalah seringkali tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi merupakan proses yang dilaksanakan sekaligus. Metode dan teknik yang dikembangkan untuk Pemetaan Swadaya merupakan metode yang lebih menekankan pada proses diskusi masyarakat. Alat kajian (*tools*) yang dikembangkan adalah alat untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proses penggalian informasi, analisa dan perumusan masalah/kebutuhan, sehingga melalui proses tersebut sebetulnya masyarakat yang terlibat menjadi peneliti bagi dirinya sendiri dan kehidupan lingkungannya sendiri.

Terkait proses pemetaan swadaya, Koordinator BKM Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang mengemukakan :

“Dalam siklus PNPM itu kan ada, pertama, Pemetaan Swadaya (PS). Kepada masyarakat dengan adanya PNPM Mandiri apakah masyarakat menerima atau tidak? Setelah masyarakat menerima, kemudian masyarakat diperintahkan untuk melakukan pemetaan swadaya”.

Dengan terlibat dalam proses Pemetaan Swadaya, masyarakat diharapkan mampu untuk :

- a. Memahami persoalan nyata mereka sendiri yang berdasarkan kepada fakta dan informasi yang ada, sehingga yang mereka rumuskan bukan daftar keinginan tetapi daftar kebutuhan yang bermanfaat untuk lingkungannya terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- b. Pemecahan masalah (pemenuhan kebutuhan) tidak didasarkan kepada kehendak dan semata-mata bantuan 'orang luar' akan tetapi lebih banyak mengutamakan kemampuan sumberdaya dan swadaya masyarakat.
- c. Bagi 'orang dalam' (masyarakat) kegiatan ini menjadi proses belajar dan penyadaran tentang keadaan kehidupan dan lingkungan yang mereka hadapai, sehingga diharapkan terjadi pemahaman kondisi warga di lingkungannya (mengapa si A miskin, bagaimana kondisi si B, dan sebagainya). Penyadaran ini merupakan renungan terhadap permasalahan dirinya dan orang lain di lingkungannya sehingga diharapkan tumbuh kepedulian terhadap warga sekitar dan mencari jalan keluar dari keadaan-keadaan yang dianggap mengganggu (masalah).
- d. Bagi 'orang luar' (lembaga pengembang program). Kegiatan ini merupakan proses belajar dan 'penyadaran' dalam memahami keadaan masyarakat, serta cara pandang dan nilai-nilai masyarakat yang mempengaruhi kehidupan mereka. Proses belajar ini juga akan menimbulkan dukungan masyarakat terhadap program yang didampinginya, apabila benar-benar berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, serta program kemudian dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

Pengorganisasian Masyarakat : Pembangunan BKM/LKM

Siklus ini merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap adanya organisasi masyarakat warga yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur yang dimotori oleh pemimpin yang mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan

oleh masyarakat sebagai jawaban dari hasil analisa kelembagaan dan refleksi kepemimpinan yang sudah dilaksanakan dalam siklus Pemetaan Swadaya.

Organisasi masyarakat warga yang dibangun bisa berbentuk paguyuban atau perhimpunan yang mempunyai ciri-ciri :

- a. Adanya kesetaraan dimana komunitas terbentuk sebagai himpunan warga yang setara di suatu kelurahan
- b. Setiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan (*common bond*) seperti kepentingan, persoalan, tujuan, dan sebagainya
- c. Tiap anggota atau warga berhimpun secara sukarela, bukan karena terpaksa
- d. Membangun semangat saling percaya
- e. Bekerjasama dalam kemitraan
- f. Secara damai memperjuangkan berbagai hal, termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan
- g. Selalu menghargai keragaman dan hak azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi
- h. Menjunjung nilai demokrasi dalam setiap keputusan yang diambil dan secara intensif melakukan musyawarah
- i. Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari berbagai pengaruh kepentingan
- j. Mampu bekerja secara mandiri.

Posisi organisasi masyarakat warga :

1. Di luar institusi pemerintah
2. Di luar institusi militer
3. Di luar institusi pekerjaan atau usaha
4. Di luar institusi keluarga.

Organisasi Masyarakat Warga (paguyuban atau perhimpunan) tersebut dipimpin oleh pemimpin kolektif, yang beranggotakan antara 9 sampai 11 orang. Lembaga Kepemimpinan kolektif ini secara generik diberi nama

'BKM/LKM'. Kriteria pemimpin kolektif ini ditentukan oleh masyarakat yang dilakukan dalam refleksi kepemimpinan. BKM kemudian membentuk Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial maupun kegiatan lingkungan.

Terkait pembentukan BKM dan KSM, Unit Pengelola Lingkungan (UPL) BKM Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang mengemukakan :

"Proses pembentukan BKM melalui koordinasi Lurah dengan RT/RW. Di kelurahan terbentuk pengurus BKM, tiap RT 3 Orang disaksikan oleh Konsultan, Lurah dan tokoh masyarakat. Dari tingkat kelurahan memilih 11 orang. 11 orang tersebut memilih koordinator dengan sistem menulis di kertas. Setelah itu terpilih 1 orang koordinator, kemudian memilih unit-unit pelaksana yaitu UPK, UPL dan UPS. Setelah itu diajarkan cara membuat proposal. Potensi berkembangnya BKM tergantung anggota, kalau anggota tidak aktif maka secepatnya diadakan review kelembagaan untuk mengganti mereka yang tidak aktif tadi. Kemudian arti penting dibangunnya BKM adalah untuk membantu masyarakat miskin menanggulangi kemiskinan, membangun daerahnya yang belum dijangkau oleh pemerintah, membangun daerahnya sendiri. BKM yang telah terbentuk lalu mengadakan rapat atau urun rembug. Hasil dari urun rembugnya adalah menentukan daerah mana yang akan menjadi prioritas program setelah dilakukan survey, daerah yang belum kebagian akan diprioritaskan bagi program yang akan datang. Setelah itu mengundang RT dan membentuk KSM. KSM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 orang anggota.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut analisa penulis bahwa proses pembentukan BKM dan KSM adalah berdasarkan kesepakatan masyarakat melalui forum-forum rembug warga. Pengurus yang terpilih juga adalah merupakan anggota masyarakat setempat berdasarkan sistem perwakilan.

Terbentuknya BKM akan memudahkan pelaksanaan program, karena anggota BKM yang nantinya akan membuat perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) sebagai dokumen rencana program masyarakat di tingkatan desa/kelurahan, yang berisi daftar kebutuhan warga miskin sebagai pijakan operasional untuk melaksanakan program.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai proses pembentukan BKM, berikut adalah tahap-tahap pembentukan BKM/LKM :

Tahapan pembentukan 'BKM'/LKM, yaitu :

1. Membentuk panitia pemilihan yang dipilih oleh warga masyarakat. Panitia menyusun mekanisme pemilihan yang akan dipilih di kelurahan/desa setempat. Proses pemilihan anggota BKM/LKM adalah rahasia, tanpa pencalonan dan tanpa kampanye. Setiap warga desa pada masyarakat setempat menuliskan beberapa nama yang menurut mereka memenuhi kriteria yang telah disepakati, artinya anggota BKM/LKM yang dipilih adalah yang merepresentasikan nilai-nilai luhur, bukan atas dasar keterwakilan wilayah, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya.
2. Mekanisme pemilihan dilakukan berjenjang dari RT, RW, Kelurahan/Desa berdasarkan pada kohesitas (keakraban-hubungan sosial) diantara warga masyarakat setempat.
3. Membentuk Tim Perumus untuk menyusun draft AD/ART BKM/LKM. Draft AD/ART yang sudah disusun kemudian diuji publik dengan cara melakukan rembuk-rembug dengan komunitas-komunitas di kelurahan/desa setempat. Langkah selanjutnya draft yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil uji publik dibahas dan disahkan pada rembuk warga tingkat kelurahan/desa.
4. Setiap warga kelurahan/desa setempat berhak sebagai pemilih.

Setelah BKM terbentuk dan seterusnya secara rutin diadakan penilaian berkaitan dengan potensi berkembangnya BKM selama 3 bulan sekali. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi bersama terhadap kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan kinerja tersebut, maka dapat dilihat potensi berkembangnya BKM.

Berdasarkan uraian di atas tentang deskripsi pembentukan BKM, menurut analisa penulis bahwa proses pembentukan BKM sebenarnya diarahkan untuk menciptakan demokrasi. Hal tersebut sesuai dengan salah satu aspek pemberdayaan yang dikemukakan Dadang bahwa pada dasarnya pemberdayaan meliputi pembentukan iklim demokrasi secara umum di tingkat nasional sampai desa, sampai menjadi nilai yang inheren pada setiap tindakan dalam program pemberdayaan masyarakat, demokrasi memungkinkan pelebaran makna permasalahan dari lapisan bawah kepada elite masyarakat (Dadang, 2007 : 1).

Namun dalam implementasinya proses pembentukan BKM yang sangat prosedural dan sangat formal tersebut menjadikan demokrasi yang diciptakan masih sangat kaku dan mudah dimanipulasi karena cenderung berlangsung dari atas ke bawah (dari tokoh masyarakat ke masyarakat), hal tersebut akhirnya menjadikan kualitas demokrasi tersebut menjadi sangat rendah. Rendahnya kualitas demokrasi ini menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BKM yang terbentuk akan menjadi rendah dan pada akhirnya BKM sulit untuk menjalankan fungsinya sebagai institusi lokal yang dapat mengatasi berbagai masalah masyarakat di wilayahnya.

Pengembangan KSM

Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kelompok sosial pada tingkat akar rumput, yang mempunyai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan pemeliharaan lingkungan.

Dalam PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan warga miskin dapat terlibat dan menerima manfaat dari kelompok ini, dengan cara menjadi anggotanya dan diperlakukan adil seperti anggota masyarakat yang lainnya.

Pengembangan KSM tidak harus membentuk baru, tetapi bisa menggunakan kelompok-kelompok sosial yang sudah ada di masyarakat asalkan warga miskin mempunyai peluang untuk terlibat di dalam kelompok, dan penerima manfaat langsung (bantuan program) adalah warga miskin. Oleh karena itu hasil identifikasi kelompok sosial, hubungan sosial, modal sosial dan hasil kajian ekonomi dan lingkungan dalam siklus Pemetaan Swadaya menjadi dasar untuk pengelompokan masyarakat, terutama bagaimana strategi agar warga miskin terlibat.

Kegiatan-kegiatan dalam satu kelompok bisa gabungan antara kegiatan ekonomi, kegiatan sosial maupun kegiatan lingkungan. Contoh-contoh kegiatan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan simpan-pinjam anggota kelompok, bantuan pinjaman modal usaha untuk anggota kelompok miskin, kartu sehat, tabungan pendidikan dan sebagainya. Paling penting adalah bahwa kelompok ini dibentuk atau dikembangkan bukan untuk menjadi pembenaran untuk mendapatkan bantuan uang dari PNPM Mandiri Perkotaan, akan tetapi menjadi wahana bersama untuk saling belajar memecahkan masalah, saling peduli dan menghargai di antara anggotanya dan kalau sudah semakin berkembang dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak luar.

Proses pembentukan KSM-KSM, diawali dengan pelaksanaan kegiatan diskusi tentang hasil-hasil pemetaan swadaya yang bertujuan memberikan kejelasan tentang hasil-hasil pemetaan swadaya yang bertujuan memberikan kejelasan tentang peta dan profil keluarga miskin sebagai kelompok sasaran PNPM Mandiri. Setelah itu diadakan FGD (*Focus Group*

Discussion) Dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengintensifkan diskusi tentang mengapa, apa dan bagaimana serta peran strategis berkelompok. Selanjutnya warga/calon-calon anggota KSM mengadakan serangkaian pertemuan masing-masing untuk membahas aturan, kepentingan dan kesepakatan bersama untuk membentuk KSM.

Setelah warga membentuk KSM melalui serangkaian pertemuan antar calon anggota KSM dan diperoleh kepastian tidak adanya masyarakat yang berkeberatan terhadap KSM dan calon anggotanya, maka hasil kesepakatan pembentukan KSM diajukan ke BKM untuk dinilai kelayakan proses pembentukannya. Kemudian KSM yang dinilai layak dan sebelum KSM mengajukan usulan kegiatan untuk memperoleh dana bantuan BLM, maka diadakan pelatihan dasar tentang PNPM Mandiri dan pelatihan lanjutan tentang institusi masyarakat bagi KSM-KSM yang telah dinilai layak.

Pembentukan KSM dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan Sitorus, dimana menurutnya upaya penanggulangan kemiskinan jika dimanfaatkan basis solidaritas sosial. Pendekatan ini dapat mengambil bentuk-bentuk upaya mengembangkan kelompok-kelompok kecil keswadayaan di tingkat kampung/dukuh dimana gejala solidaritas masih menonjol (Sitorus, 2000 : 40-41). Namun dalam implementasi PNPM Mandiri yang sebagian besar dilakukan di daerah perkotaan dimana rasa kesetiakawanan sosial semakin menipis seiring dengan perkembangan pola pikir kapitalisme, tantangan pembentukan KSM menjadi lebih berat. Apalagi dalam proses pembentukan KSM tidak mengikuti kaidah dari bawah, artinya inisiatif tetap dilakukan sepenuhnya oleh pihak luar, sehingga pembentukan KSM kurang dipahami oleh anggota KSM sendiri.

Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dimaksudkan sebagai tahapan kegiatan untuk membahas berbagai kebutuhan pembangunan, menyepakati prioritas pembangunan dan menyusun rencana kegiatan jangka pendek dan menengah berdasarkan visi bersama, serta potensi sumber pembiayaannya yang dituangkan dalam PJM pronangkis.

PJM pronangkis (Perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan) merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan, baik jangka pendek selama satu tahun maupun jangka menengah selama 3 tahun. Program dikembangkan berdasarkan hasil kajian masalah (kebutuhan) dan analisa potensi dalam Pemetaan Swadaya.

Terkait penyusunan PJM pronangkis, Koordinator BKM Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang mengemukakan :

“ Setelah pemetaan swadaya, masyarakat mengidentifikasi mana-mana kebutuhan masyarakat itu. Kebutuhan masyarakat diusulkan kepada kelurahan. Gabungan usulan-usulan setiap RW (Rukun Warga) itu namanya Program Jangka Menengah (PJM). Setelah dibuat PJM, kemudian ditentukan Program mana yang skala prioritas “.

Walaupun siklus ini merupakan siklus lanjutan dari pemetaan swadaya akan tetapi pelaksanaannya setelah pembangunan BKM/LKM dan pengembangan KSM. Kegiatan ini dilakukan belakangan, dengan dasar pemikiran bahwa anggota masyarakat yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Di sisi lain penerima manfaat dari program ini diprioritaskan warga miskin yang sudah diidentifikasi dalam pemetaan swadaya, tergabung dalam KSM dibentuk bukan karena adanya Pronangkis tetapi justru sebaliknya penerima manfaat program didasarkan kepada KSM yang sudah ada dalam pengembangan PJM pronangkis, sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya diharapkan bukan hanya dari

PNPM Mandiri, akan tetapi harus dipikirkan pemenuhannya dari swadaya masyarakat, Dinas/pemerintah setempat dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai program yang sejalan dengan PJM Pronangkis yang disusun oleh masyarakat.

Setelah satu tahun program berjalan, dilakukan evaluasi tahunan untuk melihat dan mengkaji kembali apakah program yang dikembangkan sudah tepat tujuan dan tepat sasaran dan bagaimana hasilnya. Kegiatan ini juga sekaligus untuk memperbaharui data-data yang ada, sehingga kesalahan-kesalahan akan segera dapat ditemukan dan dapat diperbaiki. Berdasarkan hasil evaluasi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan program apabila diperlukan.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan atau pengajuan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personil tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan masyarakat, bertanggungjawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana.

Terkait pelaksanaan kegiatan, Koordinator BKM Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang mengemukakan :

“Setelah PJM (Perencanaan Jangka Menengah) dibuat, dilakukan lokakarya, disampaikan bahwa yang dapat RW ini, di RW tersebut dipersilahkan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk persiapan pelaksanaan program-program dengan volume-volume kegiatan yang akan

direalisasikan sesuai dengan besarnya bantuan dana. Kemudian KSM menyiapkan proposal usulan kemudian diverifikasi oleh KMW, setelah dinyatakan layak diadakan proses pencairan. Setelah proses pencairan, baru pelaksanaan, kemudian evaluasi sejauh mana pelaksanaan program, terakhir pelaporan. Prosesnya seperti itu, dan itu memang berjalan tetapi tetap didalam panduan BKM”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelaksanaan kegiatan sebaiknya melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengorganisasian kelompok melalui strategi pembentukan KSM-KSM, sebagaimana pendapat Kartasmita yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan sosial sebaiknya menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanggulangannya dilakukan secara individu (Kartasmita dalam Koko, 2003 : 45-46).

Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga ahli (konsultan) perseorangan yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, dan bertanggungjawab.

Efisiensi diwujudkan dalam bentuk mencari dan membandingkan harga barang/jasa untuk kualitas yang sama/setara, serta memilih harga yang terendah sesuai kebutuhan. Untuk mendapatkan harga yang terendah, masyarakat dapat melakukan pengadaan langsung kepada sumber penghasil barang/jasa, seperti pabrikan atau distributor, agen resmi atau pangkalan pasir/batu (dalam hal kegiatan fisik), dan sedapat mungkin menghindari pengadaan

barang/jasa melalui perantara yang tidak memberikan nilai tambah.

Efektivitas diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang/jasa oleh masyarakat harus dilakukan secara kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Keterbukaan diwujudkan dalam bentuk publikasi sekurang/kurangnya pada papan pengumuman di lokasi pelaksanaan kegiatan yang mudah dilihat dan di sekretariat pelaksana kegiatan dengan mencantumkan jenis kegiatan, besaran dana, penyedia barang/jasa di atas Rp 50 juta, waktu pelaksanaan, dan penanggungjawab kegiatan sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, memonitor, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan.

Keadilan diwujudkan dalam bentuk partisipasi setiap komponen masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hasil kegiatan tersebut. Bertanggung jawab diwujudkan dalam bentuk setiap pengeluaran dana dalam pelaksanaan barang/jasa dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, seperti pencatatan penerimaan dan pengeluaran, kuitansi pembelian dan bukti pembayaran honor, maupun secara teknis seperti kuantitas dan kualitas barang/jasa sesuai dengan rencana.

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hasil Kegiatan

Pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan dan pemeliharaan pelayanan dan prasarana yang sudah dibangun/dilaksanakan. Terkait pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BKM Desa Sepang, Kecamatan Taktakan mengemukakan :

"Masyarakat sampai saat ini masih memanfaatkan fasilitas air bersih dan MCK yang sudah dibangun dari PNPM Mandiri P2KP di Kampung Cipanas, Desa Sepang".

Selain pernyataan Informan di atas, Unit Pengelola Lingkungan (UPL) BKM Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang mengemukakan :

"Masyarakat memanfaatkan fasilitas lingkungan yang sudah dibangun dari program PNPM Mandiri dan berpartisipasi dalam pemeliharannya. Dalam hal pemeliharaan sarana fisik lingkungan (misalnya : MCK, air bersih) dipilih koordinator, biasanya RT atau Ketua Pemuda di wilayah setempat. MCK ada di RT.2 Kampung Kubang Apu Kelurahan Terondol. Namun terkadang masyarakat yang memakai sarana air bersih tidak mau isi kencleng. Jika ada fasilitas yang rusak dibiarkan (misalnya : kran air), kesadaran masyarakat masih kurang karena lupa kalau fasilitas diberikan untuk dipelihara. Hambatan yang lain yaitu masyarakat kurang sreg (=kurang suka) dengan PNPM karena tidak ada uangnya".

Kemudian Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BKM Desa Drangong, Kecamatan Taktakan, mengemukakan :

"Wilayah yang menjadi sasaran program adalah wilayah yang terdapat masyarakat miskin dan wilayahnya kumuh. Fasilitas sarana air bersih yang sudah dibangun di Kampung Cirengas, Desa Drangong kini tidak jalan/macet karena masyarakat tidak mau membayar listrik".

Dari pernyataan yang sudah dikemukakan oleh 3 (tiga) orang informan di atas, menurut analisa penulis bahwa masyarakat memang memanfaatkan fasilitas fisik yang sudah dibangun melalui PNPM mandiri, hanya dalam hal pemeliharaan kurang mendapatkan perhatian masyarakat, sehingga ditemukan fasilitas fisik yang rusak, bahkan sudah tidak lagi digunakan oleh masyarakat karena tidak dirawat dan terbengkalai karena ketiadaan dana pemeliharannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis analisis bahwa Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Serang diimplementasikan dalam satu siklus berisi tujuh tahapan kegiatan yang dikembangkan dalam intervensi Program Nasional Masyarakat Mandiri. Strategi implementasi tersebut juga merupakan pengejawantahan dari daur program pembangunan partisipatif mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah, masyarakat, fasilitator dan konsultan untuk menunjang keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kota Serang.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan penggunaan strategi menentukan keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan. Namun kecenderungan yang terjadi adalah inisiatif yang terjadi masih bersifat *top down*, ide-ide muncul dari tataran konsultan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ke Badan Keswadayaan Masyarakat dan kemudian ke Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, penulis merekomendasikan kepada pemerintah bahwa strategi implementasi program pemberdayaan masyarakat di tataran lokal lebih memberikan ruang kepada masyarakat sebagai pengambil keputusan melalui lembaga keswadayaan yang sudah dibentuk ataupun sudah ada sebelumnya, sehingga mekanisme yang terjadi tidak lagi *top down* tetapi *bottom up* sebagaimana yang semestinya diharapkan terjadi pada program-program pemberdaan masyarakat. Namun demikian proses pendampingan dari konsultan program maupun pemerintah mulai tahap sosialisasi awal sampai pemeliharaan

kegiatan masih dibutuhkan untuk mengawal implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Dengan demikian ketika program selesai, masyarakat mampu memberdayakan dirinya tanpa harus selalu bergantung pada program-program pemerintah. Namun pada prinsipnya apapun strategi penanggulangan kemiskinan yang dipilih tidak boleh mematikan mekanisme atau kelembagaan lokal yang sebelumnya beroperasi.

Daftar Pustaka

- Dadang, Solihin. 2007. Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota. www.dadangsolihin.com.
- Gunawan, Achmad. 2007. *Tentang Pemberdayaan Masyarakat*. <http://grahapamulang.wordpress.com/>
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Andi.
- Koko, Surya Darma. 2004, *Strategi Pemberdayaan Komunitas Nelayan Desa Ketapang*. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary. 2007. Newyork : Oxford University Press.
- Moeljarto. 1995. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, 2007.
- Pranarka dan Vidhyandika M. dalam Onny.SP dan AMW. Pranarka (ed) 1996 *Pemberdayaan*. Jakarta: CSIS.

Sitorus, Felix. 2000. *Menuju Sosiologi Kemakmuran*. Jakarta :
Jurnal Sosiologi Indonesia.

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta : Gramedia.



OPTIMALISASI POTENSI PARIWISATA DI PROVINSI BANTEN

Oleh : Titi Stiawati

Pendahuluan

Provinsi Banten memiliki sumber alam dan peninggalan budaya serta peninggalan sejarah yang potensial untuk dikembangkan. Selain itu juga Provinsi Banten dapat dijadikan tempat tujuan wisata yang menarik dan menghasilkan Pendapatan Daerah Asli (PAD) yang besar bila dikembangkan secara optimal.

Salah satu aset daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan yaitu sektor pariwisata yang tersebar luas mulai dari kawasan wisata pantai sampai wisata alam pegunungan. Disamping itu pula wisata pantainya pun terkenal seperti Pantai Anyar, Pantai Karang Bolong dan Pantai Karang Taraje. Adapun wisata bahari dan kepulauannya seperti Selat Sunda, Teluk Banten, Pulau Sangiang, Pulau Tunda dan Pulau Burung. Sedangkan wisata alam pegunungannya seperti cagar alam Rawa Dano dan Air Panas Batu Kuwung, disamping itu pula terdapat wisata keurbakalaan yang terkenal yaitu seperti Masjid Agung Banten, Benteng Spell Wijk, Keraton Surosowan,

Keraton Kaibon, Situ Tasik kardi, dan Museum Banten Lama. Selain tempat-tempat wisata tersebut yang memiliki potensi untuk Pendapatan Daerah Asli (PAD) terdapat pula kesenian daerah yang dapat menjadi unggulan untuk menunjang pengembangan pariwisata seperti Debus, Pencak Silat, Rudat, Rampak Bedug dan lain-lain.

Keanekaragaman wisata tersebut diatas sayangnya belum dikembangkan secara maksimal karena masih dijumpai permasalahan dalam perkembangannya. Secara umum masalah yang dijumpai dalam bidang pariwisata ini adalah belum terpromosikannya daerah wisata potensial, pengelolaan wisata yang terkesan seadanya, kurangnya pusat informasi wisata, masih rendahnya peran serta masyarakat dan wisata dalam pengembangan pariwisata, terbatasnya informasi dan data tentang situs-situs yang masih belum terurus.

Peluang dan Tantangan Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata ditandai oleh 4 (empat) faktor utama sebagai berkembangnya pariwisata di suatu daerah maupun suatu negara yaitu berkembangnya usaha perhotelan, usaha restaurant, daya tarik wisata yang ditawarkan dan persaingan harga. Upaya untuk mencapai perkembangan kepariwisataan tidaklah mudah, hal tersebut didasrkan pada 2 (dua) faktor yang secara umum sangat mempengaruhi yaitu investasi dan keamanan.

Investasi sektor pariwisata bidang perhotelan, restoran, pengelolaan objek maupun lalu lintas kunjungan wisatwan melalui perusahaan perjalanan wisata dipengaruhi oleh salah satu faktor diantara faktor-faktor lainnya yaitu presentase tingkat harian relative rendah karena pada saat *weekend* dan musim liburan saja harian hotel penuh. Masalah keamanan, baik skala nasional maupun lokal dapat menjadi pemicu pariwisata terpuruk, sebagai contoh terror bom maupun wabah penyakit dan bencana alam.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pariwisata adalah kemampuan berkompetensi dengan daerah lainnya dalam mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki. Pariwisata sangat perlu dikembangkan dan dibina secara professional sebagai salah satu sector unggulan agar dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Hal ini tentu tidak terlepas dari peranan pemerintah melalui kebijakan untuk menciptakan berbagai kemudahan bagi masyarakat industri pariwisata. Provinsi Banten merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya, baik alam maupun ekonomi yang didalamnya termasuk pariwisata. Disatu sisi keanekaragaman potensi alam dan budaya yang ada sudah diketahui oleh wisatawan, tetapi di sisi lain masih banyak potensi alam dan budaya belum dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pariwisata.

Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa dengan mengembangkan pariwisata sebagai sarana mempercepat terwujudnya pembangunan daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Peranan sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan yang dapat memacu perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan suatu kebijakan strategi dalam pembangunan, pembinaan dan pengembangan pariwisata agar arah pembangunan daerah terutama bidang pariwisata dapat berjalan efektif, efisien terpadu dan berkesinambungan.

Promosi dan Objek Wisata Potensial

Berbicara mengenai promosi objek wisata, butuh pengelolaan dan kesadaran yang tinggi untuk dapat menciptakan pariwisata Banten menjadi sebuah industri pariwisata. Hal ini dapat terjadi dengan melakukan pengelolaan yang baik, kompetensi serta sumber daya manusia. Disamping itu banyak faktor yang harus dilakukan agar pariwisata menjadi sebuah industri dan dijadikan andalan pemasukan pendapatan daerah.

Kemajuan sebuah industri pariwisata pada dasarnya terletak pada bagaimana cara mengelola keseluruhan objek wisata potensial yang ada. Dengan demikian industri tidak harus diorientasikan kepada pabrik-pabrik ataupun industri besar saja, akan tetapi dari segi aspek kerajinan masyarakat pun dapat menjadi industri berpotensi sangat besar untuk menjadi industri yang besar. Akan tetapi dalam pengelolaannya membutuhkan waktu yang panjang dan dilakukan secara bertahap agar output yang dihasilkan industri pariwisata mampu menyerap lapangan kerja mengingat banyaknya tenaga produktif yang belum dapat diterima di industri lainnya.

Dalam memasuki era 2012 ini industri di Provinsi Banten sudah sangat terlihat dan cukup menjanjikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya investor yang berminat dan melakukan investasi di Provinsi Banten. Kondisi ini merupakan suatu angin segar dalam iklim investasi di Provinsi Banten. Alasannya mengapa mereka mau berinvestasi di Provinsi Banten diantaranya adalah letak Provinsi Banten daerah-daerah bagian wilayahnya yang strategis, kemudahan biaya yang tidak mahal dan prospektif serta bebas banjir.

Pemasaran Wisata di Masa Depan Berorientasi pada Daerah Tujuan Wisata

Dengan penerapan yang terus meluas terhadap pendekatan pemasan modern dan berorientasi pada pengujung, tentu akan mendorong pertumbuhan arus wisata. Peningkatan informasi yang dibutuhkan mengenai karakteristik dan motivasi wisatawan akan mengakibatkan pemasaran wisata makin efektif. Tetapi ada faktor lain dewasa ini yang membuktikan bahwa arus perjalanan akan terus berkembang pesat, meskipun seandainya hanya dengan menerapkan pendekatan historis yang berorientasi pada produk, tentunya dengan tingkat pertumbuhan yang lamban, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Suatu pertambahan jumlah penduduk baik di negara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang meskipun disana sini terus diupayakan gerakan-gerakan pertumbuhan penduduk mencapai titik nol. Makin banyak penduduk berarti makin banyak orang yang dapat dan mungkin berminat untuk berwisata.
2. Tingkat pendapatan perkapita yang terus bertambah dan makin banyaknya jumlah penduduk, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang. Walaupun inflasi pasti membawa pengaruh buruk, namun inflasi tidak akan membendung semua sasaran efisiensi dalam produktifitas, sebagai akibat dari pengguna teknologi canggih. Paling tidak karena makin banyak orang tentu akan makin banyak uang yang dibelanjakan di perjalanan.
3. Peningkatan kesempatan rata-rata belajar bagi setiap orang baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Meskipun pendapat berikut ini mungkin dapat dibantah bahwa tingkat pendapatan meningkat berkat pendidikan dan karena itu faktor ini menjadi pemikiran terus dimana saja. Pendidikan memperluas cakrawala, wawasan, perhatian orang dan karena itu orang terdorong untuk mencari pengalaman dengan berwisata.
4. Makin meningkatnya hasrat bepergian karena pengalaman berwisata pada waktu sebelumnya. Tampaknya perjalanan adalah suatu tuntutan hasrat hati yang tidak terpisahkan hanya dengan sekali bepergian. Tetapi sekali berwisata akan merangsang ketagihan untuk berwisata terus. Karena itu orang terpacu untuk berwisata terus pada tahun-tahun berikutnya.
5. Penyempurnaan yang terus-menerus dibidang teknologi angkutan sehingga akan lebih mempermudah, memperaman, mempernyamankan perjalanan orang-orang. Meskipun mungkin biaya alat angkutan akan terus

menjadi semakin mahal, namun peningkatan itu tidak akan lebih tinggi dari tingkat harga rata-rata. Nyatanya karena harga angkutan udara dan harga bahan bakar kendaraan darat terus meningkat, akibatnya orang-orang mungkin akan mempersiapkan beberapa jam terbang atau beberapa hari libur demi menutup biaya peningkatan harga-harga itu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu bahwa suatu hal tidak dapat dielakkan bahwa makin banyak orang yang akan melakukan perjalanan wisata yang makin nikmat, karena peningkatan angka pertumbuhan yang potensi setiap tahunnya, maka kita harus mempersiapkan dasar-dasar pendekatan pemasaran wisata untuk masa depan.

Dengan peningkatan yang terlihat dewasa ini sudah waktunya kita mengalihkan perhatian kita terhadap dampak perluasan pariwisata di daerah-daerah tujuan wisata. Orang tidak akan lagi dapat beranggapan bahwa jumlah pengunjung sekurang-kurangnya sebagian pertambahan ini merupakan akibat program pemasaran wisata terpadu yang akan membawa dampak positif seluruhnya bagi daerah tujuan wisata.

Orang tidak dapat berfikir bahwa manfaatnya hanya berupa keuntungan belaka, penciptaan lapangan kerja baru, pendapatan berupa pajak-pajak bertambah dan perbaikan neraca pembayaran. Kitapun harus memikirkan juga dampak-dampak negatifnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan. Hanya sesudah menganalisis dampak-dampak positif dan negatif kegiatan pariwisata bagi suatu daerah kunjungan, barulah kita melangkah untuk merancang program pemasaran wisata yang optimal. Dengan demikian untuk masa depan, rencana-rencana pemasaran wisata harus berorientasi pada daerah tujuan wisata.

Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata seperti hanya pembangunan pertambangan, pabrik-pabrik, pertanian atau jenis pembangunan ekonomi lainnya, akan menimbulkan bermacam-macam pengaruh terhadap suatu daerah, tempat itu berlangsung. Tentu saja dampak atau pengaruh bermacam pembangunan itu akan berbeda-beda namun ada yang kerap kali sangat terasa. Semua itu akan kelihatan sekali dampaknya terhadap perekonomian, masyarakat, pemerintah dan atau lingkungannya.

Demikian pula halnya dengan berbagai jenis pariwisata akan menimbulkan berbagai dampak pada daerah tujuan wisata. Umpamanya pengaruh wisata caravan tentu akan berbeda dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh wisata yang berorientasi pada hotel-hotel mewah dan wisata yang orientasinya sekedar mengunjungi handai taulan atau sanak saudara.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pembagunan itu kita batasi pembahasannya hanya pada bidang pariwisata saja, meskipun dalam arti yang luas dapat berlaku juga pada bidang-bidang pembangunan ekonomi lainnya. Adapun pengaruh yang muncul itu dapat kita klasifikasikan menjadi 3 dasar pemikiran yang menimbulkan perubahan di daerah tujuan wisata yakni : arah perubahan, tingkat perubahan dan langkah perubahan.

Arah perubahan menunjukkan apakah perubahan itu membawa dampak positif atau negatif terhadap daerah tujuan wisata itu atau terhadap beberapa unsur daerah tujuan wisata itu. Sebagai contoh ; anggaplah bahwa sebagai hasil kesuksesan program pemasaran wisata yang ditambah dengan faktor lain lalu terjadilah suatu peningkatan jumlah kedatangan wisata yang ditambah dengan faktor lain, lalu terjadilah suatu peningkatan jumlah kedatangan wisatawan yang menakjubkan. Dari kacamata pengusaha industri perhotelan,

restoran, darmawisata dan industri wisata lainnya, perubahan itu tentu dianggap mereka sebagai sesuatu yang positif karena hal itu berarti peningkatan keuntungan. Di sisi lain perubahan yang sama itu berarti diperlukan penambahan lahan, misalnya pertumbuhan lahan tepi pantai untuk kegiatan pariwisata.

Dengan demikian hal itu tentu harus mengubah pemanfaatannya dari pemanfaatan penduduk setempat. Untuk beberapa anggota masyarakat setempat, tindakan perubahan itu dapat diartikan suatu kerugian bagi mereka, karena itu perubahan yang terjadi disana dinilai negatif atau perubahan dalam arti bertambahnya jumlah pengunjung dapat dinilai bahwa makin banyak orang yang berkerumun ke suatu daerah tertentu sehingga dapat mengakibatkan apa yang disebut oleh para ahli lingkungan hidup sebagai suatu pemanfaatan kawasan yang sudah menjurus kepada suatu polusi lingkungan.

Dari sudut pandang ini, perubahan yang sama telah mendatangkan suatu dampak yang negatif. Jelaslah bahwa tugas pokok pemasaran wisata akan membawa pengaruh positif sebanyak mungkin sambil membendung pengaruh negatif seminimal mungkin. Mungkin orang akan membantah karena setiap perubahan pasti akan mendatangkan pengaruh yang positif maupun negatif jika dilihat dari pengaruh itu terhadap daerah tujuan wisata secara keseluruhan.

Dengan demikian penting adanya pemikiran untuk meneliti dampak suatu perubahan terhadap perekonomian masyarakat, pemerintah, dan lingkungan hidup beberapa contoh perubahan dan pengaruhnya dapat dilihat sebagai berikut :

Bidang Ekonomi

Peningkatan jumlah kunjungan hari-hari libur atau besarnya perbelanjaan wisatawan akan membawa dampak pada :

- a. Tingkat keuntungan bertambah bagi beberapa jenis usaha dalam industri pariwisata.
- b. Tingkat keuntungan meningkat bagi beberapa jenis usaha yang menyediakan keperluan usaha industri pariwisata.
- c. Penurunan keuntungan bagi beberapa jenis usaha dalam industri pariwisata dari pendirian perusahaan-perusahaan baru dan besar yang menawarkan jasa wisata yang sama atau hampir mirip
- d. Peningkatan kesempatan kerja baik di negara sumber wisatawan maupun di negara penerima wisatawan.
- e. Peningkatan imbalan jasa yang dibayar di masyarakat daerah tujuan wisata sehubungan dengan permintaan tenaga kerja yang meningkat pada industri pariwisata yang makin meluas.
- f. Melonjaknya harga-harga tanah atau tingkat sewa fasilitas wisata di dalam atau sekitar kawasan wisata yang sedang dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata.
- g. Meningkatkan biaya-biaya pada umumnya untuk berbagai barang kebutuhan sehubungan dengan meningkatnya gaji dan upah pekerja lokal.
- h. Menurunnya jenis kegiatan ekonomi dalam perusahaan yang sebelumnya menguasai tempat-tempat wisata kemudian tergusur oleh perluasan industri pariwisata.

Bidang Sosial

Peningkatan jumlah kunjungan wisata lamanya hari-hari kunjungan wisata atau pengeluaran wisatawan dapat mengakibatkan hal-hal berikut :

- a. Bertambahnya kesempatan bertukar pendapat antara sesama orang-orang dari berbagai daerah yang bisa menjurus pada peningkatan pengertian dan pergaulan sesamanya.

- b. Pengeluaran yang tidak seimbang dari dampak-dampak positif pariwisata, mungkin dikarenakan kurangnya latihan atau kemampuan dari kelompok-kelompok tertentu.
- c. Perbaikan kemudahan-kemudahan yang menunjang perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah tujuan wisata, sebagai akibat perlunya pengembangan kemudahan-kemudahan itu untuk dipergunakan oleh para wisatawan.
- d. Perubahan pola hidup masa lalu yang kerap kali disebabkan oleh pembangunan atau perluasan penyebaran mata uang.

Bidang Pemerintahan

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan jumlah hari-hari kunjungan atau jumlah perbelanjaan wisatawan akan membawa dampak :

- a. Bertambahnya jumlah pajak, jumlah perizinan, dan jumlah pendapatan pemerintah lainnya didaerah kunjungan wista.
- b. Bertambahnya biaya-biaya karena makin meningkatnya jasa-jasa dan fasilitas baru dari pemerintah, yang kadang-kadang melebihi atau tidak seimbang dengan peningkatan pendapatan pemerintah.
- c. Peningkatan pengawasan pemerintah didaerah tujuan wisata terhadap industri pariwisata.

Bidang Lingkungan Hidup

Pertambahan jumlah kunjungan jumlah hari-hari kunjungan atau jumlah pengeluaran wisatawan dapat membawa pengaruh :

- a. Perbaikan dan peningkatan lingkungan hidup agar tampak menarik dan memuaskan para wisatawan.

- b. Pemupukan jumlah kunjungan dan penempatan berlebihan atas kawasan wisata tertentu atau perairan tertentu.
- c. Terjadinya polusi udara, air, kebisingan, dan polusi sejenisnya yang timbul karena bertambahnya jumlah penghuni di daerah tujuan wisata itu (baik para wisatawan maupun penduduk setempat).
- d. Penurunan kualitas lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga sangat mengurangi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata.

Tujuan Kepariwisata

Tujuan akhir dari kepariwisataan yaitu mencapai keuntungan bagi daerah tujuan wisata tersebut dan juga mensejahterakan masyarakat sekitar daerah tujuan wisata. Disamping itu dalam manfaat-manfaat yang diharapkan baik wisatawan atau investor asing, hal itu hanya akan mempunyai arti jika kegiatan mereka terarah kepada tujuan akhir pariwisata yaitu semua dikaitkan dengan kepentingan daerah tujuan wisata dan rakyatnya. Untuk membuktikan kebenaran ini. Program terpadu pemasaran wisata harus berorientasi pada daerah tujuan wisata.

Suatu program terpadu pemasaran wisata yang berorientasi pada daerah tujuan wisata yaitu memperkenalkan banyak konsep baru dalam bidang pemasaran wisata. Pada saat konsep orientasi pada pegunungan menggantikan konsep orientasi pada produk, pada saat itulah konsep-konsep atau motivasi-motivasi ini dan konsep kepuasan pengunjung diperkenalkan dalam program-program pemasaran wisata.

Sepuluh strategi yang mungkin dalam pemasaran pariwisata

Terdapat 10 (sepuluh) strategi klasik pemasaran yang mungkin dilakukan dalam pemasaran pariwisata :

1. Mendorong atau menarik ?

Dalam strategi pemasaran yang mendorong hampir semua upaya pemasaran diarahkan pada saluran distribusi, yang patut dipacu terus baik secara moral maupun dana keuangan oleh para penjual, agar produknya betul-betul bisa samapi pada khalayak konsumen atau pengunjung wisata.

Dalam strategi pemasaran yang menarik dana dan upaya tidak terlalu dikerahkan pada organisasi pendistribusian produk, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya pengiriman berita secara langsung kepada konsumen, yang akan ditarik untuk membeli produk itu melalui saluran distribusi yang memintanya

2. Berpijak pada sektor –sektor yang semakin bertumbuh

Dalam strategi ini dilakukan upaya untuk mengetahui pertumbuhan berbagai sektor dan kerahkan konsentrasi kesana. Siapa pemilik uang dan siapa yang semakin besar menyediakan dana kemudian ? Akankan kita jual produk kita kepada kelompok remaja atau pekerja serikat buruh dan kepada klub yang ada atau berusaha menerobos pasar konvensional yang makin meningkat setiap tahunnya. Karena konvensional ini adalah pasar usaha atau kaum profesional bidang disiplin ilmu tertentu maka sifat usaha itu terusat dan dengan jelas dapat diketahui sumber usaha yang selalu berulang secara massal.

3. Spesialisasi

Sekiranya usaha perjalanan anda sudah terkenal sebagai perusahaan yang menyelenggarakan wisata budaya, orang akan mendatangi perusahaan yang anda kelola. Contoh, terdapat suatu perusahaan perjalanan di Boulevard, Italy di Kota Paris yang mengkhususkan diri dalam menyelenggarakan wisata menunggang kuda ke seluruh Eropa. Pengkhususan ini dalam usaha perjalanan untuk kelompok profesi juga cukup menguntungkan, misalnya

saja bagaimana kalai untuk kelompok para dokter atau akuntan atau para peneliti bayaran.

4. Kembangkan suatu kebijakan yang mantap mengenai produk-produk baru

Setiap tahun beratus-ratus produk wisata baru dikembangkan dan mulai banyak dan tidak ada satupun yang menghalangi Negara kecil sekalipun untuk mengembangkan produk wisatanya dan daya tehniknya sendiri berdasarkan kerajinan tangannya, perayaan-perayaan tradisional. Film, musik atau sumber-sumber alam (seperti akuarium tropis, taman anggrek, museum kesenian rakyat local dan sebagainya). Tetapi produk wisata itu harus cocok dengan latar belakangnya.

5. Pikirkanlah bagaimana meningkatkan pamor merk produk
Bagi kelompok elit, "Ritz" di Paris adalah suatu merk nomor satu, mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merebut pamor nama merk produknya itu tetapi kini hasil nama harum itu sangat efektif. Investasi yang besar sekali digunakan dalam kegiatan kehumasan untuk merebut nama merk yang terkenal, namun hasil yang diperoleh sama suksesnya, karena mereka dapat merebut para calon pembeli yang mereka kehendaki.
6. Rebutlah tambang emas yang belum digarap
Beberapa hotel yang memiliki ruang pesta yang besar khususnya di ibukota-ibukota yang agak kecil, sesungguhnya hotel-hotel itu sudah meningkatkan tingkat penghunian yang tinggi dengan cara melakukan usaha berikut ini sepanjang tahun :
 - a. Mengadakan perjamuan-perjamuan
 - b. Menyelenggarakan pameran busana
 - c. Mengadakan konferensi pers
 - d. Menyelenggarakan pameran mengenai industri yang disertai dengan pertunjukan film
 - e. Mengadakan seminar, latihan dan kelompok belajar

- f. Mengadakan lomba-lomba penulisan
- g. Mengadakan perjamuan-perjamuan untuk karya social
- h. Mengadakan wejangan terbuka untuk umum
- i. Menyelenggarakan pameran lukisan
- j. Mengadakan pelelangan barang antic
- k. Mengadakan pekan buku
- l. Mengadakan festival film
- m. Menyelenggarakan resepsi perkawinan
- n. Mengadakan upacara dalam rangka kampanye pemilihan
- o. Menyelenggarakan upacara penutupan suatu olah raga atau upacara malam pemilihan keratuan
- p. Menyelenggarakan kontes lagu dan tarian rakyat.

Akan tetapi bagian ruangan perjamuan yang tidak dipergunakan sebenarnya merupakan beban biaya yang besar sekali, yang tersembunyi di dalam beban-beban biaya tetap.

7. Perlukan suatu produk yang sudah meulai menurun daya tariknya diperbaiki

Tentu perlu ada biaya maintenance dari produk wisata yang ada, meskipun biaya perbaikan dan pemeliharaan sangat besar, namun harga belinya cukup rendah, sedangkan nilai kepariwisataan sangat besar.

Usaha yang dilakukan yaitu menyesuaikan bangunan yang diperbaiki dengan selera wisatawan yang akan menginap disana dan menjalankan usaha sehingga bias untung. Biasanya hal ini dilakukan dengan subsidi pemerintah.

8. Hargailah para pelanggan sebagai manusia yang patut dihormati

Penghargaan terhadap wisatawan merupakan factor yang terpenting dalam pelayanan, karena mereka pasti akan kembali lagi ke daerah tujuan wisata untuk membelanjakan uangnya.

9. Tampilkan produksi yang berkualitas

Seandainya saudara mengelola sebuah hotel berbintang lima yang dimiliki oleh perusahaan internasional dan menyajikan makanan dalam plastik sebagaimana yang dilakukan oleh hotel-hotel internasional, mengapa saudara tidak mengubah cara yang demikian, sebagai gantinya mengapa saudara tidak sajikan makanan yang paling lezat di kota itu.

Semua itu memerlukan cara masak yang teliti, tidak memasak makanan itu pada hari sebelum disajikan (sajian dalam keadaan fresh)

10. Perlukah menyediakan sebanyak mungkin jenis produk

Banyak orang berbondong-bondong ke biro perjalanan bukan semata-mata karena terkenalnya nama pendiri perusahaan itu, akan tetapi karena mereka mengharapkan akan memperoleh paket wisata hamper ke semua daerah tujuan wisata.

Pada situasi industri akan ditemukan hambatan untuk memperluas jenis-jenis barang produksi, karena biaya perubahan produk atau biaya angkutan tinggi. Di dalam usaha perjalanan hal ini bukan masalah jika strategi khusus ini akan diterapkan, akan terjadi sedikit bahaya “asal jadi” hal yang harus diperbaiki dengan strategi spesialisasi, sector demi sector secara bertahap.

Salah satu segi strategi pemasaran yang sering disebut *copy plat form* yang digunakan dalam periklanan. Strategi ini sangat diminati karena bukan saja sangat menguntungkan, tetapi juga menyatakan besarnya biaya pemasaran serta mencerminkan mental pengiklanan dan citra yang ingin ditampilkan. Akhirnya suatu hal yang sangat ditekankan bahwa didalam kegiatan pemasaran, tidak bertindak berarti maut betapapun kecilnya upaya pemasaran, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali upaya pemasaran dilaksanakan.

Hubungan Masyarakat

Kemajuan dapat dimulai dengan berani berkata “tidak cukup membuat dengan baik”, tetapi perlu juga membuat sesuatu itu “terkenal”. Karena itu hubungan masyarakat suatu daerah kunjungan wisata harus diartikan sebagai upaya bagian dari keseluruhan upaya komunikasi yang dilakukan. Sasarannya tentu untuk menciptakan dan memantapkan suatu citra yang positif dari daerah dimaksud. Citra yang diupayakan demikian harus sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan dikenal orang, agar tujuan hubungan masyarakat itu lebih berhasil guna dan dapat menciptakan iklim penilaian dan sikap simpatik yang memuaskan.

Dalam bidang pariwisata, tehnik hubungan masyarakat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Memasukkan berita ke surat kabar, melakukan konferensi pers dan menyusun berita bergambar
- b) Membuat film documenter tentang pariwisata yang akan dimuat di bioskop atau televisi
- c) Menyelenggarakan perjalanan wisata perkenalan dan pendidikan bagi pemimpin penerbit, para penulis pariwisata, pengusaha perjalanan, pegawai usaha angkutan dan biro-biro perjalanan sebagai tamu, agar mereka itu memperoleh berita dari tangan pertama secara langsung mengenai daerah tujuan wisata itu.
- d) Mendorong dan menunjang took-toko serba ada (toserba), para penyelenggara, para pameran busana dan usahawan pabrik agar mereka mau menggunakan daerah kunjungan wisata itu atau sebagai bagian pelengkap dalam usaha promosinya.
- e) Menyelenggarakan pekan perkenalan antar bangsa di Negara sumber wisatawan, misalnya menyelenggarakan pekan perkenalan masakan daerah, pameran seni musik dan budaya, wawancara di televisi, pertandingan olah

raga, pameran kebudayaan dan kesenian rakyat dan sebagainya.

- f) Penyelenggaraan sayembara di radio dan televisi
Mengenai masalah daerah kunjungan wisata, dalam segi sejarahnya. Atraksi budayanya, informasi umum dan sebagainya, yang diimbali dengan hadiah-hadiah yang menarik.
- g) Menyelenggarakan sayembara megarang tentang daerah kunjungan wisata itu dan sebagian dari daerahnya dengan diberikan hadiah-hadiah yang berharga.
- h) Pemberian cinera mata yang diproduksi dari daerah kunjungan wisata itu.

Beberapa Objek Wisata Potensial di Serang Tasik Kardi

Tasik Kardi terletak kurang lebih 3 km sebelah selatan Masjid Agung Banten. Tasik Kardi merupakan tempat pemandian dan melepaskan lelah keluarga Sultan. Tasik kardi juga memiliki keindahan panorama alam dengan perpaduan alam pedesaan yang dikelilingi hamparan sawah serta berbagai jenis pohon menjadikan tempat yang pas untuk sekedar menghilangkan penat. Tempat ini banyak dituju oleh masyarakat Serang kaerna memiliki nilai sejarah yang luhur.

Nama Tasik kardi diambil dari kata tasik artinya danau dan kardi artinya buatan. Jadi Tasik kardi artinya buatan. Luasnya kurang lebih 5 ha di tengah-tengah danau tersebut terdapat sebuah pulau yang berbentuk segi empat. Danau ini digunakan untuk menampung air (waduk) untuk mengairi sawah-sawah yang ada disekitar kesultanan Banten. Seuruh dasar atau alas dari danau tersebut dilapisi dengan ubin bata. Dahulu pada tahun 1932 tempat ini dipelihara dan diperbaiki kembali untuk rekreasi, sehingga sekarang pun tempat ini masih digunakan untuk rekreasi dengan mengalami perbaikan-

perbaikan dalam rangka pembangunan dan pembinaan objek-objek purbakala Banten Lama.

Air dari Tasik kardi dahulunya dialirkan ke Keraton Surosowan melalui pipa-pipa dan tempat-tempat penyaringan/pengindelan pada dua tempat yaitu pengindelan abang dan pengindelan putih. Kegunaan Tasik kardi selain untuk kegiatan rekreasi, juga dimanfaatkan untuk keperluan perikanan dan penampungan air untuk sawah-sawah di waktu musin kemarau. Disamping itu juga, di tempat ini para pengunjung bias melakukan kegiatan rekreasi seperti memancing, perahu dayung, motor boat, camping area dan beberapa kegiatan rekreasi lainnya. Letak Tasik kardi kurang lebih 3 km sebelah selatan masjid agung Banten.

Pemandian Air Panas batu Kuwung

Batu kuwung terletak di kaki gunung Karang yang merupakan gunung merapi yang telah mati, letaknya sebelah selatan Kota Serang. Jarak Batu kuwung dari Kota Serang sejauh 30 km, jalan dalam keadaan baik dan dapat ditempuh oleh berbagai jenis kendaraan. Nama Batu Kuwung diambil dari nama sebuah batu cekung yang mengeluarkan air panas yang tidak henti-hentinya. Panasnya kira-kira mencapai 70 – 80 derajat Fahrenheit. Di dekat inilah objek pariwisata batu kuwung di bangun untuk keperluan rekreasi dan pariwisata bagi para pengunjung. Pemandian air panas batu kuwung mengandung kadar yodium yang sangat berguna bagi penyembuhan penyakit rematik, polio, penyakit kulit dan lain-lain.

Cagar Alam Pulau Dua atau Pulau Burung

Terletak di sebelah utara Pelabuhan Karangantu (Teluk Banten) dinamakan Pulau Dua adalah pulau yang kedua dari pulau-pulau yang ada di Teluk Banten. Jarak Pulau Dua/Pulau Burung dari Karangantu kurang lebih 3 mil yang dapat dicapai

oleh motor boat, perahu layer dengan memakan waktu kurang lebih seperempat jam. Disebut Pulau Burung karena pada bulan April sampai dengan Agustus setiap tahunnya selalu didatangi oleh berbagai jenis burung dari berbagai benua, seperti Afrika, Asia dan Australia untuk bertelur, menetas dan setelah dewasa mereka kembali ke asalnya.

Dengan adanya Pulau Burung yang dihuni oleh berbagai jenis burung, maka pulau ini merupakan Cagar Alam yang dilindungi oleh undang-undang. Macam-macam burung yang terdapat di pulau ini terdiri kurang lebih dari 50 jenis burung dan merupakan jenis burung pemakan ikan yang mempunyai daya terbang jarak jauh misalnya, bango, itik, belibis, ayam-ayaman dan berbagai jenis burung yang telurnya antara 2 sampai 4 biji. Dari pulau ini dapat kita lanjutkan meninjau beberapa pulau-pulau lainnya sambil menikmati suatu taman laut yang indah di sekitar teluk Banten.

Kesenian Daerah Unggulan Pariwisata

Debus

a. Sejarah

Debus atau Al Madad diajarkan oleh seorang ulama yang banyak menggunakan ilmu hikmat (Ilmu Tarekat Qodariah). Ada persamaan debus yang tumbuh didaerah Aceh yang disebut Deboah, kemungkinan asal kata debus juga dari kata Deboah.

Syech Almadad dari Aceh banyak mengajarkan ilmu hikmat (Tarekat) sehingga ilmu ini banayk tersebar di daerah Banten. Pada abad ke 16 - 17 M, Debus berkembang di kalangan laskar Banten. Kadang-kadang Sultan Abdul Fathi Abdul Fatah turut memimpin permainan Debus di kalangan prajurit Banten. Mereka dipimpin perang-perangan dengan memakai alat yang tajam dan runcing. Umpamanya tombak dan pedang. Dengan keyakinan yang tebal mereka percaya bahwa tidak ada suatu benda tajam yang dapat melukai kulit

kalau tidak dengan dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian permauan ini meresap kepada masyarakat sehingga terciptanya Debus samapai sekarang.

b. Alat-alat

Kendang, rebana besar Iterbang gede, beduk kecil kecrek.

c. Cara memainkannya

Penzikir berdzikir menyanyikan suatu dzikiran yang isinya memuji Allah dan Syalawat kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada sahabat dan kerabatnya. Dengan gabungan suara Dzikir dan tabuh-tabuhan yang harmonis. Seorang syech yang bertanggungjawab atas jalannya permainan ini selalu berdoa kepada Allah yang masing-masing membawa gada bertangkai besi yang runcing dan palu besar menari mengikuti irama tabuh-tabuhan.

Seseorang memalu dengan palunya tadi dan seorang menahan gada bertangkai besi runcing itu pada perut, dada, dan paha. Demikianlah selanjutnya permainan ini diulang beberapa kali.

Permainan yang membahayakan tapi mengesankan karena mereka tabah dalam menghadapi sesuatu ujian mempertebal rasa iman dan keyakinan kepada Allah SWT.

Beluk

Beluk ialah suatu bentuk kesenian seni suara (vokal yang dinyanyikan dzikir untuk mengiringi kesenian debus yang memuji Allah dan syalawat kepada Nabi Muhammad SAW (Tahlil dan Tahmid).

Caranya :

Mula-mula mereka duduk sambil dzikir dengan suara rendah, makin lama makin tinggi dan akhirnya salah seorang dari yang hadir mengeluarkan suara lengkingan (beluk). Yang lainnya tetap rendah dengan mengucapkan "La Illaha Ilallah" kemudian berdiri sambil berjoget.

Patingtung

Patingtung ialah pencak Banten. Hampir 75% pencak di Banten terdiri dari patingtung. Tiap desa di Provinsi Banten ada sebuah atau lebih perkumpulan patingtung.

Alat-alatnya :

Kendang indung dan anak, terompet, gong, bonang (keromong).

Cara permainannya :

1. Ibing mengikuti irama patingtung banyak gerak daripada variasi khusus.
2. Sabutan serang menyerang berperangan.
3. Banyak mempergunakan ilmu kebatinan dan sulap, umpamanya :
 - a. Naik taraje (tangga) golok.
 - b. Dibacok, dikerat, ditindik dan memotong lidah.
 - c. Main api, memegang api, dibakar, makan bara api, menggoreng telur diatas kepala, memegang cairan gula panas, diserder dengan besi panas dan sebagainya.

Rudat

Rudat adalah kesenian rakyat yang berkembang di seluruh bagian wilayah Provinsi Banten jauh sebelumnya kesenian ini sudah ada. Dalam sejarahnya Banten, Sultan Ageng Tirtayasa semasa mudanya gemar akan kesenian diantaranya : Debus dan lain-lain Beliau ikut dalam kesenian-kesenian tersebut. Kesenian ini terbatas pada perkembangan agama Islam.

Alat-alatnya : Genjring atau terbang besar 5 atau 7 buah dan kecek.

Ubrug

Ubrug adalah kesenian rakyat yang banyak berkembang di Provinsi Banten khususnya wilayah bagian utara. Kesenian ini suatau corak kesenian dagelan/sandiwara. Dimasukan

didalmnya : seni tari, seni suara, seni drama lawakan (bobodoran), dan pencak. Justru dari banyaknya seni-seni lain dimasukkan ke dalamnya banyak digemari masyarakat dan penggiring atau instrument yaitu gamelan salendro.

Mawalan

Sangat pesat perkembangannya di Provinsi Banten. Hampir setiap RT/RW ada di tiap kecamatan sebuah perkumpulan mawalan. Mawalan ialah menyanyikan lagu-lagu Arab berirama Arab. Mawalan biasanya meningkat pada Qosidahan.

Kesimpulan

1. Salah satu aset daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan yaitu sektor pariwisata yang tersebar luas mulai dari kawasan wisata pantai sampai wisata alam pegunungan.
2. Provinsi Banten memiliki sumber alam dan peninggalan budaya serta peninggalan sejarah yang potensial untuk dikembangkan. Selain itu juga Provinsi Banten dapat dijadikan tempat tujuan wisata yang menarik dan menghasilkan Pendapatan Daerah Asli (PAD) yang besar bila dikembangkan secara optimal.
3. Disamping tempat-tempat wisata yang memiliki potensi untuk Pendapatan Daerah Asli (PAD) terdapat pula kesenian daerah yang dapat menjadi unggulan untuk menunjang pengembangan pariwisata seperti Debus, Pencak Silat, Rudat, Rampak Bedug dan lain-lain.
4. Keanekaragaman wisata di Provinsi Banten sayangnya belum dikembangkan secara maksimal karena masih dijumpai permasalahan dalam perkembangannya. Secara umum masalah yang dijumpai dalam bidang pariwisata ini adalah belum terpromosikannya daerah wisata potensial, pengelolaan wisata yang terkesan seadanya,

kurangnya pusat informasi wisata, masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata, terbatasnya informasi dan data tentang situs-situs yang masih belum terurus.

5. Provinsi Banten merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya, baik alam maupun ekonomi yang didalamnya termasuk pariwisata. Disatu sisi keanekaragaman potensi alam dan budaya yang ada sudah diketahui oleh wisatawan, tetapi di sisi lain masih banyak potensi alam dan budaya belum dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pariwisata.

Saran

1. Peranan sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan yang dapat memacu perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan suatu kebijakan strategi dalam pembangunan, pembinaan dan pengembangan pariwisata agar arah pembangunan daerah terutama bidang pariwisata dapat berjalan efektif, efisien terpadu dan berkesinambungan.
2. Berbicara mengenai promosi objek wisata, butuh pengelolaan dan kesadaran yang tinggi untuk dapat menciptakan pariwisata Banten menjadi sebuah industri pariwisata.
3. Diperlukannya kemampuan berkompetensi dengan daerah lainnya dalam mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Banten.
4. Perlu dikembangkan dan dibina secara professional sebagai salah satu sektor unggulan agar dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Hal ini tentu tidak terlepas dari peranan pemerintah melalui kebijakan untuk menciptakan berbagai kemudahan bagi masyarakat industri pariwisata.

5. Upaya untuk mencapai perkembangan kepariwisataan tidaklah mudah, hal tersebut didasarkan pada 2 faktor yang secara umum sangat mempengaruhi yaitu investasi dan keamanan.

Daftar Pustaka

- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, 2005. *Ragam Pusaka Budaya Banten*, BP3 : Serang.
- Guillot, Claude., 2008, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X – XVII*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Jakarta.
- Hakim, Lukman., 2006, *Banten Dalam Perjalanan Jurnalistik*, Banten Heritage, Pandeglang.
- Iskandar, Yoseph., 2001, *Sejarah Banten*, Tryana Sjam'un Corp, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono., 1990, *Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Sistem Pengelolaan Benda Cagar Budaya.
- Pujileksono, Sugeng., 2006, *Petualangan Antropologi: Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, UMM Press, Malang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),
dan Pasal 32

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang
Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar
Budaya.

Wahab, Salah., 1998, *Pemasaran Pariwisata*, Pradnya Paramita,
Jakarta.

REVITALISASI PERAN MUSEUM SITUS KEPURBAKALAN BANTEN LAMA

*Oleh : Hasuri, Ayuning Budiati, Titi Stiawati,
Ipah Ema Jumiati, dan Rahmawati*

Pendahuluan

Museum memiliki peran yang sangat signifikan bagi kemajuan suatu bangsa, karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mau menghargai sejarahnya. Karena kita semua belajar dari sejarah, mengambil manfaat darinya. Museum berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran untuk maju dan berkembang khususnya bagi kalangan generasi muda, karena merekalah yang akan meneruskan perjuangan para pejuang pembangunan yang ada dewasa ini dan pada masa pendahulunya.

Museum Banten lama mulai didirikan pada tahun 1976 dengan latar belakang untuk meningkatkan pendidikan sejarah dan kesadaran mencintai nilai-nilai leluhur kita semua, dalam hal ini para leluhur pada masa Banten Lama. Banten Lama dahulu dijuluki sebagai Port Diamont (Bandar Intan) sudah

lama terkubur dan terlupakan orang, Sejak dibumi hanguskan oleh Daendels tahun 1813, kota perdagangan internasional di Asia Tenggara itu tinggal puing-puing. Pusat kerajaan terbesar di Jawa tinggal kenangan, kota yang dahulu ramai kini telah berubah menjadi sebuah desa yang sepi.

Situs purbakala Banten Lama pada masa lampau memiliki arti penting bagi bangsa Eropa. Disini nenek moyang mereka pernah menginjakkan kaki dan melakukan perdagangan dengan Banten. Dalam catatan sejarah, Bukti-bukti itu sampai sekarang masih bisa disaksikan di kawasan purbakala Banten Lama. Betapa indahnya apabila kawasan tersebut menjadi Taman Purbakala. Semua situs ditata apik, dipelihara dan ditanami bunga-bunga yang indah. Pada tahun 1990 pernah direncanakan, Banten lama menjadi kawasan wisata terpadu dan dibentuk semacam daerah otorita. Bahkan konsultan dari Jepang, JICA, pernah melakukan survey untuk perkembangan pariwisata. Sayangnya proyek tersebut tidak dilanjutkan, karena orang Banten menganggap, Banten Lama sudah cukup indah dan bisa dinikmati oleh orang Banten sendiri saja. Padahal JICA memiliki konsep, situs keberbukalaan itu bisa dinikmati seperti pada abad ke-17 misalnya, naik perahu yang melayari sepanjang kanal dari pesisir pantai sampai ke keraton Surosowan.

Selanjutnya Museum Banten Lama berfungsi sebagai *site storage* bagi benda-benda sejarah yang ditemukan di sekitar Banten Lama yang walaupun lokasinya berada di Kabupaten Serang, kedudukannya berada dibawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Hal tersebut mengakibatkan segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan museum tergantung kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat.

Saat ini, seluruh pegawai museum berjumlah 13 orang dengan komposisi 1 orang penanggungjawab, 9 orang Satpam, 1 orang *Office Boy*, 1 orang Kasir dan 1 orang *Guide*. Adapun data pengunjung pada tahun 2007 dan 2009 sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pengunjung Tahun 200 - 2008

BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG	JUMLAH PENGUNJUNG
	2007	2009
Januari	1591	1242
Februari	1149	1887
Maret	3019	2462
April	2385	1166
Mei	1405	1707
Juni	1264	1103
Juli	1843	984
Agustus	1403	782
September	932	1127
Oktober	2278	2379
Nopember	2037	2138
Desember	1108	1210

Dari data di atas, jumlah keseluruhan pengunjung selama tahun 2007 adalah 20.414 orang. Jika dilihat dari jumlah tersebut, maka pemasukan dari karcis adalah Rp 20.414.000,- (selembar karcis Rp. 1000,-).. Sedangkan pada tahun 2009 jumlah pengunjung adalah 18187 orang. Jika dilihat dari jumlah tersebut, maka pemasukan dari karcis adalah Rp 18.187.000,- (selembar karcis Rp. 1000,-). Dengan dana tersebut tidak cukup untuk biaya operasional dan perawatan museum pertahunnya.

Kunjungan wisatawan ke museum tersebut merupakan bukti masih ada minat masyarakat datang ke Banten lama, namun sangat disayangkan warisan kepurbakalaan Banten Lama ini kurang pengelolaannya, hal ini terlihat kurangnya tertata dengan apik benda-benda kepurbakalaan yang tidak memiliki ilustrasi dan label yang jelas sebagai sarana untuk mendeskripsikan identitas benda-benda yang mempunyai nilai

historis dan nilai edukatif. Disamping itu kurang luasnya ruang pameran di museum Banten lama menyebabkan tidak semua koleksi dapat terpajang, sehingga hanya menumpuk di gudang penyimpanan koleksi, hal ini menunjukkan bahwa adanya keterbatasan ruang pameran bagi benda-benda koleksi peninggalan Banten Lama yang syarat akan nilai sejarah.

Selanjutnya museum Banten Lama bukan semata-mata diperuntukkan bagi kepentingan sosial masyarakat Banten sendiri, melainkan juga untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan. Oleh karena itu dirasakan perlu dilakukan revitalisasi peran museum yang melibatkan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian budaya serta perlu adanya sosialisasi pada tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Lebih jauh, museum tersebut, juga dapat dimanfaatkan bahan penelitian secara komprehensif dan integratif dari berbagai cabang disiplin ilmu mengenai kehidupan masa lalu, terutama bagi arkeolog-arkeolog yang mengkaji kebudayaan Banten Lama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan museum dalam melestarikan nilai-nilai dan peninggalan-peninggalan sejarah Banten Lama maka kami mengambil tema revitalisasi peran museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama melalui kajian administrasi dan manajemen, yang disesuaikan dengan latar belakang keilmuwan kami sebagai dosen-dosen Program Studi.

Gambaran Umum Objek Pengabdian

Secara astronomis Provinsi Banten terletak antara 105,15' - 106,11' derajat Bujur Timur dan antara 5,21' - 7,10' derajat Lintang Selatan dengan luas wilayah 8.651,20 Km persegi. Batas-batasnya adalah di sebelah Utara Laut Jawa, di sebelah Selatan lautan Hindia, disebelah Timur Kabupaten Bogor dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan di sebelah Barat Selat

Sunda. Berdasarkan bentang lahan atau geomorfologinya, wilayah Banten secara umum dibagi menjadi dua bagian yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi umumnya berada di bagian selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian rata-rata 400m diatas permukaan air laut. Pegunungan di wilayah ini melintang dari timur ke barat dan diakhiri bentukan Gunung Pulosari, Aseupan dan Karang di sebelah utara. Daerah pegunungan umumnya berupa hutan dan pertanian teknis yang tidak begitu luas. Dataran rendah berada pada bagian utara dengan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan persawahan teknis. Selanjutnya adalah gambaran umum kedudukan Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama sebagai *SiteStorage Museum* bagi benda-benda sejarah yang ditemukan di sekitar Banten Lama yang pengelolaannya dibawah Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Serang yaitu :

Wilayah Kerja

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Serang merupakan unit pengelola teknis dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yang mempunyai 4 (empat) wilayah kerja yaitu : 1) Provinsi Banten, 2) Provinsi Jawa Barat, 3) DKI Jakarta, dan 4) Lampung. Dari keempat wilayah kerja tersebut, untuk Provinsi Banten, yang menjadi tanggungjawabnya secara hierarkhis adalah Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, yang notabene berada di Provinsi Banten.

Struktur Organisasi BP3 Serang

Struktur organisasi BP3 Serang terdiri dari :

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Visi dan Misi BP3 Serang

Visi BP3 Serang adalah Terwujudnya Pelestarian dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs yang optimal.

Sedangkan misinya adalah :

1. Meningkatkan upaya pelestarian benda cagar budaya dan/atau situs.
2. Meningkatkan upaya pemanfaatan benda cagar budaya dan/atau situs.
3. Meningkatkan profesionalisme di bidang pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya dan/atau situs.
4. Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang benda cagar budaya dan/atau situs.
5. Meningkatkan Kerja sama antar instansi dan lintas sektoral serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pelestarian benda cagar budaya dan/atau situs.

Tujuan BP3 Serang

Melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Ruang Lingkup BP3 Serang

1. Benda cagar budaya
2. Benda yang diduga benda cagar budaya
3. benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan
4. Situs.

g. Tugas Pokok dan Fungsi BP3 Serang

Balai Perlindungan Peninggalan Purbakala Serang, mempunyai tugas :

1. Pemeliharaan

2. Perlindungan
3. Pemugaran
4. Dokumentasi
5. Bimbingan dan penyuluhan
6. Penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada dilapangan maupun yang tersimpan diruangan.

Sedangkan tugas pokok Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan : dokumentasi, perlindungan, konservasi dan pemugaran serta pemeliharaan.

1. **Dokumentasi** adalah serangkaian kegiatan untuk membuat dokumen atau perekaman fakta, data, kegiatan, peristiwa mengenai cagar budaya baik bergerak maupun tidak bergerak beserta situsnya.

Lingkup kerja dokumentasi, meliputi :

- melaksanakan pendokumentasian.
- Melaksanakan registrasi dan inventarisasi benda cagar budaya
- Menyenggarakan perpustakaan, bimbingan dan penyebarluasan informasi.

Hasil kerja dokumentasi :

- a. Tersedianya dokumentasi benda cagar budaya dan/atau situs.
- b. Tersedianya informasi verbal, audio visual, penerbitan daftar inventaris/registerasi.
- c. Tersedianya buku-buku pokok penunjang dan pemanfaatan benda cagar budaya dan atau/situs.

2. **Perlindungan** adalah upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan benda cagar budaya.

Lingkup kerja perlindungan adalah :

- melakukan penyelamatan,
- pengamanan dan penertiban atau perijinan benda cagar budaya dan atau situs.

Hasil kerja perlindungan adalah :

1. Terjaminnya kepastian hukum benda cagar budaya dan/atau situs.
 2. Bertahannya benda cagar budaya dan/atau situs yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
 3. Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap kelestarian benda cagar budaya dan/atau situs.
3. **Pemugaran** adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan benda cagar budaya dan atau pemanfaatannya dengan cara mempertahankan keasliannya berdasarkan data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis.

Lingkup kerja pemugaran, meliputi :

- Studi kelayakan arkeologis atau studi teknis arkeologis.
- melaksanakan pemetaan, penggambaran dan
- melaksanakan pemugaran.

Hasil kerja pemugaran adalah :

- a. Tersedianya data bangunan cagar budaya yang akan dipugar secara lengkap.
 - b. Terpugarnya bangunan cagar budaya.
 - c. Termanfaatkannya bangunan cagar budaya.
4. **Pemeliharaan** adalah upaya melestarikan benda cagar budaya dan atau situs dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam dan hayati.

Lingkup kerja pemeliharaan, meliputi :

- melakukan perawatan, pengawetan atau konservasi

- membuat pertamanan benda cagar budaya dan atau situs.

Hasil kerja pemeliharaan adalah :

- a. Terpeliharanya benda cagar budaya dan/atau situs
- b. Terhambatnya proses kerusakan lebih lanjut benda cagar budaya dan/atau situs.
- c. Terciptanya keserasian diantara benda cagar budaya dan/atau situs.

Pelaksanaan Revitalisasi Peran Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama

Benda cagar budaya penguasaan atau pemilikannya selain negara dapat dimiliki oleh perorangan, yayasan dan lain-lain dengan ketentuan benda cagar budaya itu dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan, jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara. Bagi pemilik berkewajiban melakukan perlindungan dan pemeliharannya. Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan.

Oleh sebab itu diperlukan revitalisasi peran dari Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama adalah melalui observasi ke objek pengabdian dan melakukan dokumentasi atas seijin pengelola museum untuk dijadikan objek pengabdian Ipteks. Setelah mempelajari situasi di tempat tersebut, peneliti menganalisis bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan peran Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama agar meningkatkan nilai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan pengelolaan benda-benda situs kepurbakalaan.

Teknis kegiatan sosialisasi dalam bentuk promosi melalui leaflet mengenai sejarah benda-benda kepurbakalaan Banten Lama, Pin (bros) yang bergambar Menara dan Masjid Agung Banten yang merupakan simbol kejayaan dan kekentalan budaya Islam di Banten ke beberapa Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Universitas yang ada di Kota Serang misalnya :

- SMP Khairul Huda Kaloran Serang
- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang
- Universitas Serang Raya (Unsera).
- Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf Banten

Selanjutnya untuk lebih mengaktifkan peranan museum Banten Lama sebagai asset budaya peninggalan Banten Lama dengan cara memperbaharui label benda-benda sejarah yang ada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama yang sudah usang. Hal ini dilakukan agar pengunjung dapat mengetahui dan mengenal nama-nama benda sejarah yang dipajang di museum tersebut, kemudian memberi label pada benda kuno yang belum memiliki label.

Materi Sosialisasi Sejarah Singkat

Diungkapnya data arkeologi secara ilmiah yang tersebar dan terkumpul di dalam gudang sebagai hasil penelitian dan pelestarian situs Banten Lama agar dapat dinikmati masyarakat luas pada tanggal 15 Juli 1985 terwujud, yakni dengan diresmikannya Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Prof. Dr. Haryati Sudibyo.

Bangunan

Museum situs kepurbakalaan Banten Lama mempunyai luas tanah + 10.000 m² dan bangunan dengan gaya arsitektur tradisional Jawa Barat, seperti yang terlihat pada bentuk

atapnya. Adapun koleksi museum situs kepurbakalaan Banten Lama berupa benda-benda koleksi baik koleksi asli maupun benda replika/reproduksi, miniatur, diorama dan maket serta dapat dikelompokkan dalam koleksi arkeologika, keramologika, numismatika/ heraldika, etnografika dan seni rupa.

1. Koleksi Arkeologika

Koleksi arkeologika yang terdapat di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama meliputi sejumlah benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang ditemukan di Situs Banten Lama yang berasal dari masa pra sejarah, masa klasik (Hindu Budha), masa Islam, hingga masa kolonial. Koleksi arkeologika ini mencerminkan eksistensi Banten Lama telah ada sejak masa pra sejarah di Indonesia.

Koleksi-koleksi tersebut antara lain : Kapak batu, arca Nandi, genteng berbagai bentuk dan ukuran; memolo/hiasan atap bangunan/pemucak; tegel; pagar besi berhias engsel, pegangan kunci, rumah kunci, hiasan lubang kunci paku, mur dan pipa saluran air berbagai bentuk dan ukuran.

2. Koleksi Keramologika

Koleksi keramologika berupa keramik dan gerabah keramik-keramik yang menjadi koleksi museum ini terdiri dari keramik asing dan keramik asing, umumnya berasal dari Birma, Vietnam, Cina, Jepang, Timur Tengah serta negara-negara Eropa dengan cirinya masing-masing, keberadaan keramik ini mencerminkan bahwa pada pada saat itu Banten lama merupakan tempat yang ramai dengan aktivitas perdagangannya dengan berbagai bangsa yang datang kesana. Selain itu juga telah terdapat industri gerabah yang berkembang di Banten Lama, dimana gerabah-gerabah tersebut umumnya dipergunakan sebagai alat rumah tangga, unsur bangunan, serta wadah pelebur logam yang biasa disebut kowi

3. Koleksi Numismatika

Koleksi numismatika merupakan koleksi yang berupa mata uang. Koleksi yang ada di Inggris dan Tael.

4. Koleksi Etnografika

Koleksi etnografika yang terdapat pada museum antara lain berupa koleksi alat tenun. Koleksi ini merupakan alat tenun peninggalan kerajaan kesultanan Islam sampai sekarang masih digunakan. Selain itu juga terdapat sejumlah benda-benda tradisional seperti tombak dan alat kesenian.

5. Koleksi Seni Rupa

Koleksi seni rupa yang menjadi koleksi di museum pada umumnya lukisan yang menceritakan sejumlah peristiwa di Banten Lama. Koleksi seni rupa juga menggambarkan tentang kegiatan pasar pada masa lalu, juga lukisan tentang utusan duta besar kesultanan Banten yang berkunjung ke Inggris, suasana di Tasikardi, Diorama musyawarah tahun 1596; Pelabuhan Banten suasana pasar karangantu, lukisan tentang urutan sultan-sultan yang menjabat pada waktu itu dan lain-lain.

Pameran

Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama mempunyai + 1000 benda koleksi baik dipamerkan secara outdoor dan indoor maupun yang masih tersimpan di Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang dan gudang museum. Sebagian besar dari benda-benda koleksi yang dimiliki oleh museum merupakan temuan arkeologi yang berasal dari Situs Kepurbakalaan Banten Lama pada khususnya dan daerah Banten pada umumnya, baik yang diperoleh dengan cara penggalian arkeologis, maupun dengan cara pembelian/imbalan jasa dan hibah serta titipan.

Kegiatan Penunjang

Tidak berbeda dengan museum umum lainnya, museum situs ini juga mempunyai fungsi sebagai tempat pelestarian warisan budaya dan sarana dalam penelitian sekaligus sebagai tempat rekreasi. Benda-benda yang kemudian dijadikan koleksi museum merupakan faktor yang penting karena melalui koleksi-koleksi yang dimiliki dan dipamerkan, masyarakat dapat mengetahui dan mempelajari tentang sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pelayanan Umum

Selain kegiatan rutin, museum juga memberikan pelayanan umum yang bersifat teknis kepada masyarakat, yaitu :

- a. Penelitian dan pendiskripsian koleksi pribadi serta bimbingan penelitian koleksi.
- b. Perawatan dan penataan koleksi pribadi
- c. Bimbingan penulisan skripsi bagi mahasiswa, karya tulis bagi pelajar dan siswa seputar budaya Banten.

Fasilitas

Adapun sarana yang tersedia di museum ini adalah kawasan wisata Situs Kepurbakalaan Banten Lama, camping ground, ruang tiket, taman, parkir, ruang auditorium, souvenir, mushola, dan toilet.

Jam Buka

Selasa - Kamis	Jam 09.00 - 16.00 Wib
Jum'at	Jam 09.00 - 11.00 Wib & Jam 14.00 - 16.00 Wib
Sabtu - Minggu	Jam 09.30 - 15.00 Wib

Senin dan hari libur nasional Tutup kecuali dengan perjanjian

Hambatan-hambatan Pelaksanaan Revitalisasi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama

Kegiatan revitalisasi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, antara lain :

1. Terbatasnya dana untuk pengelolaan museum.
2. Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama walaupun lokasinya di Banten Lama namun pengelolaan ada pada Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah kurang memperhatikan aset yang ada di Banten Lama tersebut. Sehingga kurang dukungan dalam pengembangan museum oleh Pemerintah Provinsi Banten.
3. Tanah yang dijadikan museum dianggap oleh sebagian masyarakat sekitar adalah tanah milik penduduk. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal ini diawali pada Tahun 1976 saat pelaksanaan proyek nasional penggalian benda-benda purbakala banyak ditemukan pondasi rumah penduduk yang digali oleh Arkeolog. Dari hasil penggalian itu, banyak ditemukan benda purbakala peninggalan sejarah Banten. Akibatnya, banyak masyarakat menggugat tanah di sekitar museum dengan papan nama "Tanah Ini Milik Masyarakat" sehingga sempat beberapa waktu museum Banten ditutup untuk umum.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Museum.
5. Kurangnya minat masyarakat Serang sendiri untuk mengunjungi museum untuk lebih mengenal budayanya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah pengunjung dalam setiap harinya.
6. Hasil penjualan karcis masuk yang sebesar Rp. 1000,- untuk umum dan Rp. 500,- untuk siswa sekolah tidak mencukupi biaya operasional pengelolaan museum.

7. Sulitnya mengatur Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar lokasi Museum Situs Kepurbakalaan dan di Lokasi-lokasi objek benda cagar budaya bersejarah lainnya. Misalnya: PKL yang berjualan di depan Benteng Surosowan, Benteng Spelwijk, di seberang Museum.

Upaya-upaya Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Revitalisasi Peran Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama

1. Menjual cinderamata yang bergambar khas benda-benda sejarah Banten Lama, misalnya : Bross (Pin), Kaos, Topi, Gantungan kunci, tas, dan lain-lain.
2. Diupayakan agar Pemerintah Pusat dan Daerah lebih memperhatikan pengelolaan dan perawatan Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama demi menarik wisatawan untuk datang ke museum Banten.
3. Perlu dilakukan pendekatan yang lebih intensif dengan masyarakat terkait status kepemilikan tanah di sekitar museum dengan cara musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat.
4. Perlunya pelatihan bagi pegawai di Museum Situs kepurbakalaan Banten Lama, agar lebih profesional dalam mengelola museum yang dapat dijadikan aset pariwisata di daerah Banten.
5. Perlunya promosi yang dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, sekolah-sekolah dari mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi agar dapat melestarikan keberadaan museum Banten Lama. Lebih lanjut agar dapat menjadi media pembelajaran dan penelitian dan pengabdian sejarah Banten Lama.
6. Diupayakan meningkatkan nilai jual museum dengan cara menambah benda-benda koleksi, dekorasi ruang yang menarik, menyediakan pemandu wisata, menjaga

kebersihan museum, menyiapkan brosur sehingga dapat menaikkan harga karcis masuk agar biaya operasional dapat terpenuhi.

7. Mengadakan koordinasi dengan Pihak Pengelola Museum, Kenadiran Banten dengan Pihak Pemerintah Kota Serang dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai tata ruang museum demi keindahan museum dan untuk menarik lebih banyak pengunjung dan wisatawan untuk datang ke Banten, khususnya ke Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.

Kesimpulan

1. Masih banyaknya koleksi yang tidak memiliki label, hal ini membuat pengunjung museum tidak dapat mengetahui nama benda yang dipajang.
2. Memaksimalkan lorong atau sudut ruang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dengan menempatkan benda-benda yang belum terpajang sehingga dapat menambah jumlah koleksi benda sejarah Banten.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengerti sejarah kepurbakalaan Banten Lama dan kurangnya tenaga Satpam untuk mengamankan museum dan sekitarnya. (Saat ini hanya ada 9 orang tenaga satpam). Dampaknya bangunan-bangunan bersejarah, misalnya Benteng Surosowan sering dijadikan tempat bercengkrama pasangan muda-mudi karena kesulitan dalam hal pengawasan.
4. Masih terdapatnya masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Eks Kebalen (masyarakat eks Banten lama) yang menuntut hak atas tanah rakyat Banten di sekitar area Museum.
5. Sulitnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang maupun Pemerintah Kabupaten

Serang dan instansi terkait lainnya dalam hal Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum.

6. Sulitnya koordinasi antara unit pelayanan museum dengan Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala (BP3) Serang menyebabkan kondisi museum sangat memprihatinkan.
7. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya museum sebagai pusat studi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
8. Sistem pengelolaan benda cagar budaya dan situs kepurbakalaan Banten Lama, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk terus meningkatkan aspek penataannya. Situs purbakala memiliki banyak aspek kegunaannya, meliputi : Sumber Belajar, alat informasi, penelitian, historis, dan lain-lain.
9. Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di sekitar Lokasi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama mengganggu dalam penataan area museum dan lokasi penunjang lainnya.

Saran

1. Memberi nama/label bagi koleksi benda sejarah yang belum memiliki label untuk memudahkan pengunjung mengenali benda sejarah.
2. Memanfaatkan sudut ruang semaksimal mungkin untuk menyimpan benda-benda koleksi yang belum terpajang dengan tetap memperhatikan estetika penataan ruang.
3. Diadakannya pelatihan-pelatihan bagi SDM (pegawai dan Satpam) agar professional dalam melakukan pekerjaannya.
4. Merelokasi pedagang ke tempat yang lebih strategis untuk berdagang agar lebih teratur sehingga dapat menunjang kondusifitas penataan lingkungan Banten Lama.

5. Melakukan pendekatan yang lebih intensif dengan masyarakat terkait status kepemilikan tanah di sekitar museum dengan cara musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat.
6. Mengupayakan koordinasi lebih intensif selain dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, juga dengan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang sebagai lingkungan terdekat dengan Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama agar pengelolaan Museum dan Pemeliharaannya berjalan lebih baik dan continue. Selain itu perlu ditingkatkan fasilitas pendukungnya, agar dapat sejajar dengan museum-museum di luar Banten, maupun di Negara lain yang notabene memiliki sarana pendukung bagi nilai tambah pendorong masuknya turis manca negara maupun lokal yang berujung pada peningkatan dana pemeliharaan dan pengembangan Museum, serta media pencitraan nama baik Banten di mata masyarakat dan internasional.
7. Mengupayakan koordinasi antara unit pelayanan museum dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Serang agar pengelolaan museum dapat dilaksanakan secara maksimal dan usaha revitalisasi peran Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama dapat tercapai.
8. Sosialisasi harus secara terus menerus dilakukan melalui berbagai metode, cara, maupun strategi baik internal maupun eksternal agar manusia memiliki kecintaannya terhadap peninggalan kebudayaan bangsanya sendiri.
9. Setiap orang yang memiliki/menguasai benda cagar budaya dihimbau segera melakukan pendaftaran.
10. Setiap orang yang mengetahui adanya penemuan, pencarian, kerusakan dan lain-lain benda cagar budaya

hendaknya segera melaporkan ke Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang atau aparat setempat.

11. Setiap orang yang akan melakukan pemugaran dan pemanfaatan terlebih dahulu mengajukan izin ke Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang.
12. Merelokasi Pedagang Kali Lima ke tempat yang lebih strategis untuk berdagang agar lebih teratur sehingga dapat menunjang kondusifitas penataan lingkungan Banten Lama. Selain itu dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar lokasi museum memerlukan campur tangan Pemerintah Kota Serang, karena adanya anggapan masyarakat yang merasa bahwa untuk penertiban PKL bukan ranah pihak kenadiran Banten tetapi menjadi ranah Pemerintah Kota Serang.

Daftar Pustaka

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, 2005. *Ragam Pusaka Budaya Banten*, BP3 : Serang.

Guillot, Claude., 2008, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X – XVII*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Jakarta.

Hakim, Lukman., 2006, *Banten Dalam Perjalanan Jurnalistik*, Banten Heritage, Pandeglang.

Handayaniingrat, Soewarno., 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

Iskandar, Yoseph., 2001, *Sejarah Banten*, Tryana Sjam'un Corp, Jakarta.

Kartodirdjo, Sartono., 1990, *Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Sistem Pengelolaan Benda Cagar Budaya.

Poerwadarminta, W.J.S., 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Pujileksono, Sugeng., 2006, *Petualangan Antropologi: Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, UMM Press, Malang.

Radar Banten, Kamis, 10 Desember 2009, Hal : 9&10.

Soekanto, Soerjono, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soelaeman, Munandar., 2001, *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

The Liang Gie, 1996, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 32

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang
Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar
Budaya.

Wahab, Salah., 1998, *Pemasaran Pariwisata*, Pradnya Paramita,
Jakarta.

PEMUDA DALAM TIGA PERSIMPANGAN (Refleksi Dinamika KNPI di Provinsi Banten)

Oleh: Neka Fitriyah

Pendahuluan

Tulisan ini sebenarnya sudah cukup lama saya siapkan, kira-kira enam bulan lalu, ketika saya terlibat pergumulan hebat antara realitas objektif dan realitas subjektif. Realitas yang kerap mengundah-gulkanakan pemikiran dan kenyamanan berfikir saya. Secara terbuka, saya membenarkan bahwa KNPI Provinsi Banten merupakan objek dari penelitian thesis saya. Sudah barang tentu keseluruhan penemuannya, telah diuji keabsahan dan validitasnya dalam forum akademik, sehingga penemuan-penemuan yang ada, menjadi data yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dijadikan referensi ilmiah.

Memerlukan waktu agak lama memang, untuk menghimpun keberanian dan mencari moment yang tepat agar realitas yang ada dapat dipublikasikan secara lebih luas. Harapan saya, semoga tulisan ini tidak dikait-kaitkan dengan realitas lain, yang akan mengaburkan makna dan kebersihan

isi tulisan yang terkandung. Harapan lain juga, semoga tulisan ini bisa difahami sebagai oto kritik bagaimana sesungguhnya KNPI harus dibangun dan dikembangkan, sehingga KNPI tetap dijadikan wadah keberhimpunan yang berdampak positif bagi pengembangan pemuda dan masyarakat luas.

Tanpa bermaksud “menggurui” para aktivis KNPI, saya merasa perlu menghadirkan perspektif lain guna memenuhi tanggung jawab untuk melakukan check and ballances dalam kehidupan berorganisasi. Oleh karenanya tulisan ini saya dedikasikan bukan untuk menghakimi realitas yang ada, karena tentu pengetahuan yang dimiliki sangat tidak sebanding dengan kerumitan yang ada. Setidaknya tulisan ini mencoba menawarkan cara pandang berbeda terhadap fenomena yang kerap terjadi dalam tubuh KNPI.

Persimpangan-Persimpangan KNPI

KNPI yang mewadahi berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), memiliki ikatan-ikatan. Ikatan yang dapat memperkuat dan memperkokoh bangunan KNPI, tetapi disisi lain ikatan-ikatan ini terkadang juga meracuni tumbuh kembangnya organisasi. Ikatan-ikiatan ini kemudian ada yang melahirkan sikap loyalitas dan pengabdian tak terbatas pada kebenaran, dan diantaranya banyak juga sikap-sikap yang didasari pada pengabdian akan kepentingan, serta kecintaan mutlak terhadap pragmatisme. Realitas ini kemudian menciptakan persinggungan, pertarungan dan pergumulan pemikiran serta kepentingan yang sulit diakhiri.

Layaknya sebuah persimpangan, sebenarnya selalu ada banyak pilihan yang bisa diputuskan, dibuat dan dipilih. Pilihan-pilihan yang tentu memiliki konsekuensi dan pertanggung jawaban. Dan dalam persimpangan ini, banyak aktor yang akan melayari persimpangan tersebut, aktor-aktor itu adalah pemuda yang terepresentasikan melalui OKP. Dan

entah kemudian apakah aktor itu akan selamat, terhanyut atau bahkan terjebak dalam tiga pusaran persimpangan tersebut.

Dalam perjalanannya, saya melihat bahwa KNPI tidak selamanya konsisten dalam satu kesatuan sebagaimana sejak awal tonggak perjuangan dikibarkan. Perbedaan ideologi dan latar belakang keorganisasian, kebutuhan dan bervariasinya kepentingan, banyak mempengaruhi faksi-faksi dikalangan pemuda. Dan menurut saya, dari sinilah persimpangan itu dimulai, bergerak, memisahkan dan saling meninggalkan.

Idealisme

Tanpa ragu saya termasuk orang yang setuju bahwa idealisme merupakan nilai dan sikap yang harus diperjuangkan semua pihak. Idealisme inilah yang saya sebut sebagai persimpangan pertama di KNPI. Pertanyaannya adalah, apakah KNPI selama ini memiliki idealisme? Secara pribadi, agak sulit bagi saya untuk meyakini bahwa idealisme itu ada di kalangan aktivis KNPI. Selain agak rumit menguraikan seperti apa bentuk dan bangunan idealisme yang ada di KNPI, tetapi juga banyak perilaku pemuda di KNPI yang jauh dari nilai idealisme.

Kebimbangan saya didasari beberapa hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, pengamat politik dan aktivis KNPI itu sendiri yang mensyaratkan, bahwa setidaknya ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam bangunan idealisme. Pertama, “berpisah” dengan penguasa. Artinya KNPI tidak memiliki hubungan khusus apalagi istimewa dengan pemerintah. Karena ikatan ini hanya akan menumpulkan daya kritis dan progresivitas dalam membela kebenaran objektif. Lebih jauh, hubungan ini hanya akan melumpuhkan aspirasi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. KNPI dalam posisi seperti ini akan sulit memiliki independensitas.

Jika dilihat dari sisi sejarahnya, KNPI memang sebetulnya merupakan cerminan relasi yang kuat antara negara dan kaum muda, sekaligus sebagai produk dari relasi itu. Dan membicarakan realitas KNPI dengan mengabaikan variable negara hanya akan menjelaskan bangunan luarnya, sementara realitas terdalam tidak dapat dibaca. Tampak bngunan luar itu adalah realitas internal KNPI yang seakan tegak sebagai sosok organisasi yang otonom, padahal tidak, karena KNPI lahir dari kebijakan korporatisme yang kemudian segenap kebijakan strategis dari KNPI menjadi harus mendapatkan persetujuan pemerintah (penguasa). Artinya organisasi yang menentang terhadap kebijakan pemerintah dapat dibubarkan atau dibekukan (Alfath Abdul Fatah, 2010).

Kedua, idealisme dibangun dengan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Lebih jauh sikap ini dapat tercermin dengan sikap peka dan responsif dengan kesulitan dan penderitaan yang dihadapi rakyat. Keberpihakan ini penting bagi KNPI, dan disinilah letak idealisme sesungguhnya, memperjuangkan kepentingan rakyat, bentuk perjuangan yang tanpa akhir.

Dalam perkembangannya, tentu tidak mudah bagi KNPI untuk memiliki dan mempertahankan kedua sikap ini. Bahkan banyak pihak yang menilai, kedua persyaratan yang terkandung dalam sikap idealis tidak termiliki oleh KNPI. Dengan kata lain tidak mungkin sikap ini dapat dibangun secara bersamaan sementara KNPI masih melanggengkan hubungannya dengan pemerintah. Dualisme ini tentu tidak dapat dipersandingkan di KNPI apalagi untuk dipertukarkan. Artinya walaupun KNPI tetap ngotot memiliki idealisme, saya meyakini itu hanya sebuah utopia.

Sedikit aneh memang jika ditengah-tengah realitas terkooptasinya KNPI ada beberapa aktivis KNPI berteriak menyuarakan nilai-nilai kebenaran dan keberpihakan. Tetapi realitasnya memang membenarkan adanya kelompok ini.

Sebagaimana diketahui, kekuatan terbesar KNPI terletak pada konstruksinya dan OKP anggota yang dimilikinya. Tetapi lebih mendasar lagi, kekuatan KNPI terletak pada ketetapan hati pemudanya untuk berdiri tegak mendukung apa yang benar ketika semua tinggal diam.

Sayangnya, terkadang, kelompok ini makin terkikis dengan realitas dan hasrat politik yang ada, dan sebab idealisme memang tidak selalu bergerak sedemikian cepat dan sedemikian bijaksana untuk senantiasa terdepan. Tetapi saya berpendapat, dengan adanya kelompok idealis dan ketetapan hati pemuda yang besar ini, pada saatnya, betatapapun lambat, pada akhirnya idealisme akan bergerak mengejar ketertinggalannya dan menjadi barisan terdepan.

Pertanyaan selanjutnya, adalah seberapa banyak pemuda dan OKP anggota KNPI yang konsisten dan memiliki stamina yang kuat berada di wilayah idealis, independen, dan terus-menerus meneriakan kebenaran. Bukankah OKP yang ada, dewasa ini sudah sedemikian pragmatis dan latah dengan apa yang dimaksudkan pemerintah. Lebih tragis bahwa OKP ini juga ramai-ramai menghujat keberadaan KNPI.

Realitas yang tampak kemudian adalah, terjadinya perseteruan internal KNPI dengan anggota-anggota OKP yang berhimpun didalamnya. Perseteruan terjadi biasanya dikarenakan, adanya aspirasi yang tidak diakomodir, atau bahkan adanya ketidak-samarataan dan dominasi kue pembangunan. Dalam perkembangannya kekeringan idealisme di KNPI melahirkan sikap pragmatism bagi para aktivisnya, yang menurut penulis disebut persimpangan kedua.

Pragmatisme

Pragmatisme, merupakan persimpangan yang paling menukik dikalangan aktivis KNPI. Menukik dalam pengertian, pilihan yang secara verbal ditolak mentah-mentah oleh aktivis KNPI, tetapi dilakoni secara diam-diam dengan menikmati

berbagai fasilitas yang menyertainya. Dalam tulisan ini sengaja saya menegaskan, bahwa yang perlu mendapat sorotan tajam ialah fenomena pragmatisme dikalangan pemuda aktivis dan OKP anggota KNPI.

Bahwa pragmatisme dikalangan pemuda KNPI merupakan sikap yang senantiasa menggampangkan, mengukur setiap kerja yang dilakukan dengan hitung-hitungan materi, tidak mau bersusah payah merumuskan dan menganalisa masalah, dan mengorbankan idealisme. Pragmatisme, tidak saja menimbulkan kelesuan, kemalasan dan ketidak-objektian dan keserbabedaan, namun yang paling fatal, mematikan energi idealisme pemuda itu sendiri.

Setiap masanya, pemuda memiliki kompleksitas, tantangan sesuai konteksnya. Tantangan-tantangan itu membentang dari hal yang paling sederhana hingga paling rumit. Tetapi, bila dicermati, terdapat pola-pola yang sama di mana tantangan tersebut menggerogoti vitalitas dan konstruktifitas idealisme, pemuda. Pola umumnya adalah, disatu sisi pemuda mengembangkan idealismenya, yakni dengan terus konsisten dengan apa yang menjadi misi dan visinya yang mulia, didasari atas objektivitas dan kebenaran, tetapi muncullah tantangan di sebrang sana: pragmatism (Idrus Marham, 2005).

Ironisnya, beberapa aktivis KNPI mengamini bahwa pragmatisme yang ada, mengajarkan bahwa benar tidaknya suatu tindakan, tergantung apakah tindakan tersebut menguntungkan diri dan kelompoknya saja, meskipun dengan mengorbankan kepentingan yang jauh lebih bermanfaat, mengorbankan kepentingan publik, dan mengabaikan tanggung jawab moral. Tetapi para aktivis ini tidak berdaya manakala jangkauan pragmatisme sangat luas dan menggiurkan. Perkakas-tangkapnya juga mencapai sampai pada kehidupan yang paling pribadi sekalipun.

Tawaran-tawaran jalan pintas untuk mengelola hidup secara praktis ditawarkan. Tatkala jalan pintas menjadi pilihan utama untuk menuntaskan berbagai persoalan, maka, banyak hal yang lebih krusial, lebih penting dan maknawi ditinggalkan dan diabaikan pemuda KNPI. Nilai-nilai kewajaran hidup tergeser oleh “ideologi pragmatisme”. Sementara, idealisme makin menjadi hal yang langka, terkepung oleh iming-iming pragmatisme, yang sedemikian menghujam dan mencekik.

Pragmatisme akan sangat terlihat, ketika ada pro dan kontra terhadap pandangan dan pemikiran tertentu. Pemikiran yang disatu sisi berpegang teguh pada kebenaran objektif, tetapi di sisi lain digerogeti dengan pemikiran yang berorientasi pada kemenangan objektif. Fenomena ini akan sangat kentara dan nyata manakala ada peristiwa politis di KNPI, yang akan mengusung dan tidak mengusung seseorang.

Persoalannya kemudian adalah, bahwa fenomena ini dinilai sebagai sesuatu yang wajar dan biasa, sehingga semua elemen yang ada di KNPI dan yang bekerja memperjuangkan semangat pragmatis, semakin leluasa bergerak, tanpa ada interupsi. Dan walaupun ada pihak yang berjuang melawan hegemoni hanya akan tertindas dan ditinggalkan.

Tidak bisa dipungkiri memang, pemuda dan OKP di KNPI dalam menunaikan tugas dan misinya membutuhkan logistik dan biaya sosial serta biaya politik yang tidak sedikit. Tetapi setidaknya, ada upaya-upaya lain dan sebenarnya masih banyak instrumen lain yang bisa digunakan agar hasrat dan cita-citanya tetap tergapai tanpa harus dengan “menggadaikan” jati diri pemuda.

Jati Diri

Persimpangan ketiga dalam tubuh KNPI saya namai dengan jati diri. Jati diri ini akan terkait tentu dengan jati diri pemuda dan akan berujung bagaimana pemuda dan KNPI memiliki harga diri dan bargaining position dalam setiap

peristiwa dan perjuangan. Sebagai wadah perhimpunan seluruh pemuda, KNPI selayaknya mau dan mampu menunjukkan jati diri dengan sikap arif, semangat, bijaksana serta profesional dalam bertindak. KNPI harus kembali pada jati diri yakni sebagai perekat yang memiliki spirit kebangsaan yang utuh.

Pemuda adalah tonggak dan pilar daerah dalam mengoptimalkan keberadaan local genius. Berangkat dari sebuah idealisme dan berawal dari spirit kepemudaan, maka KNPI diharapkan mampu berperan aktif dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara sekaligus pada tatanan politik yang terarah demi tetap tegaknya semangat kebersamaan walau dalam perbedaan. Selain itu, semua pihak berharap bahwa KNPI bisa berperan aktif dalam pembangunan di Banten. Di sinilah para pemuda yang tergabung dalam KNPI harus mampu menunjukkan jati diri dengan memfasilitasi semua proses dinamika sosial.

Jati diri pemuda dalam prakteknya akan menjadi erat dengan etika dan moral yang mengerucut kepada sebuah sikap atau komitmen pada pendirian dan tujuan luhur yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi atau kelompok semata. Jati diri pemuda adalah karakter yang akan membentuk kemartabatan, karena martabat artinya menghargai dan menghormati hak siapapun, tanpa memandang perbedaan di semua sisi (Edy Prasetyo, 2010).

Merefleksikan jati diri pemuda dalam realitas ber KNPI, agak hati-hati saya menilai bahwa jati diri akan bisa dipertahankan manakala pemuda dan KNPI memiliki semangat idealisme dan jauh dari nilai-nilai pragmatis. Selama kedua komponen tersebut sulit terinternalisasi dalam tubuh KNPI, saya pikir tidak perlu mengklaim diri bahwa KNPI memiliki jati diri.

Ketika KNPI nyata hanyut dalam arus pragmatisme dan terkooptasi dengan kepentingan dinasti tertentu, tidak perlu menunggu waktu lama, bahwa KNPI hanya akan menjadi boneka yang bebas dimainkan dan dihempaskan sesuai ritme kebutuhan dan kepentingan pihak tertentu. Dan jika KNPI tidak mau keluar dan bangkit dari situasi seperti ini, jangan beranadai jika mampu menjadi wadah keberhimpunan yang mampu membawa Banten menjadi lebih baik.

Penutup

Membicarakan persimpangan dalam KNPI, memang seperti mengurai benang kusut, complex and complicated. Terlebih ketika memetakan pergumulan pemikiran dan keberpihakan pemuda dan OKP anggota, yang terlibat dalam percaturan politik dan permainan kepentingan.

Paling tidak seperti itulah kesan yang saya simpulkan dari berbagai forum diskusi dan temuan penelitian, yang saya lakukan selama enam bulan. Hampir seluruh persoalan dari hulu sampai ke hilir dimiliki oleh KNPI Provinsi Banten, yang secara realistis tidak mungkin selesai hanya dalam perdebatan wacana. Dan tidak mungkin ditangani oleh KNPI sendiri. Butuh keterlibatan, komitmen dan tanggung jawab semua pihak.

Setidaknya, gambaran persimpangan KNPI secara tidak langsung dapat memetakan ada dalam posisi mana pemuda dan OKP anggota KNPI. Adakah elemen KNPI yang tidak mampu melayari ketiga persimpangan tersebut, atau ada juga OKP dan pemuda yang sebenarnya membiarkan dan meleburkan diri pada semangat pragmatisme, semangat yang hanya menawarkan kenikmatan sesaat.

Idealisme dan jati diri merupakan nilai-nilai yang idealnya senantiasa menjadi ciri khas KNPI dalam peristiwa dan gerakan. Faktanya, banyak pemuda dan elemen KNPI yang sudah tidak mau memperjuangkan idealisme dan jati diri,

karena begitu mahal resiko sosial yang harus ditanggung, sehingga idealisme dan jati diri hanya slogan tanpa makna.

Sebagai sosok organisasi Pemuda, eksistensi KNPI banyak di pertanyakan, perannya makin surut, kiprahnya dinilai tidak bersentuhan dengan dinamika kepemudaan secara kualitatif. sehingga eksistensi KNPI lepas dari rumah sosialnya, juga KNPI hampir kehilangan jati dirinya. Kinerja KNPI sebagai wadah berhimpun visi, orientasi dan misi kaum muda dapat dikatakan tidak mengarah, maka KNPI saat ini harus mampu mendongkrak jatidiri dan sosoknya. Orientasinya mampu dirumuskan dalam situasi sosial yang berubah, dan kinerjanya sebagai wadah berhimpun dapat di pertajam dengan kerja-kerja organisasi yang berkualitas.

Untuk kesekian kalinya, secara terbuka saya masih menaruh harapan bahwa KNPI masih bisa ditata dan dioptimalkan peran dan fungsinya. Salah satunya, dengan mengembalikan jati diri pemuda, idealisme dengan melepaskan diri dari belenggu kepentingan pemerintah, dan KNPI harus mampu menjauhkan diri dari sifat pragmatisme dengan mengedepankan sikap bekerja keras, pantang menyerah dan semangat inovatif. Mampu menghindarkan organisasi dari kepentingan politik pragmatis dengan tidak melibatkan dan meleburkan diri pada *moment-moment* politis, sehingga sikap yang diambil steril dan tidak dipengaruhi kepentingan pihak luar, dan cita-cita pengembangan pemuda menjadi lebih mudah dilakukan, dan apakah persimpangan itu akan selalu ada? hanya pemuda dan aktivis KNPI yang mampu menjawabnya.

Daftar Pustaka

- Chavchay Syaifullah, 2008. Kemandirian Pemuda Tantangan dan Harapan, Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga, Jakarta.
- Idrus Marham, 2005. Pemuda dan Dinamika Kebangsaan. DPP KNPI dan World Assembly of Youth, Jakarta.
- _____ Rejuvensi KNPI Sebagai Wadah Berhimpun Pemuda dan Laboratorium Kader Bangsa DPP KNPI dan World Assembly of Youth, Jakarta.
- Najamuddin Ramly, 2009. Peran Organisasi Kepemudaan dalam Menjaga persatuan dan Kesatuan Bangsa di Daerah, Jurnal Debat, volume 1 Nomor 1 Oktober 2009.
- Masad Masrur, 2009. Debat Dedikasi Pemuda Buat tanah Air: Jurnal Debat, volume 1 Nomor 1 Oktober 2009.
- Muhammad Alfian Alfian Mahyudin, 2009. Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan kekuasaan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



Bantenisme merupakan bagian dari buku serial Kebantenan yang diterbitkan oleh FISIP Untirta. Serial Pertama berjudul Bantenesia sudah terbit pada bulan Februari yang lalu menjadi awal dari serial Kajian Kebantenan. Kemudian dilanjutkan dengan Buku Bantenisme yang saat ini ada di tangan anda. Buku Bantenisme terdiri dari dua jilid. Buku yang sedang anda baca ini merupakan buku jilid ke-1 (satu) yang berisikan kumpulan tulisan hasil refleksi maupun hasil penelitian beberapa dosen yang ada di FISIP Untirta ini. Buku ini dipublikasikan juga dalam versi online yang tersajikan di situs *www.bantenisme.com*. Buku Bantenisme Jilid 1, merupakan sebuah proses evolusi dan refleksi berfikir yang tidak akan berakhir. Buku ini merupakan proses pembelajaran yang membuka ruang diskusi terbuka bagi seluruh kalangan tentang apa dan bagaimana Banten serta perkembangannya.



BANTENISME
JILID 1



Desain Cover:
Ridvan Maulana
ridvan@indosain.com

ISBN 978-602-97365-6-4 (no.jil lengkap)
ISBN 978-602-97365-7-1 (jil.1)



9 786029 736571